Buku

by Dedeh Maryani

Submission date: 14-Jul-2020 08:27PM (UTC-0700)
Submission ID: 1357679794
File name: Isi_Buku_Bu_Dedeh_Revisi_14.docx_1.pdf (2.09M)
Word count: 55603
Character count: 368092

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN PEMBERDAYAAN

Pengertian pemberdayaan sudah banyak dikemukakan oleh para pakar. Bila dilihat dari akar katanya, "daya" merupakan kata dasar dan ditambah awalan "ber", yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga/kekuatan, maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga/kekuatan.

Berdasarkan penjelasan tadi, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. Dalam Bahasa Indonesia, kata pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *empowerment*. Merrian Webster dalam *Oxford English Dictionary* mengartikan *empowerment* dalam 2 (dua) arti yaitu :

1) *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu;
2) *To give power of authority to*, yang berarti memberi kewenangan/kekuasaan.

Semenjak tumbuhnya pengakuan bahwa manusia merupakan faktor yang sangat berperan dalam pembangunan, maka dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan bukan merupakan hal baru tetapi sudah sering digaungkan.

Berkaitan dengan begitu pentingnya peran manusia dalam pembangunan, maka pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting untuk mendapat perhatian seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Wasistiono (1998 :46) dalam bukunya mengutip pernyataan Carlzon dan Macauley yang menjelaskan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai : "membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tidakannya."

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari "*empowerment*" menurut para ahli lain, pada intinya diartikan sebagai berikut : "membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan."

B. PENGERTIAN MASYARAKAT

Pengertian masyarakat juga sudah banyak dikemukakan oleh para pakar ilmu kemasyarakatan. Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dengan orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. Selain itu ahli lain mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama. (John J. Macionis, 1997).

Berdasarkan pengertian-pengertian masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Masyarakat juga bisa dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama.

Adam Smith mengemukakan, bahwa sebuah masyarakat dapat terdiri dari berbagai jenis manusia yang berbeda, yang memiliki fungsi yang berbeda (*as among different merchants)*, yang terbentuk dan dilihat hanya dari segi fungsi bukan dari rasa suka maupun cinta dan sejenisnya, dan hanya rasa untuk saling menjaga agar tidak saling menyakiti "*may subsist among different men, as among different merchants, from a sense of its utility without any mutual love or affection, if only they refrain from doing injury to each other."*

Pengertian masyarakat menurut Linton adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan tertentu.

Adapun menurut M,J. Heskovits, masyarakat adalah sebuah kelompok individu yang mengatur, mengorganisasikan, dan mengikuti suatu cara hidup *(the way of life)* tertentu. Kemudian, menurut S.R. Steinmentz, masyarakat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai hubungan erat dan teratur.

J.L Gillin mengartikan masyarakat sebagai sebuah kelompok manusia yang tersebar yang memiliki kebiasaan (*habit*), tradisi (*tradition*), sikap (*attitude*) dan perasaan persatuan yang sama. Selain itu menurut Mack Iver, masyarakat adalah suatu sistem dari cara kerja dan prosedur, otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem yang kompleks dan selalu berubah dari relasi sosial.

Ahli lain dari Indonesia, yaitu Selo Soemardjan (1974) memberikan pengertian masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Masyarakat menurut Max Weber adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya Ahli Sosiologi dan bapak sosiologi modern, Emile Durkheim, mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Bapak Komunisme, Karl Marx, memberikan definisi masyarakat sebagai suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis

Dalam Ensiklopedi Indonesia, pengertian masyarakat ada tiga yaitu:

1) Bentuk tertentu kelompok sosial berdasarkan rasional yang ditranslasikan (diterjemahkan) sebagai masyarakat *patembayan* dalam bahasa Indonesia, lalu kelompok sosial lain yang tetap berasaskan pada ikatan naluri kekeluargaan (*family*) disebut *gemain-scaft* atau masyarakat *paguyuban*.
2) Pengertian kedua masyarakat berdasarkan ensiklopedi manusia yaitu merupakan keseluruhan masyarakat manusia meliputi seluruh kehidupan bersama.
3) Menunjukkan suatu tata kemasyarakatan tertentu dengan ciri sendiri (identitas) dan suatu otonomi (relatif) seperti masyarakat barat, masyarakat primitif yang merupakan suku yang belum banyak berhubungan dengan dunia sekitarnya.

Apabila masyarakat diartikan sebagai komunitas, maka Wilkinson mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dalam ekologi setempat dengan batasan wilayah yang bias.

Pengertian masyarakat menurut Thomas Hobbes bahwa masyarakat (komunitas) adalah proses alamiah di mana orang-orang yang hidup bersama untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Hobbes mengemukakan bahwa kepentingan diri pribadi dapat didapati dalam kelompok.

Karakteristik Masyarakat

Karakteristik masyarakat adalah sebagai berikut.

1) Aglomerasi dari unit biologis di mana setiap anggota dapat melakukan reproduksi dan beraktivitas.
2) Memiliki wilayah tertentu
3) Memiliki cara untuk berkomunikasi
4) Terjadinya diskriminasi antara warga masyarakat dan bukan warga masyarakat

5) Secara kolektif menghadapi ataupun menghindari musuh.

Basic of Society oleh Ayodoha Prasad, *googlebooks* dan berbagai definisi yang ada, dapat dicatat beberapa unsur penting masyarakat sebagai berikut:

- Adanya sekelompok manusia yang hidup bersama.

Dalam hal ini, tidak dipersoalkan berapa jumlah manusia yang hidup bersama itu. Sedikitnya ada dua orang. Kehidupan hersama tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Ungkapan "cukup lama" bukanlah sebuah ukuran angka. Melainkan, hendak menunjukkan bahwa kehidupan bersama tersebut tidak bersifat insidental dan spontan, namun dilakukan untuk jangka panjang.

- Adanya kesadaran di antara anggota bahwa mereka merupakan satu kehidupan bersama.

Dengan demikian, ada solidaritas di antara warga dan kelompok manusia tersebut. Kelompok manusia tersebut merupakan sebuah kehidupan bersama. Maksudnya, mereka memiliki budaya bersama yang membuat anggota kelompok saling terikat satu sama lain.

Jadi pengertian masyarakat dalam kenyataan, ada perbedaan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya. Perbedaan itu terjadi karena masyarakat mengalami evolusi, atau perkembangan secara lambat. Berdasarkan tahap yang dicapai dalam proses evolusi, terdapat beberapa tipe kelompok masyarakat.

Berbagai tipe masyarakat ini memiliki beberapa persamaan Salah satunya adalah kesediaan saling membantu antar-warga masyarakat ketika menghadapi kesulitan (krisis). Umumnya warga masyarakat akan enggan memberikan bantuan kepada anggota yang hidup tidak sesuai dengan budaya dan norma yang berlaku dalarn masyarakat tersebut. Mekanisme ini relatif sudah terlembaga dalam masyarakat.

Proses Terbentuknya Masyarakat

Masyarakat terbentuk melalui proses tertentu yang dilaluinya. Dalam mempelajari proses terbentuknya masyarakat, perlu dilakukan analisis dari berbagai proses yang ada seperti proses belajar kebudayaan sendiri, proses evolusi sosial, proses difusi, akulturasi, dan pembauran serta invovasi.

1) *Proses Belajar Kebudayaan Sendiri*

a. *Proses Internalisasi*

Manusia mempunyai bakat tersendiri dalam DNA-nya untuk mengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi pribadinya. Bentuk atau perwujudan dari kepribadiannya itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam stimulasi yang ada di sekitar alam dan lingkungan sosial dan budayanya. Bila alam yang ada di wilayahnya merupakan alam pegunungan, maka karakter dan perilaku yang kuat diadaptasinya adalah karakter dan perilaku sebagai masyarakat petani gunung. Sebaliknya bila alam yang ada di wilayahnya merupakan alam pantai, maka karakter dan perilaku yang kuat diadaptasinya adalah karakter dan perilaku sebagai masyarakat nelayan. Demikian juga bila kondisi wilayahnya merupakan wilayah perkotaan, maka karakter dan perilaku yang kuat diadaptasinya adalah sebagai masyarakat perkotaan yang pada umumnya kompleksitas persaingannya begitu tinggi, sehingga seseorang yang ingin eksis dalam kehidupan perkotaan harus memiliki mental yang kuat untuk mampu bersaing dengan masyarakat sekitarnya yang juga berusaha untuk bisa mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat, karena kalau tidak berusaha mengimbangi akan tergilas sendiri.

Sebaliknya, bila kondisi wilayahnya merupakan wilayah pedesaan, maka karakteristik dan perilaku individu-individu masyarakatnya tidak terlalu terdorong untuk memiliki pola hidup yang persaingannya terlalu ketat, melainkan lebih banyak hidup gotong royong satu sama lain. Oleh sebab itu perkembangan

zaman yang ada di wilayah pedesaan pada umumnya berjalan lebih lambat daripada di wilayah perkotaan.

Jadi proses internalisasi yang dimaksud adalah proses yang panjang sejak individu tersebut dilahirkan hingga dipenghujung ajalnya, dimana manusia atau individu tersebut belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala hasrat, perasaan, nafsu, serta emosi yang diperlukan sepanjang hidupnya.

b. *Proses Sosialisasi*

Proses Sosialisasi berhubungan dengan proses belajar kebudayaan dalam sistem sosial. Dalam proses tersebut, individu sejak masa anak-anak hingga masa tuanya mempelajari pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu di sekelilingnya.

Sebagaimana proses internalisasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka pada proses sosialisasi juga sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan yang ada di wilayah atau daerah masing-masing. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa ada masyarakat yang proses sosialisasinya berjalan dengan cepat dan ada yang berjalan dengan lambat. Hal ini terutama dipengaruhi oleh faktor pendidikan atau ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang di wilayah atau daerah yang bersangkutan.

c. *Proses Enkulturasi*

Dalam proses Enkulturasi, individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-istiadat, sistem norma, serta peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Kata *enkulturasi* juga berarti "pembudayaan".

Dalam kaitan ini, maka proses enkulturasi juga sebagaimana yang telah dijelaskan dalam proses internalisasi dan proses sosialisai sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor situasi dan kondisi daerah atau wilayah tersebut. Misalnya di wilayah atau daerah yang masyarakatnya pada umumnya berpendidikan tinggi akan mudah terjadinya pembudayaan dari inovasi-inovasi

baru yang perlu diterapkan di daerah atau wilayah tersebut, karena masyarakat akan mudah memahami apa keuntungan atau kelebihan dan apa kekurangan atau kelemahan dari hasil inovasi baru yang akan dicoba diterapkan itu.

2) *Proses Evolusi Sosial*

Suatu masyarakat yang berada di wilayah mana pun akan terus melakukan evolusi sosial. Sebagaimana pada proses internalisasi, proses sosialisasi dan proses enkulturasi yang terjadi pada masyarakat di daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang berbeda, terjadinya proses percepatan itu juga akan berbeda-beda pula. Proses evolusi dari suatu masyarakat dan kebudayaan dapat dianalisis oleh peneliti, dari dekat secara detail, atau dapat juga dipandang dari jauh hanya dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang besar saja.

3) *Proses Difusi*

Penyebaran manusia menurut kepercayaan masyarakat kepada penciptanya tertuang dalam kitab suci masing-masing individu masyarakat. Selain itu, para ahli terus menerus mempelajari hal asal muasal manusia, asal muasal tempat mulai penyebarannya, perkembangan pola hidup, perilakunya dan sebagainya.

Penyebaran manusia menurut ilmu Paleo Antropologi, diprediksi bahwa manusia muncul untuk pertama kali di daerah Sabana tropikal di Afrika Timur. Sekarang, manusia telah menduduki hampir seluruh permukaan bumi. Hal ini dapat diterangkan dengan adanya proses reproduksi dan gerakan penyebaran atau migrasi-migrasi yang disertai dengan proses adaptasi fisik dan sosial budaya dan perkembangan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi.

Dengan demikian, pergerakan manusia ke berbagai belahan bumi ini mengakibatkan adanya wilayah atau daerah yang kepadatan penduduknya tinggi atau rendah. Hal ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta perkembangan manusia di daerah

atau wilayah masing-masing. Ada masyarakat yang berkembang secara cepat, ada yang lambat. Dengan kata lain proses difusi yang terjadi pada masyarakat pada masing-masing daerah atau wilayah tersebut tergantung kepada karakteristik, perilaku dan pola hidup masyarakat tersebut.

4) Akulturasi atau Asimilasi

Akulturasi adalah sebuah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan kepada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Proses akulturasi di setiap daerah atau wilayah berbeda-beda tergantung karakteristik dan perilaku masyarakatnya. Dengan demikian cepat lambatnya proses akulturasi itu pada setiap daerah atau wilayah, juga berbeda-beda.

Asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar kebudayaan yang berbeda-beda. Sebagaimana proses akulturasi, proses asimilasi yang terjadi pada suatu daerah atau wilayah juga berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor karakteristik dan perilaku masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan.

Perbedaan kebudayaan merupakan kekuatan masyarakat tersebut bila masyarakat di daerah atau wilayah tersebut menyikapi perbedaan itu secara positif. Sebaliknya, perbedaan kebudayaan merupakan kelemahan yang ada dan berkembang di daerah tersebut bila masyarakat di daerah atau wilayah tersebut menyikapi perbedaan sebagai sesuatu yang negatif yang dapat menghambat perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut.

5) Pembaruan atau Inovasi

Inovasi merupakan suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi dan modal, pengaturan baru dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru yang

menyebabkan adanya sistem produksi, dan dibuatnya produk-produk baru.

Inovasi akan terjadi bila masyarakat di suatu daerah atau wilayah selalu berusaha menghasilkan sesuatu yang berbeda yang bisa memuaskan masyarakat tersebut dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat yang kreatif banyak menghasilkan inovasi yang bisa meningkatkan perkembangan kehidupan manusia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah atau wilayah tersebut. Namun demikian, tidak sedikit dari inovasi itu yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, jika tidak diantisipasi dengan baik.

C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan adalah meliputi : *proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri*.

Dengan kata lain keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

13

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto (2015), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1) *Perbaikan Kelembagaan*, "*Better Institution*"

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Dengan demikian tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai. Target-target yang telah disepakati oleh seluruh anggota dalam lembaga tersebut mudah direalisasikan.

Lembaga yang baik mempunyai visi, misi, tujuan yang jelas, sasaran yang dapat diukur, program kerja yang terarah. Semua anggota lembaga tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada masing-masing anggota secara jelas pada setiap periode waktu tertentu sesuai kompetensi masing-masing. Dengan demikian setiap anggota yang terlibat dalam kegiatan merasa berdaya dan merasa mempunyai peran untuk memajukan lembaga yang bersangkutan. Para anggota dapat saling memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya melalui pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya dari waktu ke waktu.

2) *Perbaikan Usaha "Better Business"*

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Di samping itu kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini juga diharapkan mampu mengembangkan lembaga tersebut, sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh anggota yang bersangkutan.

3) *Perbaikan Pendapatan "Better Income"*

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan atau *income* dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

4) *Perbaikan Lingkungan "Better Environment"*

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal bila kualitas manusia tinggi, yang salah satu faktornya adalah memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka manusia tidak akan merusak lingkungan.

Sebagai contoh, Suatu kawasan menurut ketentuan pengetahuan yang berkembang harus memiliki ruang terbuka hijau sebanyak kurang lebih 40%. Hal itu berarti masyarakat diharapkan tidak semena-mena melakukan penebangan pohon yang bisa menyebabkan banjir ataupun longsor. Dengan demikian kondisi lingkungan fisik akan tetap terjaga. Contoh lainnya, sebuah pabrik yang dimiliki oleh seorang pengusaha hendaknya memperhatikan pembuangan limbah pabrik yang didapat sebagai ikutan dari hasil produksi barang yang diproduksinya. Dalam kaitan ini pengusaha tersebut harus bertanggung jawab untuk tidak membuang limbah ke sungai atau jalan yang bisa menyebabkan tanah ataupun air di sekitar pabrik tersebut tercemar oleh zat yang membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itulah pendapatan masyarakat harus memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Bila kemiskinan terjadi, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemungkinan manusia melakukan tindakan yang merusak lingkungan, karena terdesak untuk menghidupi diri dan keluarganya. Jadi perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan "fisik dan sosial" karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5) *Perbaikan Kehidupan "Better Living"*

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai factor. Di antaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat

6) *Perbaikan Masyarakat "Better Community"*

Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan "fisik dan sosial" yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan masyarakat itu, menurut beberapa ahli terdapat empat prinsip, yaitu : 1) prinsip kesetaraan, 2) prinsip pasrtisipasi, 3) prinsip keswadayaan atau kemandirian dan 4) prinsip berkelanjutan.

1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme

berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing individu saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar, saling membantu, saling tukar pengalaman dan saling memberikan dukungan. Pada akhirnya seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya.

2) Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mendapatkan arahan yang jelas dari pendamping, sehingga mampu memotivasi dirinya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing individu. Pada akhirnya masing-masing individu masyarakat tersebut mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya secara layak.

3) Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan ialah lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan *"the have not"*, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit *"the have little"*.

Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat

material harus dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

Dalam kaitan ini diharapkan pihak pendamping melakukan apa yang digambarkan dalam peribahasa sebagai berikut : "Pihak yang melakukan upaya pemberdayaan tidak memberikan ikan, tetapi memberikan kail dan memberikan pengetahuan bagaimana cara memancingnya". Dengan demikian, individu dari masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan tersebut mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan mampu memecahkan masalah hidupnya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya dan tidak tergantung kepada pihak mana pun.

4) *Prinsip Berkelanjutan*

Program pemberdayaan perlu dirancang supaya bisa berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat sendiri. Secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Artinya program kegiatan pemberdayaan ini dirancang sedemikian rupa. Secara bertahap program itu mampu memberikan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman dan keterampilan kepada setiap individu yang terlibat dalam program kegiatan pemberdayaan tersebut. Kemudian, masing-masing individu mampu menggali dan mengembangkan potensi mereka untuk melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Soekanto (1987:63).

1) Tahap Persiapan

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu *pertama*, penyiapan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker* dan *kedua,* penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara nondirektif.

Penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat sangat penting supaya efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik.

2) Tahap Pengkajian *"Assessment"*

Tahapan ini merupakan proses pengkajian, yaitu dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan *"feel needs"* dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Dengan demikian program yang dilakukan tidak salah sasaran, artinya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana tahap persiapan, tahap pengkajian juga sangat penting supaya efisiensi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

13

3) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan *"exchange agent"* secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Beberapa alternatif itu harus dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga alternative program yang dipilih nanti dapat menunjukkan program atau kegiatan yang paling efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat.

4) Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dengan demikian penyandang dana akan paham terhadap tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan tersebut.

5) Tahap "Implementasi" Program atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antarpetugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena kadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan. Pada tahap ini supaya seluruh peserta program dapat memahami secara jelas akan maksud, tujuan dan sasarannya, maka program itu terlebih dahulu perlu disosialisasikan, sehingga dalam implementasinya tidak menghadapi kendala yang berarti.

6) Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek terbentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal. Untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap evaluasi ini diharapkan dapat diketahui secara jelas dan terukur seberapa besar keberhasilan program ini dapat dicapai, sehingga diketahui kendala-kendala yang pada periode berikutnya bisa diantisipasi untuk pemecahan permasalahan atau kendala yang dihadapi itu.

7) Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Artinya masyarakat yang diberdayakan telah mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup lebih baik dengan mengubah situasi kondisi sebelumnya yang kurang bisa menjamin kelayakan hidup bagi dirinya dan keluarganya.

D. PENTINGNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat itu sangatlah penting, karena masyarakat di setiap daerah atau di setiap regional atau bahkan di setiap negara itu tidak seluruhnya memiliki kesejahteraan yang sama. Pada umumnya masyarakat yang kesejahteraannya tinggi memiliki kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka menjalani kehidupannya. Artinya, mereka tidak tergantung kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat yang kesejahteraannya tergolong kepada masyarakat menengah ke bawah, biasanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan bantuan pihak lain, baik pemerintah, para dermawan maupun komponen masyarakat lainnya. Oleh sebab itu pemerintah harus memperhatikan masyarakat menengah ke bawah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup agar bisa hidup layak, mereka masih belum bisa mandiri sepenuhnya,. Mereka masih harus mendapat bantuan dari pihak lain.

Bantuan dari pihak lain kepada masyarakat yang belum mampu mandiri itu haruslah bersifat mendidik, yang artinya hal tersebut dapat membantu masyarakat tersebut secara sementara sebelum mereka mampu mandiri sepenuhnya. Artinya mental mereka harus dibina untuk bisa bekerja lebih baik, sehingga untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya pada masa yang akan datang secara bertahap dapat mandiri sepenuhnya.

E. KETERKAITAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari keterkaitannya dengan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud di sini adalah pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan, baik pembangunan ekonomi, pembangunan budaya, pembangunan politik, dan lain-lain.

Di samping itu pembangunan tersebut meliputi pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik. Misalnya pembangunan fisik yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi meliputi pembangunan gedung pasar dan prasarana jalan yang menuju ke gedung pasar tersebut. Bila kondisi gedung pasar dan prasarana jalan yang menuju gedung pasar tersebut ada dalam kondisi baik, maka hal tersebut akan memperlancar transaksi dalam kegiatan pasar, sehingga mempercepat perkembangan pembangunan ekonomi di daerah atau wilayah yang bersangkutan. Sebaliknya bila kondisi gedung pasar dan prasarana jalan menuju gedung pasar tersebut buruk, maka kelancaran kegiatan transaksi di pasar akan terhambat, sehingga mempengaruhi perkembangan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Contoh pembangunan nonfisik untuk pembangunan ekonomi dapat ditunjukkan dengan regulasi yang ada dan berlaku di daerah yang bersangkutan. Bila isi regulasi itu memihak kepada masyarakat secara luas, yaitu mempermudah dan membuat suasana yang kondusif untuk seluruh kalangan usaha, baik pengusaha besar, pengusaha menengah maupun kecil serta badan-badan usaha lainnya, maka pembangunan ekonomi akan cepat berkembang. Sebaliknya bila isi regulasi itu hanya memihak kepada pihak-pihak tertentu maka perkembangan pembangunan ekonomi akan menghadapi hambatan.

Selain pembangunan ekonomi, untuk pembangunan-pembangunan lainnya seperti pembangunan budaya, pembangunan politik juga harus diperhatikan pembangunan fisik dan nonfisik yang akan memperlancar pembangunan tersebut.

Bila di suatu daerah atau wilayah pembangunan tersebut mengalami hambatan, sehingga perkembangan pembangunan tersebut tidak berjalan dengan cepat karena faktor manusia yang ada di daerah atau wilayah yang bersangkutan, maka upaya pemberdayaan masyarakat tersebut harus dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat tersebut. Hal ini akan mempengaruhi juga tingkat kesejahteraan dari masyarakat yang ada di wilayah atau daerah yang bersangkutan.

Artinya pada umumnya suatu daerah atau wilayah yang masyarakatnya kurang berdaya, perkembangan pembangunannya akan lambat dan berimplikasi kepada kesejahteraannya akan rendah. Sebaliknya bila di suatu daerah atau wilayah masyarakatnya sudah mampu atau berdaya, maka biasanya berkorelasi dengan cepatnya terjadi perkembangan pembangunan dan berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Jadi, tidak bisa dipungkiri, bahwa pemberdayaan masyarakat ini berkaitan erat dengan pembangunan.

BAB II
FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. FUNGSI PEMERINTAH

Kehadiran dan keberadaan pemerintah dimaksudkan untuk melayani masyarakat. Pemeritah memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekali pun, membutuhkan

layanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan masyarakat sehari-hari erat kaitannya dengan fungsi pemerintah.

Sebelum berbicara tentang fungsi pemerintah, kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu arti pemerintah dan pemerintahan.

Pemerintahan adalah *Besctuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah adalah organ atau alat yang menjalankan pemerintahan Hal ini seiring dengan yang dikemukakan oleh Ridwan HR (2002) yang menyatakan pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di suatu negara dan bertugas untuk mengelola sistem pemerintahan dalam mencapai tujuan negara.

Pemerintahan sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas maupun sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara. (Bagir Manan, 2001).

Fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah dalam hal ini adalah "tugas" yang berkaitan dengan jabatan publik." Pengertian ini merujuk pada tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat publik dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah.

Sebelum diterbitkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, segala bentuk strategi kebijakan publik digariskan secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Penyelenggara pemerintahan daerah, khususnya para kepala daerah dan perangkat daerah, hanya bertindak sebagai pelaksana administratif.

Sistem pengelolaan pemerintahan yang terpusat ini tidak efektif karena negara Indonesia merupakan negara yang sangat

luas. Hal ini yang mendasari terbitnya undang-undang yang mengatur pemberian kewenangan terhadap daerah-daerah untuk menjalankan sistem pemerintahan yang sesuai dengan daerahnya masing-masing, tetapi masih dalam koridor pengawasan dari pemerintah pusat. Proses lahirnya Desentralisasi melalui UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap membawa semangat demokrasi karena di dalamnya memuat kebijakan Otonomi Daerah. Desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan menata rumah tangganya sendiri. Beberapa bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihan kewenangan. Kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga yang lain.

Ada empat bentuk utama desentralisasi yaitu :

1) Dekonsentrasi yang mencakup redistribusi tanggungjawab administratif hanya di dalam badan pemerintahan pusat.
2) Delegasi ke lembaga-lembaga semi-otonom atau antar-daerah, yakni delegasi kewenangan untuk mengambil keputusan dan manajemen atas fungsi-fungsi khusus kepada lembaga-lembaga yang tidak berada di bawah kontrol langsung kementerian pemerintah pusat.
3) Pelimpahan kewenangan (devolusi) ke pemerintahan daerah, melalui devolusi pemerintah pusat melepaskan fungsi-fungsi tertentu atau membentuk satuan-satuan baru pemerintah yang berada di luar kontrol langsungnya.
4) Peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara ke lembaga swadaya masyarakat yang pada kasus tertentu pemerintah dapat memindahkan hak untuk memberi ijin, mengatur atau mengawasi anggota-anggotanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang sebelumnya dikontrol oleh pemerintah ke lembaga-lembaga pararel.

Undang-Undang No.2 Tahun 1999 kemudian digantikan oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No.32 Tahun 2004, menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang ini juga mengatur bahwa daerah otonom mempunyai kewenangan untuk menata dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif sendiri dan berlandaskan pendapat/aspirassi masyarakat yang tidak menyalahi perundang-undangan. Tujuan kebijakan tentang Otonomi Daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004 adalah agar pemerintah daerah memilki wewenang yang lebih leluasa untuk mengambil tindakan terhadap kepentingan wilayahnya yang sesuai dengan kehendak masyarakatnya. Undang-undang ini dianggap memiliki sifat yang lebih demokratis karena di dalamnya termuat aturan-aturan yang memudahkan upaya proses pemberdayaan masyarakat di pemerintahan daerah yang mejangkau sampai ke masyarakat. desa.

Undang-undang terbaru tentang pemerintahan daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan *konkuren* yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3) Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Untuk mencapai tujuannya, paling tidak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menjalankan tiga fungsi yaitu: "fungsi pengaturan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan."

1) Fungsi Pengaturan

Fungsi ini menekankan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Dalam hal ini pemerintah berhak membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan mengatur pemerintah itu sendiri. Kebijakan yang ditetapkan bisa mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat.

Fungsi pengaturan yang dilaksanakan pemerintah antara lain:

- Menyediakan infrastruktur ekonomi

Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya.

- Menyediakan barang dan jasa kolektif

Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa *public goods* yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya.

- Menjembatani konflik dalam masyarakat

Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat.

- Menjaga kompetisi

Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Sebab tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut

- Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa

Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus.

- Menjaga stabilitas ekonomi

Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi.

2) Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan mecakup pelaksanaan tugas negara dalam melayani warga negara melalui organ pemerintah dan aparat pemerintah. Aparat menjalankan amanah yang tertuang dalam undang-undang dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara Indonesia. Ditinjau dari kontek implementasi fungsi pemerintah, pelayanan dapat dikategorikan sebagai upaya dalam menyiapkan, menyediakan, atau mengurus kepentingan warga masyarakat.

Peran pemerintah untuk melayani publik sangat besar. Tujuan dibentuknya pemerintah berkaitan erat dengan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah masa sekarang. Sejalan dengan pernyataan Rasyid (1997) yang menjelaskan bahwa: pemerintah dibentuk secara utama bertujuan untuk menagwasi sistem ketertiban sehungga masyarakat bisa menjalani kehidupannya dalam keadaan yang wajar. Rasyid (1997) menegaskan bahwa pelayanan pada hakikatnya merupakan satu

dari tiga fungsi wajib pemerintahan, disamping fungsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Indikator seorang aparat pemerintah dinyatakan berhasil dalam melaksanakan misi pemerintahan dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjalankan 3 (tiga) fungsi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah adalah suatu institusi yang menjalankan tugas negara. "Pemerintah merupakan seluruh alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara" (Ndraha, 1990).

Pasal 4 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa dalam rangka upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terdapat asas- asas yang harus dijadikan pedoman dalam pelayanan publik oleh aparat pemerintah, di antaranya:

a. Kepentingan umum:

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/ atau golongan.

b. Kepastian hukum:

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

c. Kesamaan hak:

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

d. Keseimbangan hak dan kewajiban:

Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

e. Keprofesionalan:

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

f. Partisipatif:

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

g. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif:

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

h. Keterbukaan:

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan

i. Akuntabilitas:

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan:

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

k. Ketepatan waktu:

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan:

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Bentuk pelayanan yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis pelayanan, yaitu :

(1) Pelayanan Administratif merupakan pelayanan dimana *ouput*nya adalah berbagi bentuk berkas/dokumen resmi yang diperlukan oleh masyarakat, antara lain dokumen tentang status kewarganegaraan, sertifikat untuk menerangkan kompetensi, dokumen kepemilikan terhadap suatu barang. Misalnya, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan Tanah dan sebagainya.

(2) Pelayanan Barang merupakan pelayanan dimana *output*nya adalah berbagai bentuk / jenis barang yang diperlukan oleh masyarakat, contohnya penyediaan air bersih, jaringan telepon, tenaga listrik, dan sebagainya.

(3) Pelayanan Jasa merupakan pelayanan dimana *output*nya berbagai bentuk jasa yang diperlukan oleh masyarakat, contohnya, kesempatan memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan jasa transportasi, dan lain sebagainya.

Upaya untuk memaksimalkan pelayanan publik telah dilaksanakan oleh beberapa pemerintah. Salah satu upaya pemerintah adalah pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan satu atap diatur melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) melalui Surat Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan satu atap antara lain disebutkan bahwa dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara dalam hal ini dititikberatkan kepada aparatur pemerintah hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan barang dan jasa. SK Menpan itu selanjutnya menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem pelayanan satu atap ini dinilai dapat meminimalkan atau bahkan menghilangkan pungutan-pungutan liar yang ada termasuk korupsi dan biaya-biaya yang tidak resmi dari calo-calo. Dengan demikian, pengurusan segala perijinan dan nonperijinan tentu dapat lebih murah dan cepat dan hanya pada satu tempat saja. Manfaat yang diperoleh oleh instansi atau pemerintah daerah yang menerapkan sistem ini tentu saja peningkatan pendapatan asli daerahnya dan juga akan memberikan nilai positif terhadap mitos tentang kinerja pegawai negeri yang lambat dan terkesan ogah-ogahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di Tomohon, Sulawesi Utara pelayanan publik hadir dalam bentuk *Mal Pelayanan Publik*. Mal Pelayanan Publik mencakup pelayanan pengurusan paspor, BPJS, perbankan, lahan, dan akta nikah. Dengan beroperasinya Mal Pelayanan Publik ini tidak ada lagi pelayanan yang tertutup, semua terbuka, kapan selesainya, berapa biayanya, berapa lama menunggunya, syaratnya apa, semuanya secara terbuka.

Gambar 1. *Mall Pelayanan Publik di Tomohon*,
Sumber : Merdeka.com

3) Fungsi Pemberdayaan.

Peranan dan fungsi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat membutuhkan strategi implementasi dengan langkah yang nyata agar berhasil mencapai sasaran dan tujuannya. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu ditempatkan pada arah yang benar, yaitu ditujukan pada peningkatan kapasitas masyarakat *(capacity,*

building) yang memberikan akses dan peningkatan ekonomi rakyat melalui pengembangan ekonomi, memperkuat kapasitas sumberdaya manusia, mengembangkan prasarana/sarana *(infrastructure)* dan teknologi, pengembangan kelembagaan pembangunan masyarakat dan aparat, dan pengembangan sistem informasi.

Pemberdayaan Pendidikan

Pendidikan dapat meningkatkan pendapatan, kesehatan, dan produktivitas. Faktor ekonomi umumnya menjadi penyebab rendahnya pendidikan masyarakat karena pendidikan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Pemerintah berperan dalam konteks pemberdayaan pendidikan antara lain:

- melakukan upaya peningkatan pengetahuan rakyat melalui suatu program yang ditunjang dengan penyiapan/ penyediaan sarana pendidikar formal yang memadai;
- melakukan upaya peningkatan keterampilan rakyat melalui suatu program, peningkatan keterampilan yang ditunjang dengan penyiapan/penyediaan sarana pendidikan non formal yung memadai; dan
- menstimulasi, mendorong atau memotivasi rakyat agar mereka mau meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui dialog dan kampanye pendidikan.

Pemberdayaan Ekonomi

Pemerintah berperan dalam konteks pemberdayaan ekonomi antara lain:

- membantu masyarakat menyediakan program-program pemberdayaan di bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- membantu masyarakat menfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat (penyediaan sarana ekonomi).

- membantu peningkatan pendapatan masyarakat melalui dorongan akses dan bantuan permodalan.

Pemberdayaan Sosial Budaya

Pemerintah berperan dalam konteks pemberdayaan Sosial Budaya antara lain:

- membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana sosial budaya bagi masyarakat (sarana keagamaan, kesenian, olah raga, kesehatan, dan lain lain sarana dan prasarana umum yang diperlukan warga),
- memberikan bantuan/dana sosial dan juga mendorong partisipasi warga dalam berswadaya, dan
- melakukan pembinaan dalam kegiatan-kegiatan sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

Pemberdayaan Psikologi

Pemerintah berperan dalam konteks pemberdayaan psikologi antara lain:

- pemerintah berupaya mengubah cara berpikir masyarakat yang selama ini masih konvensional ke cara berpikir yang lebih modern (sesuai perkembangan zaman), yang berarti bahwa posisi pemerintah adalah sebagai "agen pembaharu".
- pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi, terutama untuk pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah-mufakkat, kegotong-royongan, saling membantu, menghargai pendapat orang lain, dan bekerjasama mencapai tujuan bersama.

Pemberdayaan Politik

Pada intinya pemberdayaan politik adalah bagaimana setiap orang memiliki peluang dan partisipasi yang sama dalam kegiatan-kegiatan politik. Kesempatan bersama dalam pengambilan keputusan kepemimpinan, keterlibatan dalam lembaga-lembaga politik, kesempatan untuk memberikan pendapat, kesempatan menyampaikan hak suara, dan lain sebagainya.

Pemerintah berperan dalam konteks Pemberdayaan Politik antara lain:

- pemerintah daerah memberikan akses/peluang yang sama bagi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik, dan
- pemerintah daerah mendorong warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik.

Dalam proses dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah : perilaku birokasi pemerintahan, dukungan birokrasi pemerintahan lokal, fungsi birokasi pemerintahan lokal terhadap pembangunan sosial, tingkat pendidikan masyarakat, akses-akses masyarakat terhadap informasi program dan partispasi masyarakat.

Topik tentang pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang akan dibahas lanjut pada Bab V, yang mencakup :

1) Pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan
2) Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial ekonomi
   a. Sektor pertanian
   b. Sektor industri dan ekonomi kreatif
   c. Sektor pariwisata
   d. Sektor perdagangan dan jasa
   e. Sektor koperasi dan umkm
3) Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial budaya
   a. Sektor pendidikan
   b. Sektor budaya
   c. Sektor agama

B. ORGANISASI PEMERINTAH YANG BERFUNGSI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Organisasi adalah sebuah wadah yang berisi sekelompok orang, mempunyai pengurus, dan mempunyai tujuan yang sama. Dengan tujuan yang sama tersebut, maka semua anggota organisasi selanjutnya berusaha membuat rencana kegiatan, pelaksanaan, dan semua hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan.

Mempunyai pemerintah merupakan salah satu syarat terbentuknya atau berdirinya sebuah negara. Pengertian pemerintahan dibagi menjadi dua, pemerintahan secara sempit dan pemerintahan secara luas, sebagai berikut:

- Pemerintahan secara luas adalah seluruh kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang mempunyai fungsi dan wewenang masing-masing untuk mencapai tujuan negara atau tujuan pembangunan nasional.
- Pemerintahan secara sempit adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan dan lembaga publik yang berkaitan dengan lembaga eksekutif. Pemerintahan eksekutif adalah pemerintahan yang menjalankan seluruh kebijakannya utnuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang telah disepakati.

Organisasi Pemerintah yang Berfungsi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Sebagian besar Kementerian Republik Indonesia mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk memberdayakan masyarakat tetapi hanya beberapa kementerian yang secara khusus menangani urusan pemberdayaan masyarakat.

Berikut beberapa Kementerian yang bertugas secara khusus dalam Pemberdayaan Masyarakat.

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kementerian Sosial
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Kementerian ini bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan adalah :

a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
b) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
c) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
d) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

e) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
f) pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
g) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Secara khusus urusan pemberdayaan masyarakat ditangani oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kementerian Sosial

Kementerian Sosial menyelenggarakan Program pemberdayaan sosial dengan menggunakan dana dekonsentrasi antara lain melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat; pemberdayaan komunitas adat terpencil; kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial; dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial. Tugas Pembantuan hanya pada kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Program pemberdayaan sosial diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian Sosial. Tujuan Kementerian Sosial adalah meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan, dengan sasaran strategis sebagai berikut:

a) berpartisipasi untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan rentan
b) sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional.

Dari uraian diatas, ditetapkan sasaran strategis program pemberdayaan sosial adalah mendukung pencapaian sasaran

strategis Kementerian Sosial, yaitu sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu direktorat yang berada di bawah Kementerian Sosial yang secara khusus bertugas dalam urusan pemberdayaan masyarakat.

Program Pemberdayaan Sosial seperti tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Panduan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dilaksanakan melalui 4 (Empat) kegiatan yaitu:

1) Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat

Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat diselenggarakan sebagai upaya peningkatan kapasitas, kepedulian dan keterlibatan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kegiatan mempunyai target sasaran sebagai berikut:

- Potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, yang terdiri dari: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Pekerja Sosial.
- Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan, yang terdiri dari: Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga (LKPK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Karang Taruna dan Potensi Dunia Usaha.
- Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

2) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil bertujuan untuk mendukung kemandirian supaya mampu mencukupi kebutuhan

dasarnya. Komunitas Adat Terpencil, dan pendamping Komunitas Adat Terpencil merupakan sasaran utama kegiatan ini.

3) *Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial*

Generasi muda, keluarga pahlawan nasional/warakawuri, perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan merupakan sasaran utama pelaksanaan kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

4) *Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial*

Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai sasaran untuk pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kementerian pada Kabinet Kerja yang membidangi isu-isu terkait langkah-langkah untuk menciptakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KP3A bertugas menguatkan tugas Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dalam urusan pemerintahan yang terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Visi yang sudah ditetapkan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu: "*terwujudnya perempuan dan anak Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian*".

Terdapat 3 (tiga) pilar Misi yang tercermin pada tugas dan tanggungjawab sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu:

- Memberdayakan Perempuan
- Melakukan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

- Pemenuhan terhadap Hak Anak

Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak merupakan strategi yang ditetapkan dalam implementasi Misi dan untuk mencapai Visi tersebut. Fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
b) menetapkan sistem data gender dan anak;
c) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
d) melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;
e) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
f) mengelolan barang milik negara yang termasuk dalam tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
g) mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Beberapa Kementerian lainnya juga memasukkan program Pemberdayaan Masyarakat dalam program kegiatan antara lain :

Kementerian Kesehatan

Sebagai upaya memberdayakan masyarakat bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan meliputi:

a) Cara untuk membentuk kesadaran kritis masyarakat untuk berpikir dan menyadari hak serta kewajiban di bidang kesehatan. Membentuk kesadaran masyarakat adalah tahap permulaan dari kegiatan pengorganisasian masyarakat. Hak ini dapat dilaksanakan dengan mengajak masyarakat berdiskusi mengenai harapan mereka tentang masalah kesehatan yang dengan sumber daya yang tersedia.

b) Melakukan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat atau disebut dengan model perencanaan partisipatif. Proses ini bertujuan untuk mengggali permasalahan kesehatan. Selanjutnya pencapaian tujuan melalui kegiatan nyata dan khusus yang melibatkan masyarakat dalam merencanakan segala sesuatu tentang kesehatan. Masyarakat melakukan kegiatan ini serta didampingi oleh fasilitator. Dengan demikina, diharapkan masyarakat menjadi percaya terhadap hasil perencanaan dan juga menjadikan masyarakat mempunyai rasa memiliki atas program yang dilaksanakan. Hasil survei serta pemetaan mengenai potensi fisik lingkungan dan sosial masyarakat, yang digali oleh masyarakat sendiri merupakan basis dari perencanaan partisipatif.

c) Tahapan selanjutnnya adalah pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat adalah proses yang berupaya untuk membentu kader masyarakat. Kader ini diharapkan berperan aktif dalam lembaga berbasis masyarakat sebagai representasi masyarakat yang akan berperan sebagai penggerak dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

d) Selanjutnya, masyarakat bersama dengan pengelola pemberdayaan melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan metode dan waktu yang telah disepakati bersama. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai sejauh mana pencapaian dari kegiatan sudah atau sedang dijalankan. Hasil evaluasi ini selanjutnya dibuat sebagai rujukan untuk pelaksanaan kegiatan yang berkesinambungan

3

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menjelaskan bentuk pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) meliputi:

a) pengembangan Desa Konservasi;
b) pemberian akses berupa
    - Pemungutan hasil hutan bukan kayu;
    - budidaya tradisional;
    - perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi;
    - pemanfaatan sumber daya perairan terbatas untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi; atau
    - wisata alam terbatas
c) fasilitasi kemitraan;
   Fasilitasi kemitraan masyarakat dengan pihak ketiga, antara lain dapat berupa pemberian akses:
    - permodalan;
    - pemasaran;
    - infrastruktur;
    - kelembagaan; atau
    - teknologi.
d) pemberian izin pengusahaan jasa wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e) pembangunan pondok wisata yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Pertanian

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/Ot.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air tertuang bahwa pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air difokuskan kepada pemberdayaan organisasi/lembaga dan sumber daya manusianya sebagai penyelenggara irigasi partisipatif. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan dapat membangun keterpaduan sistem antara pengelolaan jaringan irigasi dan agribisnis pangan. Pemberdayaan diharapkan dapat menumbuhkembangkan kerjasama yang baik antarpetani maupun dengan pihak lainnya, terkait dengan pengelolaan jaringan irigasi, pemecahan masalah usaha tani anggota secara lebih efektif, dan pengembangan akses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya.

Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air tidak terlepas dari perwujudan terlaksananya fungsi dasar Perkumpulan Petani Pemakai Air yaitu: a) mendistribusikan air irigasi secara adil dan efisien; b) mengelola konflik yang terjadi antara pemakai air secara adil; dan c) memelihara jaringan irigasi tersier/tingkat usaha tani, baik irigasi teknis maupun irigasi desa secara baik dan berkesinambungan.

Seiring kebijakan Desentraliasasi, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat umumnya dilimpahkan oleh Kementerian ke Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjelaskan Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat di Kabupaten/Kota. Beberapa SKPD Kabupaten/Kota yang berfungsi dalam pemberdayaan masyatakat antara lain Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa (BPMPD), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan beberapa SKPD terkait lainnya. Peran SKPD dalam pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan pelimpahan tugas dari Kementerian terkait .

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa. Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) merupakan SKPD yang secara khusus bertugas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi BPMPD adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa. Tugas pokok BPMPD secara rinci berbeda dari satu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya. Seperti misalnya di Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009, tugas pokok dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah merencanakan, mengkoordinasikan dan mengkaji program-program, menyelenggarakan penyusunan pelaksanaan kebijakan

daerah dan sarana prasarana institusi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Fungsi BPMPD adalah;

1) perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan BPMPD dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya di Kabupaten Polewali Mandar yaitu perumusan kebijakan teknis melalui perencanaan strategis, kemudian pelaksanaan dan mengkaji program-program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembinaan, pengarahan dan pengawasan dalam bidang pemberdayaan dan pemerintahan desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2015 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 mengamanatkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan desa yang berperan sangat *krusial* dalam perwujudan pembangunan di desa. LPM harus mampu menerima dan mewujudkan harapan masyarakat desa, melakukan penyusunan rencana, melaksanakan pembangunan desa setta mampu memotivasi dan menggerakkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Agar berhasil melaknakan tugas tersebut, LPM mesti memiliki sumberdaya manusia (pengurus) yang berkualitas baik dari segi pengetahuan serta keterampilan di bidang pembangunan desa; serta mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan yang terbaik terhadap tugas dan fungsi LPM. Disamping itu, LPM juga harus mempunyai dana biaya operasional yang cukup, dan

komitmen pemerintah desa setempat untuk memberdayakan LPM sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam pembangunan desa. Besarnya peranan LPM di berbagai Kabupaten berbeda sesuai dengan dukungan yang diberikan pemerintah daerah setempat.

Hasil penelitian Salmin Dengo, dkk (2015), menyatakan bahwa peranan LPM di Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam pembangunan desa belum maksimal, karena : LPM belum optimal melakukan perannya dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di desa. Selain itu, ditemukan bahwa LPM juga belum berperan optimal melaksanakan rencana program pembangunan desa yang sudah ditetapkan, khususnya dalam menyampaikan harapan masyarakat desa terkait pelaksanaan program pembangunan desa tersebut.

Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa peran LPM belum optimal untuk membangkitkan dan mengajak keterlibatan masyarakat desa melaksanakan pembangunan desa. Misalnya, dalam hal menjelasdkan kepada warga desa mengenai program yang akan dilakukan, mengajak dan memotivasi warga desa agar berperan aktif serta mendukung pelaksanaan program pembangunan desa.

Sebaliknya penelitian Setiawan, F.M (2016) menyimpulkan bahwa peran LPMD untuk meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa sudah berhasil mengatasi permasalahan. LPMD yang merupakan perangkat desa sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyambung aspirasi masyarakat, sebagai pendorong keterlibatan masyarakat, serta pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pada pasal 94, merupakan landasan hukum atas peran LPM dalam pembangunan desa. Undang-undang ini menyebutkan : (1) Lembaga kemasyarakatan desa yang ada diberdayakan oleh desa. Lembaga kemasyarakan desa ini antara lain rukun tetangga, rukun

warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga-lembaga ini membantu melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa; (2) Lembaga kemasyarakatan desa adalah tempat dimana masyarakat desa terlibat sebagai mitra pemerintah desa; (3) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa, terlibat dalam perencanaan dan pembangunan, dan melayani masyarakat desa secara optimal; (4) Implementasi program serta kegiatan yang berasal dari pemerintah, Pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga non pemerintah harus memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang sudah terbentuk.

Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip penyelenggaraan desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus serta melakukan pengaturan terhadap segala urusan pemerintahan selain urusan pemerintah pusat. Dengan demikian Pemerintah Daerah mepunyai otoritas untuk menetapkan peraturan daerah dalam memberikan pelayanan, meningkatkan peran dan memberdayakan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Otonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, otonomi yang seluas-luasnya menjadikan daerah mempunyai peluang untuk meningkatkan daya saing yang mempertimbangkan asas demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan serta potensi dan keragaman daerah masing-masing. Camat merupakan perangkat daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menerima pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota. Camat menerima pelimpahan kewenangan terkait pelayanan terhadap masyarakat yang mencakup: rujukan penerbitan dokumen perizinan, pemberian rekomendasi,

menkoordinasikan, membina, mengawasi, mendampingi, menetapkan, meyelenggarakan, serta wewenang lainnya. Tugas lain yang dilakukan camat adalah mengembangkan tugas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan di Wilayah Kecamatan, terutama tugas-tugas yang terkait koordinasi pemerintahan terhadap semua unit kerja pemerintah di Wilayah Kecamatan; menciptakan keamanan serta ketenteraman; menegakkan aturan yang berlaku, membina kegiatan pemerintahan desa/kelurahan dan melaksanakan tugas lainnya yang belum dikerjakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di Wilayah Kecamatan (PP.19 Tahun 2008).

Tertuang dalam PP. No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, antara lain menyatakan bahwa salah satu tugas umum pemerintahan yang menjadi tugas camat yaitu melaksanakan koordinasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan, yang mencakup: mendorong keterlibatan masyarakat agar berperan serta dalam perencanaan pembangunan di kecamatan melaui forum musyawarah pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan; membina dan mengawasi seluruh unit kerja pemerintah dan swasta yang memiliki program kerja dan kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan; serta mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah atau swasta.

Salah satu contoh peran camat dalam pemberdayaan masyarakat digambarkan Majampoh, dkk (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Peranan Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulaun Talaud".

Kecamatan Rainis adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud dimana sebagian penduduknya masih termasuk kategori kurang mampu. Kecamatan ini memiliki 1329 kepala keluarga, dan dari jumlah tersebut tercatat hanya 125 KK (9,41%) yang sudah termasuk kategori Keluarga Sejahtera Tahap III, sebanyak 350 KK (26,33%) berada pada kategori Keluarga Sejahtera Tahap II, dan sebanyak 854 KK (64,26%) masih berada pada kategori Keluarga Sejahtera Tahap I serta

Keluarga Prasejahtera. Berdasarkan kondisi tersebut, Kecamatan Rainis menjadi salah satu kecamatan yang mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud terkait pemberdayaan masyarakat.

Beberapa program/kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah/sedang dilakukan di Kecamatan Rainis. Program tersebut antara lain program pemberdayaan usaha kecil melalui bantuan permodalan, program peningkatan keterampilan berusaha, program pembinaan partisipasi sosial masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, serta program pengembangan usaha ekonomi produktif,.

Berdasarkan aturan yang tertuang dalam PP.19 Tahun 2008 seperti sudah dijelaskan di atas, Peranan Camat dalam pemberdayaan masyarakat adalah:

(1) mendorong keterlibatan/partisipasi masyarakat agar berperab serta untuk merencanakan pembangunan di lingkup kecamatan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di desa atau kecamatan;

(2) membina seluruh unit kerja pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan program serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; dan

(3) mengawasi program serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan.

Sebagai contoh, program pemberdayaan yang anggarannya berasal dari dana PNPM Mandiri ditujukan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin yang dikerjakan oleh kecamatan. Program dan kegiatan pemberdayaan yang dikerjakan oleh instansi/unit kerja pemerintah antara lain program pelatihan keterampilan dan kemampuan untuk berusaha yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, program penyuluhan KB yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana Daerah, program penyuluhan kesehatan dan gizi keluarga yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Peranan camat sangat diperlukan untuk menjalankan program-program tersebut yaitu mendorong keterlibatan masyarakat berperan aktif untuk mengikuti program tersebut.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pemberdayaan Masyrakat

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memandirikan masyarakat, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Tujuan tersebut akan sulit tercapai jika beberapa kondisi seperti berikut belum berubah:

a) pembuat keputusan (*decision maker)* masih berada di tangan pemerintah sepenuhnya tanpa diimbangi mekanisme keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perumusan kebijakan,
b) keberpihakan pemerintah cenderung kepada pihak swasta dibandingkan meningkatkan kemampuan masyarakat,
c) kebijakan yang bersifat seragam untuk semua daerah dan mengesampingkan *local knowledges*, dan
d) orientasi pembangunan semata-mata mencapai pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan :

a) iklim pembangunan yang tercipta tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang,
b) terpinggirkannya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan
c) masyarakat semakin tidak berdaya terhadap pemerintah dan pihak swasta.

Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat telah mendorong timbulnya pergeseran peranan lembaga yang melayani kepentingan dan kebutuhan publik. Peran ini sebagian telah diambil oleh masyarakat itu sendiri secara swadaya. Pergeseran tersebut merupakan sebuah proses yang bersifat alami, yang harus diambil oleh masyarakat untuk merespon berbagai bentuk tekanan sosial-politik-ekonomi yang datang dari luar.

14

Secara fisik, wujud dari respon masyarakat tersebut berupa kelembagaan yang bidang kegiatannya menyesuaikan dengan mata pencaharian; dan bukannya profesi; sebagian besar masyarakat yang bermukim di suatu tempat. Contohnya adalah Kelompok Tani, Kelompok Arisan, Kelompok Pemuda dan lain sebagainya; yang dibentuk secara swadaya. Kelompok-kelompok tersebutlah yang kemudian disebut dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sebenar-benarnya, yaitu sebuah kelompok masyarakat yang secara sadar akan hak dalam mendapatkan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan mampu melakukannya secara swadaya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada yang dimaksud dengan Lembaga Swadya masyarakat (LSM) adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

14

Proses Pemberdayaan oleh LSM

Dengan mendasarkan pada ciri dan pendekatan dalam proses pemberdayaan yang telah disebutkan di awal serta ruang lingkup LSM, maka apa yang telah dilakukan oleh LSM di satu sisi telah memenuhi beberapa hal, yaitu :

a) pengambilan keputusan dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang didasarkan pada pendapat-pendapat yang berkembang di masyarakat dan atau disesuaikan dengan kondisi, potensi serta permasalahan yang ada,
b) dikarenakan latar wilayahnya pedesaan yang umumnya mempunyai banyak keterbatasan, maka masyarakat telah teruji dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya secara optimal,

c) karena aktivitas lembaga merupakan perpaduan antara mata pencaharian dengan nilai-nilai budaya maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kelompok/sosial,
d) dalam kelompok tersebut, setiap warga masyarakat mempunyai posisi yang sama, dan
e) tingkatan partisipasi masyarakat telah mencapai *Self Mobilisation*; yaitu pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk perubahan sistem dan masyarakat mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal untuk *advis* mengenai sumber daya dan teknik yang mereka perlukan, tetapi juga tetap mengawasi bagaimana sumber daya tersebut digunakan
f) kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran akan hak sebagai warga negara, *sharing of theory* dan juga bersama-sama menghadapi kebijakan publik yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan hidup; yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau pihak swasta.

BAB III
KONDISI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. KONDISI LINGKUNGAN INDONESIA

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri.

Indonesia secara astronomis terletak pada koordinat 6°LU - 11°LS dan 95 – 141°BT, terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta berada di antara dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan topografi yang sangat bervariasi. Posisi Indonesia tersebut mengakibatkan Indonesia mempinyai iklim yang dinamis.

Suhu hangat sepanjang tahun dapat ditemukan di Indonesia karena berada di garis ekuator. Rata-rata suhu permukaan pada garis pantai (ketinggian 0 Km) di atas 25°C. Indonesia diketahui mempunyai iklim maritim karena wilayah Indonesia lebih luas memiliki wilayah perairan. Iklim maritim menyebabkan suhu permukaan laut di perairan yang cepat berubah dan sangat fluktuatif sangat mempengaruhi kondisi iklim secara global. Informasi dan data tentang keadaan dan mutu lingkungan merupakan hal utama untuk menetapkan kebijakan dan memanfaatkan potensi lingkungan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan rakyat.

UUD 1945 amandemen perubahan kedua ayat 1 (satu) menyatakan setiap warga negara memiliki hak agar hidup sejahtera, mempunyai tempat tinggal, dmenikmati lingkungan hidup yang sehat dan mendapat pelayanan kesehatan.

Jumlah penduduk yang sangat besar dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan salah penyebab utama berbagai persoalan lingkungan yang ditemukan saat ini. Upaya pemerintah untuk mencukupi kebutuhan penduduk yang terus meningkat tersebut adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur dan peningkatan sektor industri. Sektor industry pada awalnya digalakkan supaya kebutuhan penduduk dapat dipenuhi dengan cepat, tetapi saat ini industrialisasi yang sangat pesat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kondisi ini akan semakin memburuk jika pembangunan tidak dilaksanakan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dilaksanakan untuk mencukupi kebutuhan masa sekarang tetapi tidak merusak lingkungan dan merngupayakan tetap mampu untuk mampu memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya. Pembangunan nasional harus diupayakan menjadi pembangunan yang berkeadilan sosial untuk semua generasi sekarang dan selanjutnya dengan menjaga kelestarian fungsi serta kualitas ekosistem.

Gambaran permasalahan lingkungan hidup yang terjadi saat ini dapat dilihat dari berbagai kondisi antara lain cuaca ekstrim, tutupan lahan hutan yang berkurang drastis, kebakaran hutan, bertambahnya daerah kritis, sungai dangkal, erosi, banjir, mutu dan jumlah air tanah buruk, pencemaran air laut, kepunahan tumbuhan dan hewan spesies tertentu, serta padatnya lingkungan pemukiman.

Gambaran kondisi dan mutu lingkungan dapat diketahui dari 3 (tiga) hal, yaitu:

a. Kondisi fisik yang terdiri dari kondisi iklim, cuaca, atmosfer, perairan, geologi, geografi, dan tanah;
b. Tutupan lahan, ekosistem, dan keanekaragaman hayati;
c. Kualitas udara, air tawar, dan air laut.

Kerusakan lingkungan hidup sangat berdampak buruk bagi masyarakat. Beberapa penelitan dan laporan lembaga terkait

mencatat permasalahan lingkungan hidup yang sedang dihadapi Indonesia saat ini adalah:

1) Permasalahan Sungai yang Tercemar

Mutu air sungai merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan karena banyak dimanfaatkan masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memantau mutu air sungai secara berkala. Dilaporkan bahwa mutu air sungai saat ini sebagian besar dikategorikan dalam kondisi tercemar berat. Sebanyak 671 titik sungai yang dipantau pada tahun 2015 dan 2016, ditemukan sebanyak 17 sungai yang mutunya tidak berubah banyak, sebanyak 211 titik sungai ditemukan kuallitas yang semakin baik, tetapi sebanyak 343 titik sungai kualitas yang memburuk sangat drastis. Air sungai ini sudah tidak layak dimanfaatkan untuk wahana rekreasi air, membudidayakan ikan, kebutuhan air untuk peternakan, pertanian dan untuk kebutuhan air minum.

Pengertian pencemaran lingkungan hidup yang dijelaskan dalam UU Republik Indonesia No 23 tahun 1997 adalah *masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.*

Berdasarkan pengertian tersebut, air sungai dikategorikan tercemar jika mahluk hidup atau zat yang berbahaya bagi kesehatan masuk atau dimasukkan ke dalam air sungai sehingga tidak layak dikonsumsi atau digunakan sesuai peruntukannya.

Air sungai dinyatakan tercemar apabila sudah terdapat berbagai zat-zat yang mengakibatkan berkurangnya mutu air dan sudah tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan sehingga air sungai tersebut tidak layak digunakan untuk kegunaan tertentu. Jadi kategori air sungai yang tercemar bukan hanya karena tercampur dengan bahan pencemar, tetapi jika air tersebut sudah tidak sesuai untuk penggunaan kebutuhan tertentu. Sebagai

contoh, sungai yang sudah mengandung logam berat atau mengandung bakteri penyakit masih layak digunakan untuk keperluan industri atau untuk pembangkit tenaga listrik, tetapi sudah tidak layak digunakan untuk keperluan rumah tangga.

Dampak Pencemaran Sungai

Limbah yang disebabkan aktifitas industrialisasi sudah berada pada kondisi yang cukup membahayakan di sebagian besar daerah di Indonesia. Tiupan angin, aliran air sungai dan daya rambat di tanah melalui difusi mengakibatkan limbah tersebut menyebar dengan cepat ke mana-mana, menyebabkan pencemaran tersebar dengan cepat di berbagai daerah.

Limbah yang dibuang secara langsung ke perairan menyebabkan kehidupan biota perairan keracunan dan kematian. Aliran pupuk yang sangat banyak menuju rawa atau danau sangat berpotensi mengakibatkan enceng gondok tumbuh subur. Erosi lumpur yang terbawa ke laut dan mengendap sehingga permukaan karang tertutup dan menyebabkan kematian karang.

Pencemaran tersebut juga mengakibatkan ekosistem biota air terganggu dan menyebabkan kematian binatang-binatang serta tumbuh-tumbuhan air karena kekurangan oksigen. Oksigen terlarut dalam air terkuras digunakan untuk dekomposisi aerobik dari zat-zat organik yang terdapat dalam air buangan menyebabkan kehidupan air kekurangan oksigen.

2) Kerusakan Hutan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan paling luas di dunia. Indonesia memiliki hutan seluas 95 juta hektar atau sekitar 50,6 persen luas wilayah Indonesia. Kawasan hutan ini mempunyai manfaat yang sangat penting dalam mendukung ekosistem dan perekonomian Indonesia. Manfaat secara ekonomi antara lain digunakan sebagai bahan baku industri, komoditi ekspor ke luar negeri, dan keperluan pangan masyarakat. Eksploitasi hutan untu mendapatkan manfaat ekonomi hutan tersebut menyebabkan kerusakan hutan yang cukup signifikan.

Luasnya wilayah hutan di Indonesia menyebabkan peran Indinesia sangat penting bagi dunia internasional. Indonesia berada pada urutan ke-3 untuk negara yang memilik hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Peringkat pertama adalah negara Brazil dan ke-2 adalah negara Zaire. Indonesia memiliki hutan hujan paling luas di kawasan Asia. Oleh karena itu, hutan Indonesia sangat diandalkan untuk menyumbang oksigen kebutuha manusia dan disebut sebagai paru-paru dunia. Hutan Indonesia berperan nyata dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Peran hutan bagi negara Indonesia sendiri juga sangat penting. Hutan merupakan salah satu modal untuk mewujudkan pembangunan nasional yang bermanfaat secara nyata untuk kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat tersebut antara manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Manfaat ekologi yang nyata dapat dilihat bahwa hutan berperan dalam siklus hidrologi dan menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung daerah aliran sungai, sehingga secara tidak langsung dapat mencegah bencana banjir dan tanah longsor.

Hutan merupakan ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati yaitu berbagai macam hewan dan tumbuhan. Hutan berperan untuk menyediakan jasa lingkungan dan sumber mata pencaharian bagi penduduk yang berada di sekitar hutan. Manfaat hutan untuk negara Indonesia secara nasional menjadi semakin penting karena hampir setengah dari wilayah Indonesia ditutupi hutan.

Permasalahan hutan di Indonesia sebagian besar adalah deforestasi. Deforestasi adalah konversi tutupan lahan hutan menjadi bukan hutan. Tercatat pada tahun 2014-2015, total deforestasi di Indonesia mencapai 1,09 juta hektar. Pulau Sumatera mengalami deforestasi paling tinggi yaitu seluas 519,0 ribu hektar atau 47,5% dari total deforestasi, dan yang kedua adalah pulau Kalimantan sebesar 34,3%.

Beberapa laporan mencatat faktor-faktor penyebab deforestasi adalah :

a. Kebutuhan pangan, sektor pertambangan dan energi

Permintaan untuk konsumsi sandang pangan, energi dan pertambangan adalah faktor yang menyebabkan penebangan hutan di Indoneasia. Kebutuhan sandang dan pangan masyarakat menimbulkan pertanian rakyat dan pertanian modern dalam skala yang besar. Pertanian rakyat yang berada disekitar hutan, umumnya dikerjakan dengan sistem ladang berpindah.

Pertanian rakyat umumnya mengelola lahan hutan yang telah ditebang dan sudah ditinggalkan oleh industri perkayuan. Kegiatan pertambangan dan energi menyebabkan deforestasi hutan yang sangat tinggi. Memenuhi permintaan pertambangan dan energi untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan ekonomi. Kebutuhan masyarakat terhadap produk pertambagan dan sumberdaya mineral menyebabkan sektor ini tumbuh sangat pesat. Pertambangan dan letak sumberdaya mineral yang berada ditengah hutan memaksa pembukaan lahan dan penebangan pohon hutan. Penebangan hutan untuk area pertambangan dan pembangunan infrastruktur pendukung merupakan dampak yang paling parah bagi hilangnya jutaan hektar luas hutan setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan tutupan hutan bekas area tambang mengalami kerusakan yang parah dan relatif sulit dikembalikan ke kondisi semula.

b. Pembakaran secara sengaja oleh pemilik perkebunan

Beberapa kejadian kebakaran hutan ditemukan adalah pembakaran yang dilaksanakan dengan sengaja oleh pihak yang berkepentingan. Umumnya pembakaran dilakukan untuk membuka lahan oleh pemilik perkebunan yang berskala besar.

c. Bencana Kebakaran Hutan

Bencana kebakaran hutan merupakan penyebab utama tingginya deforestasi pada tahun 2015. Kebakaran hutan terjadi seluas 250,9 ribu hektar, dan hampir 75% dari area kebakaran tersebut tidak ditanami kembali dan menjadi menjadi lahan terbuka, kemudian sebanyak 9,5% terbengkalai dan dipenuhi

semak belukar. Kebakaran hutan ini menjadi salah satu kejadian luar biasa dan Presiden RI menetapkan kategori bencana nasional. Bencana kebakaran hutan berdampak sangat buruk dalam berbagai bidang antara lain menimbulkan permasalahan kesehatan masyarakat sekitar dan permasalahan ekonomi bagi masyarakat dan nasional. Kebakaran hutan yang sangat luas terjadi di Kalimantan Tengah dengan luas hingga 122.883 hektar , Sumatera Selatan seluas 30.985 hektar, serta Jambi, Kalimantan Timur, Lampung dan Sulawesi Utara, masing-masing terjadi kebakaran hutan dengan luas diatas 18 ribu hektar pada tahun 2015.

Sebagian dari lahan ini tumbuh kembali menjadi semak belukar, sebagian digunakan oleh para petani skala kecil, tetapi sangat sedikit upaya yang sistematis dilaksanakan untuk memulihkan kondisi hutan seperti semula.

Gambar 2. Kebakaran hutan di Riau tahun 2017.
Sumber: merdeka.com diakses pada tanggal 05 Juli 2017

c. Pertumbuhan dan Sebaran Penduduk

Tingginya pertumbuhan penduduk merupakan salah satu penyebab tingginya deforestasi. Kepadatan penduduk yang tersebar tidak merata berdampak terhadap penggunaan manfaat lingkungan yang berlebihan dan melampaui daya dukung lingkungan.

Pada tahun 1972, pemerintah mencanangkan program transmigrasi yang telah memindahkan rumah tangga yang berada di Pulau Jawa yang terlalu padat ke pulau lain untuk mengurangi tekanan penduduk, kemiskinan dan keruasakan lingkungan. Program ini selain berdampak positif terhadap pemerataan sebaran penduduk, ternyata juga dampak negatif. Dampak negatif dari program ini adalah dengan bertambahnya jumlah penduduk di daerah tujuan sehingga terjadi pembukaan lahan hutan untuk pemukian dan lahan pertanian.

d. Pernyediaan lapangan pekerjaan

Penyediaan lapangan pekerjaan berkontribusi dalam kejadian deforestasi di berbagai daerah di Indonesia. Konversi lahan hutan untuk penyediaan lapangan pelerjaan antara lain dengan memperluas lahan pertanian dan perkebunan, pembangunan sarana perdagangan, akses transportasi berupa jalan dan infrastruktur pendukung lainnya.

e. Perubahan pola konsumsi

Konsumsi penduduk Indonesia mengalami perubahan sejak tahun 2000 s/d tahun 2015. Kecenderungan konsumsi masyarakat yang sebelumnya pengeluaran paling banyak adalah makanan mengalami pergeseran ke arah konsumi bukan makanan. Konsumsi bukan makanan antara lain belanja bahan perumahan, sandang serta sarana transportasi dan telekomunikasi. Kecenderungan konsumsi nonmakanan mendorong terjadinya perubahan lahan hutan dengan berkembangnya kegiatan perdagangan kayu, penyediaan lahan perumahan dan perusahaan industri.

3) Pencemaran Udara

Pencemaran udara didefinisikan sebagai terdapatnya satu atau beberapa bahan yang mencemari dalam jumlah dan atau masa waktu yang dapat mengakibatkan munculnya permasalahan kesehatan manusia, kehidupan flora dan fauna, atau pun kerusakan material yang menimbulkan permasalahan atau menurunnya kualitas hidup, kenyamanan, dan gangguan untuk melaksanakan aktifitas.

Mengetahui kadar kualitas udara di Indonesia diketahui dari data hasil pengukuran dengan metode yang sudah ditetapkan. Hasul pengukuran kualitas antara lain dengan menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), Konsentrasi Partikel Terlarut, dan Indeks Kualitas Udara (IKU). ISPU adalah pengukuran yang dikerjakan di stasiun pengamatan BMKG dan beberapa titik pengamatan seperti permukiman, industri, serta lalu lintas padat kendaraan bermotor.

Pengukuran ISPU dilakukan berdasarkan lima parameter pencemar utama, yaitu karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO_2), nitrogen dioksida (NO_2), ozon permukaan (O_3), dan partikulat (PM10) yang dapat diketahui fluktuasi per hari di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta BMKG. Sedangkan Konsentrasi Partikel Terlarut diukur oleh BMKG di stasiun-stasiun pengamatan yang umumnya jauh dari pusat aktifitas penduduk seperti kawasan perusahaan, area tempat tinggal, dan jalan umum.

Konsentrasi partikel terlarut di udara di berbagai daerah di Indonesia selama bulan Januari–Desember tahun 2016 dilaporkan berada pada 3,52–23.177,60 ug/m3, paling rendah ada di Stasiun Winangun Sulawesi Utara, dan yang paling tinggi ada di Stasiun Ancol DKI Jakarta. Daerah yang telah memiliki nilai di atas standar mutu yaitu diatas 230 ug/m3 selama setahun penuh ditemukan di Stasiun Glodok, DKI Jakarta.

Dampak Pencemaran Udara pada Lingkungan

a. Proses fotosistesis pada tanaman terhambat

Tumbuhan yang berada di wilayah yang sudah tercemar udara akan mengalami gangguan pertumbuhan dan rentan penyakit, seperti penyakit *klorosis*, *nekrosis*, serta muncul bintik-bintik hitam. Karena zat-zat yang tertinggal di permukaan tumbuhan menggganggu terjadinya proses fotosintesis.

b. Terjadinya hujan asam.

Air hujan dalam keadaan normal memiliki pH sebesar 5,6. Kandungan CO2 dan zat pencemar lain yang terlalu tinggi di atmosfer menyebabkan terjadinya hujan asam. Jika zat pencemar udara SO2 dengan NO2 bereaksi dengan air hujan akan menciptakan asam sehingga pH air hujan akan turun. Hujab asam mempunyai beberapa dampak negatif seperti : mutu air di permukaan menurun, tanaman tidak tumbuh atau rusak, logam-logam berat yang berada dibawah tanah terlarut dan menurunkan mutu air tanah, serta memiliki sifat yang korosif yang dapat merusak material juga bangunan.

c. Peningkatan efek rumah kaca.

Terjadinya efek rumah kaca adalah karena munculnya CO2, CFC, metana, ozon, serta N2O di lapisan troposfer yang menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Kejadian tersebut menyebakan panas menjadi terperangkap dalam lapisan troposfer sehingga menciptakan fenomena pemanasan global. Dampak pemanasan global menyebabkan es di daerah kutub akan mencair, baik regional atau global akan mengalami perubahan iklim serta berubahnya siklus hidup flora dan fauna.

d. Lapisan ozon menjadi rusak.

Posisi lapisan ozon berada di stratosfer pada ketinggian 20-35 km. Lapisan ozon berfungsi melindungi bumi dengan cara menyaring pancaran ultraviolet B oleh matahari. Molekul-molekul ozon (O3) terbentuk dan teruarai secara alami di stratosfer. Emisi CFC yang mencapai stratosfer yang bersifat sangat stabil mengakibatkan kecepatan molekul-molekul ozon terurai akan

lebih cepat dibandung proses terbentuknya. Hal ini menyebabka terbentuknya lubang-lubang di lapisan ozon. Lapisan ozon yang rusak berdampak terhadap fungsi lapisan ozon untuk melakukan penyaringan sinar UV-B matahari tidak optimal. Sinar UV menjadi bisa langsung ke permukaan bumi yang bisa menimbulkan kanker kulit pada manusia dan munculnya berbagai penyakit tumbuhan.

4) Pencemaran Tanah

Pengertian tanah yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 150 tahun 2000 adalah salah satu bagian lahan yang berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik yang mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan memiliki kemampuan untuk menunjang kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya."

Aktifitas dan perilaku manusia merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan tanah. Tertuang dalam PP No. 150 th. 2000 menjelaskan bahwa, "Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah".

Apabila permukaan tanah sudah tercemar oleh zat-zat yang membahayakan atau beracun, maka zat-zat tersebut bisa menguap, kemudian terbawa oleh air hujan selanjutnya mengalir ke permukaan dan tanah. Zat-zat pencemar yang sudah berada di tanah selanjutnya akan mengendap menjadi senyawa kimia yang meracuni tanah. Zat pencemar beracun tersebut bisa menimbulkan efek secara langsung terhadap manusia apabila bersentuhan dan secara tidak langsung melalui pencemaran air tanah yang dikonsumsi dan pencemaran udara yang dihirup.

Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

a. Benda-benda yang sulit untuk dekomposisi dibuang secara sembarangan ke tanah. Contohnya antara lain sampah plastik, sampah kaca, logam serta karet.

b. Pemakaian pestisida yang berlebihan pada usaha pertanian sehingga menciptakan residu/sisa dan meresap ke dalam tanah.
c. Limbah sabun dan deterjen rumah tangga yang dialirkan ke tanah.
d. Terkikisnya humus oleh aliran air.
e. Senyawa asam yang tertimbun karena terjadinya hujan asam yang menyebabkan tercemarnya ekosistem air tawar.

Beberapa daerah di Indonesia memiliki tanah yang sudah tercemar. Tercatat sekitar 70% tanah di Jakarta sudah tercemar. Akibat pencemaran limbah ini, kandungan bakteri *E coli* pada air tanah jauh di atas ambang normal, yakni 80%.

Tabel 1 menunjukkan jumlah Desa /Kelurahan berdasarkan Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup di seluruh Propinsi Indonesia.

Tabel 1
Jumlah Desa / Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup di seluruh Propinsi Indonesia tahun 2015

Provinsi	Pencemaran Air	Pencemaran Tanah	Pencemaran Udara	Tidak Ada Pencemaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	350	63	713	5.499
Sumatera Utara	449	65	2.076	3.800
Sumatera Barat	144	19	674	421
Riau	318	17	1.537	262
Jambi	384	24	379	891
Sumatera Selatan	279	44	218	2.801
Bengkulu	189	9	98	1.270
Lampung	222	17	248	2.237
Kepulauan Bangka Belitung	152	55	33	208
Kepulauan Riau	28	4	51	339
DKI Jakarta	54	2	17	200

Jawa Barat	1.131	118	833	4.327
Jawa Tengah	932	183	1.123	6.823
DI Yogyakarta	44	4	415	21
Jawa Timur	759	104	1.589	6.450
Banten	251	43	239	1.141
Bali	82	5	55	595
NT Barat	122	27	79	940
NT Timur	53	14	89	3.145
Kal. Barat	717	100	217	1.264
Kal. Tengah	523	51	167	970
Kal. Selatan	445	60	220	1.440
Kal. Timur	249	45	131	720
Kal. Utara	59	4	27	410
Sulawesi Utara	140	12	116	1.609
Sulawesi Tengah	125	21	57	1.812
Sulawesi Selatan	176	25	233	2.667
Sul. Tenggara	73	29	113	2.095
Gorontalo	72	64	41	585
Sulawesi Barat	22	6	43	585
Maluku	57	13	26	1.006
Maluku Utara	46	15	67	1.079
Papua Barat	31	8	26	1.512
Papua	108	31	48	4.717
INDONESIA	**8.786**	**1.301**	**11.998**	**63.841**

Sumber:https://www.bps.go.id/statictable/2015/02/09/1763/banyaknya-desa--kelurahan-menurut-jenis-pencemaran-lingkungan-hidup

5) Pemanasan Global

Pemanasan global *(global warming)* merupakan wujud dari tidakseimbangnya ekosistem di bumi yang disebabkan suhu rata-rata atmosfer, laut, serta daratan di bumi meningkat. Dalam kurun waktu satu abad terakhir, terjadi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi sebesar 0.74 ± 0.18 °C. Peningkatan suhu rata-rata tersebut disebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca, seperti; CO2 (karbondioksida), metana, dinitro oksida,

hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan sulfur heksafluorida di atmosfer. Pembakaran bahan bakar fosil berpa minyak bumi serta batu bara, penggundulan dan pembakaran hutan merupakan faktor utama penghasil emisi gas rumah kaca.

Berbagai negara di belahan dunia menghadapi peristiwa pemanasan global sebagai salah satu permasalahan lingkungan yang sangat penting. Pemanasan global terkait dengan peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Meningkatnya suhu permukaan bumi disebabkan pancaran sinar matahari terhadap atmosfer bumi, yang selanjutnya sebagian dari sinar ini berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar infra merah yang diserap oleh udara dan permukaan bumi. Sebagian dari sinar infra merah dipantulkan kembali ke atmosfer kemudian ditangkap oleh gas-gas rumah kaca sehingga mengakibatkan suhu bumi naik. Gas-gas rumah kaca tersebut antara lain karbon dioksida, metana dan nitrogen oksida.

Dampak terjadinya pemanasan global pada lingkungan serta berbagai aspek kehidupan manusia, antara lain :

a. Lapisan es yang berada di kutub Utara dan Selatan mencair
   Kejadian ini menyebkabkan permukaan air laut naik secara global, dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan beberapa pulau kecil akan tenggelam. Pendududuk yang berada dia area pesisir pantai berada dalam zona tidak aman dan kehidupan yang berbahaya. Bencana banjir yang disebabkan oleh tingginya air pasang. Banjir akan menimbulkan kerusakan fasilitas sosial serta ekonomi. Apabila kejadian ini tidak segera diatasasi dan banjir berkelanjutan akan berakibat pada lumpuhnya kehidupan masyarakat dan negara.
b. Kepunahan hewan dan tumbuhan
   Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mempunyai keterbatasan untuk hidup pada suhu, kelembaban, kadar air dan sumber makanan tertentu. Suhu global yang terus meningkat akan meimbulkan gangguan terhadap perputaran air, kelembaban udara. Efeknnya mengganggu pertumbuhan tanaman dan

hewan dan mengurangi kecepatan produktivitas. Kejadian jika berlanjut secara terus menerus akan menyebabkan kepunahan pada beberapa hewan dan tumbuhan.

c. Perubahan Habitat
   Perubahan suhu, kelembaban dan laju produktivitas akan menyebabkan perubahan habitat hewan. Perubahan habitat akan memaksa hewan bermigrasi untuk mendapatkan habitat baru yang sesuai.
d. Naiknya permukaan air laut, air pasang dan musim hujan yang tidak menentu meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir.
e. Pencairan es pada puncak akan mengurangi ketinggian gunung-gunung.
f. Arus laut berubah akibat tekanan udara, suhu, kecepatan dan arah angina yang berubah. Kondisi ini akan mempengaruhi perpindahan ikan, dan secara langsung akan mempengaruhi hasil tangkapan ikan.
g. Perubahan habitat kemungkinan menimbulkan resistensi kehidupan larva dan masa pertumbuhan organisme tertentu berubah. Kondisi memungkinkan munculnya resistensi organisme penyebab penyakit tropis. Berbagai macam larva yang mengalami perubahan resistensi akibat perubahan musim bisa meningkatkan penyebaran organisme ini lebih luas. Hal ini akan menimbulkan wabah penyakit baru.
h. Terumbu karang dikawasan segituga yang ada di enam negara akan mengalami kerusakan. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, Timor Leste, dan Philipina.
i. Fenomena cuaca ekstrim.
   Musim menjadi sulit diprediksi akibat perubahan iklim. Petani sulit menentukan musim tanam karena cuaca yang tidak menentu. Kondisi ini akan menimbulkan permasalahan ketahanan pangan secara nasional. Selain permasalahan ketahanan pangan, dampak yang ditimbulkan juga tidak tersedianya lapangan kerja. Hal lain dampak dari perubahan iklim yang ekstrim ini adalah terjadinya bencana alam.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat *trend* kejadian bencana alam di Indonesia selama tahun 2002 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan. Sebagian besar atau sekitar 95% merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, puting beliung, cuaca ekstrim, dan kekeringan. Tercatat tahun 2002, sebanyak 143 kejadian bencana alam di Indonesia, dan mengalami peningkatan setiap tahun. Tahun 2015, bencana alam di Indonesia tercatat sebanyak 1.681 kejadian. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) dari tahun 2002, kecenderungan kejadian bencana meningkat setiap tahunnya sampai tahun 2015.

Pada tahun 2017, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 2.175 kejadian bencana di Indonesia dari awal tahun sampai 4 Desember 2017. Bencana alam tersebut adalah banjir (737 kejadian), puting beliung (651 kejadian), tanah longsor (577 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (96 kejadian), banjir dan tanah longsor (67 kejadian), kekeringan (19 kejadian), gempa bumi (18 kejadian), gelombang pasang/abrasi (8 kejadian), serta letusan gunung api (2 kejadian).

Jumlah kejadian bencana di masing-masing propinsi Indonesia pada tahun 2017 tertera pada **Gambar 3** berikut.

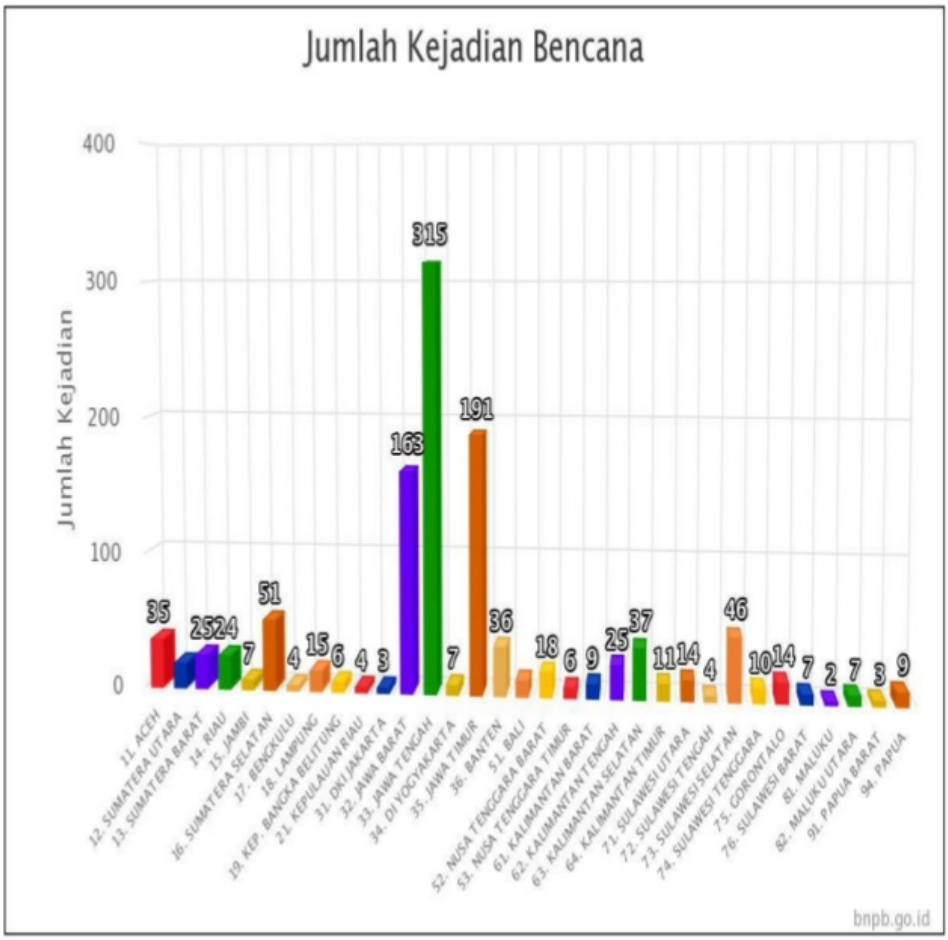

Gambar 3. Jumlah kejadian bencana di tiap provinsi di Indonesia tahun 2017
Sumber: http://dibi.bnpb.go.id/dibi/

6) Langkanya Air Bersih

Salah satu penyebab langkanya air bersih adalah perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan berubahnya pola cuaca misalnya musim yang ekstrem antara kekeringan dan banjir. Penyebab lain lanngkanya air bersih adalah akibat tercemarnya air serta meningkatnya permintaan konsumsi air akibat pertambahan penduduk yang terus meningkat.

Indonesia selalu menghadapi permasalahan ketersediaan air yang ekstrem antara musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan tinggi di musim hujan, sehingga menyebabkan daerah-

daerah memiliki air yang sangat banyak bahkan sampai mengakibatkan bencana banjir. Sebaliknya, di musim kemarau, beberapa daerah mengalami kelangkaan air dan kekeringan. Oleh karena itu, pengelolaan air dan sumber daya air terpadu yang mempertimbangkan keberlangsungan dan pemanfaatannya perlu diupayakan.

Penyebab terjadinya kondisi adalah : *Pertama*, potensi ketersediaan air di Indonesia tidak terdistribusi secara merata antarwilayah. Tahun 2014 Pulau Kalimantan merupakan wilayah dengan potensi ketersediaan air terbesar yang mencapai 33,6%, sedangkan Pulau Jawa hanya memiliki ketersediaan air sekitar 4,2% (Rencana Strategis 2015-2019 Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Kementerian PUPR). Kondisi ini membuat Pulau Jawa menjadi wilayah dengan ketersediaan air paling sedikit di antara pulau-pulau lainnya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan distribusi penduduk Indonesia yang terpusat di Pulau Jawa, yaitu sekitar 56,9% dari total penduduk Indonesia (Proyeksi Penduduk 2014). Padahal, jumlah penduduk yang besar berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan air yang juga semakin banyak.

Permasalahan *kedua* adalah kurangnya wilayah penampungan air yang mempunyai kapasitas memadai. Seperti diketahui, saat musim hujan, rata-rata curah hujan di Indonesia sangat tinggi. Dalam satu tahun, jumlah curah hujan di Indonesia dapat mencapai hampir 2.500 mm per tahun (Worldbank, 2015). Oleh karena itu, dibutuhkan ketersediaan wilayah penampungan air dengan kapasitas yang memadai. Wilayah penampungan air tersebut meliputi tampungan sumber-sumber air alami yang telah ada secara alamiah, seperti sungai dan danau, maupun buatan seperti bendungan atau waduk, dan embung. Selain wilayah tampungan air, pembangunan sistem irigasi juga menjadi hal yang penting untuk mengendalikan penyaluran volume air agar tidak menjadi bencana.

Upaya menjaga ketersediaan air tetap stabil, pemerintah Indonesia sudah membuat beberapa bangunan penampungan air serta memperbesar kapasitas penampungan air. Tahun 2014

kapasitas penampungan air di Indonesia hanya 50 m3 per kapita per tahun yang dikelola melalui tampungan bendungan. Angka ini hanya 2,5 persen dari angka ideal tampungan per kapita di suatu negara yaitu sebesar 1.975 m3 per kapita pertahun (Rencana Strategis 2015-2019 DitJen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR). Jika dibandingkan dengan negara lain, kapasitas tampungan air di Indonesia masih jauh di bawah Thailand yang mencapai 1.277 m3 per kapita per tahun.

Timbulnya berbagai permasalahan pengelolaan lingkungan diharapkan pemerintah agar memiliki paradigma yang tepat dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan sebaiknya mengutamakan keberpihakan terhadap masyarakat. Salah satu karakteristik perwujudan *good governance* adalah dengan mengajak partisipasi dan kemitraan bersama masyarakat sehingga masyarakta terllibat dalam setiap proses pembangunan. Strategi tidak akan mampu bertahan lama jika program dijalankan tanpa partisipasi masyarakat.. Peran masyarakat merupakan potensi yang menguntungkan. Pemerintah mempunyai kesempatan untuk membuktikan kredibilitas negara dengan membangun kerjasama dan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan.

Knsep pembangunan berkelanjutan telah diterapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional jangka menengah (RPJMN) tahun 2015 s/d 2019). Salah satu kebijakan mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dalam pemanfaatannya. Aspek lingkungan hidup merupakan salah satu pertimbangan yang utama untuk pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan dapat tercapai jika diperoleh data dan informasi yang benar mengenai kondisi dan permasalahan lingkungan hidup saat ini. Dengan demikian pembangunan nasional berkelanjutan dapat diwujudkan dengan benar.

B. KONDISI SOSIAL EKONOMI INDONESIA

Arti kata sosial ekonomi umumnya dikaji secara secara terpisah. Pengertian kata sosial dalam ilmu sosial merujuk pada objek itu sendiri dalam hal ini masyarakat. Departemen Sosial mengacu pada kegiatan yang bertujuan dalam pemecahan permasalahan masyarakat terkait bidang kesejahteraan sosial.

Kata sosial seperti tertulis dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat (KBBI,1996). Ilmi sosiologi menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial dimana manusia tidak akan mampu wajar jika tidak dibantu oleh manusia lain di sekelilingnya. Dengan demikian, kata sosial secara umum berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat.

Kata *ekonomi* diambil dari kata Yunani "*oikos*" yang artinya keluarga atau rumah tangga serta "*nomos*" artinya peraturan, aturan, hukum. Sehingga pengertian kata ekonomi bisa dijelaskan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa ekonomi merupakan ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan) (KBBI Edisi ke V).

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *sosial ekonomi* merupakan semua hal yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Salah satu indikator utama yang digunakaan dalam penilaian kinerja suatu perekonomian adalah laju pertumbuhan ekonomi. Indikator ini digunakan terutama untuk menganalisis hasil pembangunan ekonomi yang sudah dilakukan oleh suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi mengindikasi seberapa besar pencapaian dari pelaksanaan perekonomian sehingga berdampak positif untuk meningkatkan pendapatan atau

kesejahteraan masyarakat dalam periode tersebut. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut bertumbuh dan sehat.

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang multidimensi dan mengakibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, serta kelembagaan nasional, antara lain percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kesenjangan kesejahteraan serta memberantas kemiskinan. Tingginya pertumbuhan ekonomi yang juga berkelanjutan merupakan pencapaian kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertambahan penduduk yang selalu meningkat setiap tahun menyebabkan permintaan untuk konsumsi harian juga meningkat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penghasilan setiap rumah tangga atau individu. Pertumbuhan ekonomi jika tidak disertai peningkatan lapangan pekerjaan menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan sehingga jumlah angka kemiskinan meningkat.

Pengukuran pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat melalui peningkatan pendapatan atau pendapatan per kapita, tetapi juga harus dikaji apakah pendapatan tersebut terbagi merata kepada masyarakat serta masyarakat harus bisa dipastikan sebagai penerima manfaat dari program pembangunan tersebut. Keadaan ekonomi pada satu negara bisa diketahui melalui berbagai indikator perekonomian antara lain tingkat pengangguran, kemiskinan dan pendidikan.

a. Jumlah Pengangguran

Jumlah pengangguran bisa menggambarkan keadaan perekonomian suatu negara, apakah termasuk kategori berkembang, lambat atau justru semakin mundur atau menurun. Jumlah pengangguran juga bisa menggambarkan ketidakadilan atau ketidakmerataan pembagian penghasilan yang diperoleh masyarakat dalam suatu negara. Salah penyebab terjadinya pengangguran adalah jumlah masyarakat dalam yang usia

angkatan kerja tinggi tetapi hanya sedikit lapangan kerja yang tersedia.

Badan Pusat Statistika (BPS) melaporkan laju pertumbuhan penduduk indonesia meningkat setiap tahunnya. Tercatat tahun 1980 jumlah pendududuk Indonesia sebanyak 146.777.000 jiwa dan tahun 2017 mencapai 262.904.000 jiwa. (BPS, 1980 dan 2017). Beratmbahnya angka pengangguran merupakan salah satu dampak peningkatan populasi penduduk. Fenomena ini menggambarkan bahwa pertambahan populasi tidak disertai dengan penyediaan lapangan kerja.

Sebelum terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 1997, angka pengangguran di Indonesia tercatat hanya 4,68%. Angka pengangguran 4,68% tergolong angka pengangguran yang masih berada dalam kondisi wajar dan rendah. Di beberapa negara yang sudah maju, umumnya angka pengangguran berada di sekita antara 2 – 3%. Kondisi pengangguran pada angka tersebut dikategorikan sebagai angka pengangguran alamiah. Angka pengangguran alamiah merupakan jumlah pengangguran alamiah yang mustahil bisa dihilangkan. Dengan kata lain, bila angka pengangguran sebesar 2 – 3% menggambarkan bahwa keadaan perekonomian menggunakan seluruh tenaga kerja (*full employment)* (Sadono Sukirno, 2008).

Jumlah angkatan kerja bulan Februari 2018 sebesar 133,94 juta orang dan penduduk yang benar-benar memiliki pekerjaan sebanyak 127 juta orang. Selama kurun waktu satu tahun (Februari 2017 s/d Februari 2018) jumlah pengangguran mengalami penurunan 140.000 orang.

Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan dalam sektor akomodasi serta restoran sebesar 0,68%, sektor jasa yang lain sebesar 0,4%, serta industri pengolahan 0,39%. Jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan yang menurun yaitu sektor pertanian 1,41%, konstruksi 0,2% serta bidang pendidikan 0,16%. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, dalam satu tahun sejak awal tahun 2017 sampai awal tahun 2018, pengangguran berkurang sebanyak 140.000 orang.

Gambar 4. Antrian pelamar kerja di salah satu perusahaan di Batam tahun 2017
Sumber: Wartakepri.co.id

b. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, perumahan, sekolah, serta kesehatan. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi berpotensi menimbulkan peningkatan kasus kejahatan dan kriminal. Ketidaktersediaan pangan, sandang dan perumahan bisa menyebabkan indvidu untuk melakukan tindakan apapun agar tetap hidup, seperti melakukan perampokan, penodongan dan pencurian.

Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret tahun 2017 mencapai 27,7 juta orang atau sekitar 10,64% dari seluruh warga negara Indonesia. Masyarakat dikaterogikan miskin karena memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar masyarakat dengan kondisi dibawah di garis kemiskinan berada di wilayah pedesaan dan pertanian. Wilayah pedesaan merupakan wilayah dimana hampir setengah dari penduduk Indonesia bermukim.

Ukuran kemiskinan masyarakat tidak hanya digambarkan oleh besarnya pendapatan dan pengeluaran. Ukuran kemiskinan juga

dapat dilihat dari berbagai hal. Contohnya, ketersediaan air bersih hanya mampu diakses oleh kurang dari setengah masyarakat miskin di pedesaan. Sekitar 75% saja penduduk Indonesia yang menikmati sarana listrik, serta 55% saja anak masyarakat miskin lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP).

World Bank mencatat sebanyak 40% penduduk Indonesia mempunyai kerentanan yang cukup tinggi terhadap kemiskinan. Tetapi jarak kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia masih lebih rendah dibanding beberapa negara berkembang yang lain.

Gambar 5. Potret kemiskinan masyarakat perkotaan
Sumber. Kompas.com

Tabel 2
Garis Kemiskinan Menurut Provinsi Tahun 2016-2017

Provinsi	Perkotaan		Pedesaan	
	2016	2017	2016	2017
ACEH	445488	479872	415826	442869
SUMATERA UTARA	413835	438894	388707	407157
SUMATERA BARAT	454674	475365	425520	441415
RIAU	439542	474626	433960	457368
JAMBI	448615	465233	349735	366036
SUMATERA SELATAN	400159	417828	339874	356020
BENGKULU	458435	490475	427315	449857
LAMPUNG	398378	427072	357792	377049
KEP.BANGKA BELITUNG	553681	595031	573582	623111
KEP. RIAU	505980	540062	481687	507795
DKI JAKARTA	520690	578247	-	-
JAWA BARAT	332145	354866	331237	353103
JAWA TENGAH	322799	339692	322489	337657
DI YOGYAKARTA	370510	413631	337230	352861
JAWA TIMUR	329241	372585	328846	347997
BANTEN	382903	421137	351708	373039
BALI	357427	371118	328033	350826
NUSA TENGGARA BARAT	346581	363697	328775	343387
NUSA TENGGARA TIMUR	389661	409382	310296	329136
KALIMANTAN BARAT	366477	401588	360940	394313
KALIMANTAN TENGAH	357224	378311	392543	418861
KALIMANTAN SELATAN	399162	434791	380647	407382
KALIMANTAN TIMUR	535137	564801	510041	554497
KALIMANTAN UTARA	539499	595802	518305	554548
SULAWESI UTARA	314004	331931	322366	340146
SULAWESI TENGAH	399413	430728	376658	400639
SULAWESI SELATAN	286669	303834	267428	287788

SULAWESI TENGGARA	294286	308624	276978	295496
GORONTALO	287156	312931	285999	304353
SULAWESI BARAT	280117	318376	295739	315137
MALUKU	424788	461552	423698	443565
MALUKU UTARA	405368	413797	379454	390914
PAPUA BARAT	508262	523381	480945	499086
PAPUA	479294	508403	425264	446994
INDONESIA	372114	400995	350420	370910

Sumber: BPS.go.id, diolah

c. Pendidikan

Angka putus sekolah (APS) dilaporkan masih cukup tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Angka Putus Sekolah merupakan jumlah murid (dalam satuan persen) yang tidak meneruskan sekolah sampai lulus di tingkat pendidikan tertentu. (Nugroho, R. 2006). Angka Putus Sekolah (APS) di Indonesia diharapkan pada angka ideal yaitu nol persen atau tudak ada siswa yang meninggalkan sekolah sebelum lulus. Salah satu indikator kinerja yang dianalisis berdasarkan keputusan Kemendiknas No. 129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan adalah jumlah APS per tahun. Kemendiknas No. 129 a/U/2004 menegaskan pada jenjang pendidikan dasar, APS tidak diperkenankan lebih dari 1% dari jumlah murid yang sedang aktif sekolah.

Semakin tinggi angka putus sekolah dapat mengindikasikan buruknya akses pendidikan. Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012 dilaporkan APS 7-12 tahun sebesar 2,03%, artinya bahwa dari 100 warga negara yang berumur 7 s/d 12 tahun yang sedang atau pernah sekolah rata-rata berkisar 2 orang yang putus sekolah.

Berbagai opini mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan pelajar putus sekolah. Faktor-faktor yang menyebabkan siswa putus sekolah ini antara lain: ketidakmampuan orangtua untuk membiayai dan membayar

keperluan sekolah, siswa menderita penyakit yang tidak tahu secara pasti waktu kesembuhannya, siswa bekerja pada jam belajar untuk membantu perekonomian keluarga serta yang terakhir disebakan kasus Drop Out atau siswa dikeluarkan karena suatu hal misal pelanggaran disiplin . (Imron, 2004) Di kota Yogyakarta, misalnya, hasil penelitian Fitriana Nur Itsnaini (2015) APS 7-12 di SD negeri sebanyak 6% sedangkan di Sekolah Dasar swasta tidak ada murid yang putus sekolah.

C. KONDISI SOSIAL BUDAYA INDONESIA

Kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Kata kebudayaan dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan istilah *culture*. Dalam bahasa Belanda di sebut *cultuur*. Kedua bahasa ini diambil dari bahasa Latin *colore* yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah. Dengan demikian *culture* atau *cultuur* diartikan sebagai segala kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam.

Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki berbagai macam masyarakat yang mempunyai ciri khas serta kebudaya an yang berbeda. Oleh karena itu, Indonesia adalah bangsa yang memilki berbagai macam jenis kehidupan sosial dan budaya. Interaksi antar manusia dengan lingkungan eksternalnya merupakan faktor pembentuk aspek sosial dan budaya. Kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan juga berpengaruh mempengaruhi tipe dan cara hidup masyarakat. Letak geografis juga memberi dampak terhadap keragaman sosial budaya masyarakat karena :

- Terdapat ribuan pulau di Indonesia
- Posisi strategis yang jalur lintas internasional sehingga budaya asing mudah masuk ke Indonesia

- Potensi sumber daya alam serta laju pembangunan berbeda di setiap wilayah.
- Daerah-daerah di Indonesia umumnya mempunyai sejarah yang berbeda.

Keragaman adat-istiadat dengan kekhasan masing-masing timbul akibat penyesuaian masyarakat terhadap kondisi wilayah masing-masing.

Posisi negara Indonesia yang berada pada jalur silang menyebabkan pengaruh budaya yang dibawa para pedagang luar negeri atau dari masyarakat Indonesia dari daerah lain menjadi mudah untuk masuk. Ada dua perpindahan yang berasal dua ras berbeda yang dahulu memasuki negara Indonesia yaitu bangsa Proto Melayu dan bangsa Deutro Melayu. Bangsa Proto Melayu memasuki Indonesia pada tahun 2000 SM. Kebudayaan yang dibawa adalah kebudayan Neolithikum. Bangsa Deutro Melayu membawa kebudayaan logam (perunggu).

Dampak masuknya bangsa Proto Melayu dan Deutro Melayu adalah terbentuknya tiga suku bangsa induk di Indonesia:

- Bangsa Melanesia atau Papua Melanesoid.
- Bangsa Melayu Tua atau Proto Melayu.
- Bangsa Melayu Muda atau Deutro Melayu.

Keanekaragaman sosial budaya di Indonesia menyebabkan beberapa hal, antara lain :

a) Sistem pemerintahan demokratis terbentuk di Indonesia. Sistem ini paling sesuai untuk negara yang memiliki sosial

budaya yang beragam atau majemuk. Pemerintahan demokratis bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan warga negara dari seluruh lapisan agar mendapat kesamaan hak dan kewajiban.

b) Pembangunan berjalan lambat di beberapa daerah arena akses transportasi dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan pembangunan kurang merata di semua daerah.
c) Upaya untuk menyelaraskan kebudayaan daerah dengan kebudayaan nasional menjadi sulit. Ha ini disebabkan banyak nilai-nilai budaya yang harus diperhatikan sebelum dilaksanakan penyeragaman.

Kondisi sosial dan budaya Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu suku bangsa, penduduk, bahasa, agama, pendidikan serta seni dan budaya.

1) Suku Bangsa

Suku bangsa merupakan sekelompok individu yang terikat oleh kesadaran serta jati diri mereka akan kesatuan dari kebudayaan mereka yang tidak ditentukan oleh orang yang berada di luar sistem kebudayaan mereka.

Masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam suku bangsa. Sejarah mencatat bahwa lebih dari separuh suku bangsa yang ada di Indonesia berasal dari keturunan rumpun bangsa *Mongoloid*. Rumpun bangsa Mongoloid biasanya berada di daerah Indonesia bagian Barat. Penduduk yang berada di daerah Indonesia bagian Timur, umumnya berasal dari keturunan *Melanesia* serta *Negroid*.

Corak dan tata cara hidup masyarakat yang bervariasi di setiap daerah Indonesia disebabkan luas wilayah dan keadaan alam berbeda. Perilaku penduduk sangat dipengaruhi oleh keadaan geografis dan lingkungan sekitarnya. Terdapat ratusabn suku bangsa di Indonesia dan mencapai ribuan apabila didata berdasarkan sub suku.

Tercatat sebanyak 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia pada tahun. Angka ini diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan *Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)*. Data yang digunakan untuk mengelompokkan suku bangsa tersebut adalah dengan merujuk pada berbagai dokumen sumber serta informasi narasumber serta masyarakat dari seluruh daerah di Indonesia.

Kajian BPS bekerjasama dengan ISEAS selain menghasilkan pengelompokkan suku, tetapi menghasilkan juga kajian suku di Indonesia yang dipublikasikan dalam buku "*Demography of Indonesia's Ethnicity*.

Hasil Sensus Penduduk tahun 2010, diperoleh data bahwa jumlah penduduk dari berbagai suku sangat bervariasi. Suku paling banyak adalah suku Jawa sebesar 40,2% dari total penduduk Indonesia. Umumnya masyarakat suku Jawa bermukin di pulau Jawa, tetapi dilaporkan banyak penduduk suku jawa juga ditemukan di berbagai daerah bahkan keluar negeri seperti Malaysia dan Suriname. Hal ini disebabkan program transmigrasi yang dilakukan pemerintah untuk pemerataan penduduk. Suku Sunda merupakan urutan kedua terbanyak yaitu 15,50% dari total penduduk Indonesia.

Keanekaragaman suku bangsa tersebut melahirkan keanekaragaman budaya. Berbagai peninggalan budaya yang terkenal antara lain, berbagai bentuk candi, pakaian tradisional, tarian, wayang, kesusastraan, upacara adat, dan berbagai seni pertunjukan lainnya.

Proporsi populasi jumlah suku bangsa di Indonesia_menurut sensus 2010 sebagai berikut:

Tabel 3

Proporsi Populasi Jumlah Suku Bangsa di Indonesia Menurut Sensus 2010

Suku Bangsa	Populasi (juta)	Jumlah (%)	Kawasan utama

Suku Jawa	95,2	40,2	Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung
Suku Sunda	36,7	15,5	Jawa Barat
Suku Batak	8,5	3,58	Sumatera Utara
Suku Madura	7,2	3,03	Pulau Madura
Suku Betawi	6,8	2,88	Jakarta
Minangkabau	6,5	2,73	Sumatera Barat, Riau
Suku Bugis	6,3	2,69	Sulawesi Selatan
Suku Melayu	5,3	2,27	Sumatera dan Kalimantan; terutama di Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Timur Riau, Kepulauan Riau, Bangka-Belitung, dan Kalimantan Barat.
Suku Arab	5,0	2,10	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sumatera
Suku Banten	4,6	1,97	Banten
Suku Banjar	4,1	1,74	Kalimantan Selatan
Suku Bali	3,9	1,67	Pulau Bali
Suku Sasak	3,1	1,34	Pulau Lombok, Pulau Sumbawa
Suku Dayak	3,0	1,27	Pulau Kalimantan
Suku Tionghoa	2,8	1,20	Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi
Suku Makassar	2,7	1,13	Sulawesi Selatan
Suku Cirebon	1,9	0,79	Jawa Barat

Sumber: BPS.go.id

2) Penduduk

Indonesia merupakan satu dari negara-negara berpenduduk paling banyak di dunia. Pada tahun 2015 penduduk Indonesia berjumlah 250 juta jiwa. Indonesia berada pada posisi keempat penduduk terbanyak di dunia, posisi ketiga penduduk terbanyak di Asia dan negara dengan jumlah penduduk paling banyak di kawasan Asia Tenggara.

Jumlah penduduk sebanyak 250 juta jiwa tersebut bermukim di seluruh Indonesia tetapi penyebarannya tidak merata. Sebanyak

60% masyarakat bertempat tinggal di Pulau Jawa. Kondisi penduduk yang tidak merata mengakibatkan tidak seimbangnya ketersediaan daya dukung daerah antara Pulau Jawa dengan daerah luar Pulau Jawa. Keadaan ini menimbulkan permasalahan pemerataan pembangunan yang tidak merata juga. Berdasarkan area pemukimannya, penduduk Indonesia dikelompokkan dalam dua area yaitu penduduk pedesaan dan penduduk perkotaan. Mereka mempunyai ciri khas dan kepribadian masing-masing yang membedakan satu sama lain. Masyarakat desa dianggap sebagai orang-orang yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat, kebiasaan para leluhur serta sangat terkenal dengan keramahtamahannya.

Masyarakat pedesaan sering berinteraksi langsung dengan lingkungan alam yang masih asli sehingga hal ini menjadi penyebab hampir seluruh lapisan masyarakat bekerja dengan bertani, berkebun, ataupun bisnis perikanan. Selain itu, mereka juga dikenal sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Antara desa yang satu dengan desa lainnya mempunyai karakteristik aspek budaya dan adat istiadat yang berbeda.

Kehidupan di kota adalah kehidupan yang heterogen dan kompleks. Masyarakat perkotaan terbentuk dari berbagai contoh kondisi sosial masyarakat di suatu wilayah dari aspek langsung maupun tak kangsung dengan memusatkan penduduk yang sangat banyak dan padat sehinggan akan mudah mendapatkan dampak masalah sosial karena sering dibumbui dengan kehidupan matrealistis.

3) Bahasa

Bahasa daerah yang dimiliki Indonesia saat ini umumya termasuk dalam rumpun bahasa *Austronesia*. Namun demikian di daerah Papua, sebagian besar sukunya termasuk dalam rumpun bahasa Papua atau Melanesia.

Bahasa Indonesia merupakan Bahasa resmi negara Indonesia, yang dapat digunakan untuk berkomunikasi antar suku. Rumpun bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Rumpun bahasa melayu

banyak ditemukan di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Selain Indonesia, negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang diketahui menggunakan rumpun Bahasa melayu adalah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam. Sebanyak 652 dari total 2.452 bahasa daerah yang diteliti sudah diidentifikasi dan divalidasi oleh Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayan.dari tahun 1991 s/d 2017. Identifikasi tidak dilakukan pada tingkat dialek dan subdialek.

Bahasa daerah yang paling banyak ditemukan adalah bahasa Jawa. Penutur Bahasa jawa ada sebanyak 80 juta lebih dengan berbagai dialek yang berbeda setiap daerah. Penutur bahasa Jawa umumnya berada di Jawa Tengah, Yogyakarta serta Jawa Timur. Bahasa daerah lain yang cukup berkembang adalah bahasa Sunda di Jawa Barat. Di wilayah Sumatra ditemukan beberapa dialek yaitu dialek Aceh, Batak, dan Minangkabau. Di Kalimantan berkembang bahasa Melayu dengan dialek Iban, Kahayan, dan berbagai dialek daerah lainnya. Di Bali dan Nusa Tenggara berkembang bahasa dan dialek Bali, Sasak, dan Sumbawa. Di Sulawesi dan Minahasa berkembang bahasa dan dialek Toraja, Bugis, dan Makassar. Di Papua berkembang bahasa dan dialek Papua.

Selain perkembangan bahasa dan dialek daerah tersebut, terdapat juga aksara-aksara lama selaku aksara daerah yang digunakan dalam penulisan hasil-hasil kesusastraan masa lampau. Bentuk-bentuk aksara tersebut, di antaranya aksara Jawa, aksara Bali, aksara Batak, dan aksara Bugis.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan hasil penelitian tahun 2016 yang menunjukkan 139 bahasa daerah hampir punah dan 15 bahasa daerah statusnya dinyatakan sudah punah. Alasan utama kepunahan tersebut, adalah tidak ada lagi orang yang menggunakannya dalam percakapan. Ancaman kepunahan bahasa-bahasa daerah ini memerlukan penanganan yang serius, karena

apabila bahasa daerah sudah peradaban manusia yang menggunakannya pun ikut punah.

Urbanisasi dan perkawinan antaretnis juga bisa menjadi penyebab punahnya bahasa daerah karena orang tua tak lagi mengajarkan bahasa dari daerah asalnya kepada sang anak. Mereka sendiri juga tak lagi menggunakannya secara aktif karena tinggal di daerah yang berbeda.

Beberapa hal yang mendorong proses kepunahan Bahasa daerah antara lain adanya kebijakan untuk menggunakan satu bahasa di sekolah, dominasi satu Bahasa di daerah multibahasa yang berdekatan.

4) Agama

Negara mengakui enam agama resmi di Indonesia. Agama-agam tersebut adalah adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Islam merupakan agama dengan penganut paling banyak yaitu lebih dari 80%.

Kehidpan masyarakat menjalankan kepercayaan di Indonesia bervariasi. Beberapa daerah ditemukan masyarakat melaksanakan kepercayaan dipengaruhi oleh adat, kebiasaan, dan kepercayaan yang diwariskan oleh leluhur. Sebagai contoh, di beberapa daerah ditemukan ritual petani membuat sesaji sebelum menanam bibit di sawah. Para nelayan mempersembahkan sesaji untuk "dewa laut" sebelum mencari ikan.

5) Pendidikan

Keberhasilan pendidikan dapat digunakan sebagai gambaran kualitas warga suatu negara. Sebagai upaya untuk mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan, pemerintah mencanangkan wajib belajar 6 (enam) tahun. Program ini kemudian ditingkatkan menjadi program pendidikan dasar hingga 9 (Sembilan) tahun. Program pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun yang dimaksud adalah pendidikan Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun.

6) Seni dan Budaya

Kesenian di berbagai daerah berupa tari-tarian tradisional merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia.

Daerah dan suku bangsa di Indonesia hampir seluruhnya memiliki Tarian Tradisionalnya masing-masing seperti Tari Piring yang berasal dari Sumatera Barat, Tari Tandak dari daerah Riau, Tari Bedaya yang berasal dari Yogyakarta, Tari Seudati dari Aceh dan masih banyak lagi.

Kita sebagai warga negara Indonesia wajib melestarikan dan menjaga kebudayaan tersebut agar dapat diwariskan ke generasi-generasi berikutnya.. Tari-tarian tradisional tersebut pada awalnya diciptakan untuk kepentingan-kepentingan adat seperti upacara kerajaan dan ritual-ritual keagamaan. Namun saat ini sudah berkembang menjadi sarana hiburan dan juga sebagai sarana pendidikan.

Tabel berikut menyajikan daftar tari-tarian tradisional di Indonesia dan daerah asalnya.

Tabel 4

Nama tari-tarian tradisional di Indonesia beserta daerah asalnya.

No.	Nama Tarian	Daerah Asal
1	Tari Seudati	Aceh Darussalam
2	Tari Saman Meuseukat	Aceh Darussalam
3	Tari Pukat	Aceh Darussalam
4	Tari Legong	Bali
5	Tari Kecak	Bali
6	Tari Arje	Bali
7	Tari Andun	Bengkulu

8	Tari Bidadari Teminang Anak	Bengkulu
9	Tari Topeng	DKI Jakarta
10	Tari Yapong	DKI Jakarta
11	Tari Sembah	DKI Jakarta
12	Tari Sekapur Sirih	Jambi
13	Tari Selampit Delapan	Jambi
14	Tari Rangguk	Jambi
15	Tari Topeng Kuncaran	Jawa Barat
16	Tari Merak	Jawa Barat
17	Tari Jaipong	Jawa Barat
18	Tari Serimpi	Jawa Tengah
19	Tari Bambangan Cakil	Jawa Tengah
20	Tari Kendalen	Jawa Tengah
21	Tari Remong	Jawa Timur
22	Tari Ponorogo	Jawa Timur
23	Tari Jejer	Jawa Timur
24	Tari Momong	Kalimantan Barat
25	Tari Zapin Tembung	Kalimantan Barat
26	Tari Tandak Sambas	Kalimantan Barat
27	Tari Baksa Kembang	Kalimantan Selatan
28	Tari Radab Rahayu	Kalimantan Selatan
29	Tari Kuda Gepang	Kalimantan Selatan
30	Tari Tambun dan Bungai	Kalimantan Tengah
31	Tari Balean Dadas	Kalimantan Tengah

32	Tari Gong	Kalimantan Timur
33	Tari Perang	Kalimantan Timur
34	Tari Hudog dan Belian	Kalimantan Timur
35	Tari Jangget	Lampung
36	Tari Bedana	Lampung
37	Tari Malinting	Lampung
38	Tari Lenso	Maluku
39	Tari Cakalele	Maluku
40	Tari Perang	Maluku Utara
41	Tari Nabar Ilaa	Maluku Utara
42	Tari MpaaLenggo	Nusa Tenggara Barat
43	Tari Batunganga	Nusa Tenggara Barat
44	Tari Mpaa Sampari	Nusa Tenggara Barat
45	Tari Perang	Nusa Tenggara Timur
46	Tari Gareng Lameng	Nusa Tenggara Timur
47	Tari Meminang	Nusa Tenggara Timur
48	Tari Suanggi	Papua Barat dan Tengah
49	Tari Perang	Papua Barat dan Tengah
50	Tari Selamat Datang	Papua Timur
51	Tari Musyoh	Papua Timur
52	Tari Tandak Riau	Riau
53	Tari Joged Lambak	Riau
54	Tari Kipas	Sulawesi Selatan

55	Tari Bosara	Sulawesi Selatan
56	Tari Lumense	Sulawesi Tengah
57	Tari Peule Cinde	Sulawesi Tengah
58	Tari Pamonte	Sulawesi Tengah
59	Tari Balumpa	Sulawesi Tenggara
60	Tari Dinggu	Sulawesi Tenggara
61	Tari Malulo	Sulawesi Tenggara
62	Tari Maengkat	Sulawesi Utara
63	Tari Polopalo	Sulawesi Utara
64	Tari Piring	Sumatera Barat
65	Tari Payung	Sumatera Barat
66	Tari Tabuik	Sumatera Barat
67	Tari Tanggal	Sumatera Selatan
68	Tari Putri Bekhusek	Sumatera Selatan
69	Tari Serampang Dua Belas	Sumatera Utara
70	Tari Tor Tor	Sumatera Utara
71	Tari Manduda	Sumatera Utara
72	Tari Baluse	Sumatera Utara
73	Tari Serimpi Sangupati	D.I. Yogyakarta
74	Tari Bedaya	D.I. Yogyakarta
75	Tari Merak	D.I. Yogyakarta
76	Tari Lawung Ageng	D.I. Yogyakarta

Sumber : Statistika Kebudayaan 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Keberagaman Indonesia adalah anugerah yang bisa digunakan agar tujuan dan cita-cita negara tercapai. Sejarah membuktikan bahwa masyarakat Indonesia yang beraneka ragam mampu hidup secara berdampingan dan saling mengisi sebagaimana yang terkandung dalam makna "Bhineka Tunggal Ika".

BAB IV
POTENSI DAERAH

A. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif. Dalam upaya mencapai keberlangsungan hidupnya, manusia sanggup untuk mengelola dirinya sendiri dan semua potensi sumber daya alam yang ada di bumi. Kualitas masyarakat merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Banyaknya populasi penduduk Indonesia berpotensi menghambat pembangunan jika tidak mempunyai kualitas yang memadai. Pemerintah perlu menetapkan program untuk investasi sumber daya manusia. Investasi sumber daya manusia merupakan biaya yang dikeluarkan berupa uang, waktu, atau kesempatan agar masyarakat memiliki kualitas yang lebih baik di masa mendatang.

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan suatu negara, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Secara umum tingkat pendidikan dan kesehatan dapat mewakili kualitas tenaga kerja. Kualitas sumber daya manusia ini menyangkut dua aspek yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek nonfisik (kualitas nonfisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berfikir dan berketerampilan.

Secara umum, permasalahan pengelolaan sumber daya manusia yang ada di Indonesia digambarkan pada Tabel 5.

Tabel 5
Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Indonesia

Tema	Deskripsi Singkat	Permasalahan
Jumlah dan sebaran tenaga kerja Indonesia	Saat ini sebaran tenaga kerja di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa	Kegiatan ekonomi dan pembangunan tidak merata dan terpusat di Pulau Jawa
Komposisi tenaga kerja berdasarkan usia	Saat ini 25% tenaga kerja berumur 25 tahun ke bawah, 60% tenaga kerja berumur 25-40 tahun, dan 15% berumur 40 tahun ke atas.	Masih banyaknya anak Indonesia yang putus sekolah sehingga terpaksa bekerja
Komposisi tenaga kerja berdasarkan pendidikan	Saat ini kualitas tenaga kerja sangat rendah karena kualitas pendidikan yang rendah pula	Tingkat pendidikan penduduk yang rendah belum memadai dengan jenis pekerjaan yang tersedia.
Komposisi tenaga kerja berdasarkan mata pencaharian	Saat ini tenaga kerja Indonesia sebagian berada pada sektor primer seperti pertanian dan perkebunan	Tingkat pendidikan penduduk yang rendah belum memadai dengan jenis pekerjaan yang tersedia.

Sumber : Depnakertrans 2015, diolah

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan Data Kependudukan Dunia (*World Population Data Sheet*, 2015), jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk mencapai 249 juta jiwa.

Tabel 6
Daftar negara dengan jumlah penduduk terbanyak

No.	Nama Negara	Jumlah Penduduk (juta)
1.	China	1.357
2.	India	1.277
3.	Amerika Serikat	316
4.	Indonesia	255
5.	Brazil	196
6.	Pakistan	191
7.	Nigeria	174
8.	Bangladesh	157
9.	Rusia	143
10.	Jepang	127

Sumber : Kompas.com

Tenaga kerja *(manpower)* yaitu seseorang yang sedang dan sanggup melaksanakan pekerjaan untuk memproduksi barang maupun jasa dan bertujuan memenuhi keperluan kehidupan sendiri atau keluarga. Angkatan kerja *(labor force)* adalah masyarakat usia 15-64 tahun yang sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan pengangguran. Masyarakat usia kerja ada dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah orang yang bekerja, mencari pekerjaan dan menganggur. Sedangkan penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja adalah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga.

Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2013, Indonesia memiliki penduduk berusia 15 tahun ke atas sebesar 176.662.097 orang. Jumlah angkatan kerjanya mencapai 118.192.778 orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 66,9%. Ini berarti pada tahun 2013, sebanyak 66,9% penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif untuk menghasilkan barang dan jasa.

19

Tabel 7

Jenis Lapangan Pekerjaan Utama Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2015

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah Tenaga Kerja	Persentase
1.	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	38,068,254	34.36
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,420,767	1.28
3.	Industri	14,883,817	13.43
4.	Listrik, Gas dan Air	250,945	0.23
5.	Konstruksi	6,276,723	5.66
6.	Perdagangan, Rumah Makan, danJasa Akomodasi	23,737,236	21.42
7.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	5,040,849	4.55
8.	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2,912,418	2.63
9.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	18,213,032	16.44
10.	Lainnya	-	0,00
Jumlah		**110,804,041**	**100**

Sumber: Depnakertrans, 2016

Bagian terbesar dari tenaga kerja Indonesia masih bekerja pada sektor primer seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan yang mencapai 38.068.254 orang atau 34,36% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Jika ditambah dengan sektor pertambangan dan penggalian, jumlahnya menjadi 39.489.021 atau 35,64%. Bagian terbesar berikutnya adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi. Artinya, sektor primer masih menjadi pilihan pekerjaan dari tenaga kerja di Indonesia.

Beberapa negara di dunia mempunyai jam kerja yang sangat panjang. Organisasi Negara-Negara untuk Pembangunan Ekonomi *(Organization for Economic Cooperation and Development/OECD*) mencatat jam kerja dalam setahun yang sangat panjang di beberapa negara antara lain: Meksiko (2.317 jam), Chile (2.102 jam), Korea Selatan (2.092 jam), Estonia (2.021 jam), Rusia (2.002 jam), Polandia (1.893 jam), Amerika Serikat (1.798 jam), Hungaria (1.797 jam), Jepang (1.765 jam), Republik Slovakia (1.749 jam).

Negara Indonesia sendiri memiliki jam kerja 40 jam/minggu sesuai dengan undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perhitungan jam kerja setahun di Indonesia sangat dipengaruhi jumlah hari libur nasional yang ditetapkan pemerintah.

Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia

United Nation Development Programme (UNDP) telah mengembangkan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) untuk menilai Kualitas sumber daya manusia di suatu negara.

IPM menggambarkan kondisi masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan serta mempunyai penghasilan yang cukup, mendapatkan pelayanan kesehatan, akses pendidikan dan beberapa

indikator lainnya. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa kinerja pembangunan dapat dinilai dari indeks pembangunan manusia. IPM diukur dari tiga hal dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

Manfaat IPM adalah :

1) IPM sebagai indikator mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat suatu negara
2) IPM bisa menetapkan level pembangunan suatu wilayah maupun negara.
3) IPM di Indonesia adalah data strategis, karena sebagai ukuran kinerja Pemerintah dan salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Human Development Report (HDR) mengelompokkan negara di dunia menjadi empat kelompok. yaitu kelompok negara berperingkat sangat tinggi *(very high human development)* antara 1-47, tinggi (*high development human development)* antara 48-94, sedang *(medium human development)* antara 94-141, dan rendah *(low human development)* antara 142-187.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 2014, pada tahun 2013, Indonesia berada pada peringkat 108 atau termasuk dalam kelompok sedang. Peringkat ini masih sama dengan peringkat pada tahun 2012. Peringkat tersebut didasarkan atas beberapa komponen penilaian, yaitu Usia harapan hidup penduduk Indonesia mencapai 70,8 tahun, rata-rata lama sekolah mencapai 7,5 tahun, rata-rata lama sekolah yang diharapkan 12,7 tahun, Pendapatan Nasional Kasar (PNK) mencapai 8.970 dolar AS.

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 70,81. Bayi yang lahir pada tahun 2017 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,06 tahun, lebih lama 0,16 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2017 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,85 tahun (Diploma I), lebih lama 0,13 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,10 tahun (kelas IX), lebih lama 0,15 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 10,66 juta rupiah per tahun, meningkat 244 ribu rupiah dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya.

Capaian pembangunan manusia pada tingkat regional cukup bervariasi. IPM tertinggi di Indonesia dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 79,60, sedangkan capaian terendah adalah Provinsi Papua dengan IPM sebesar 58,05. Empat provinsi tercatat telah memasuki status pembangunan manusia "tinggi" pada tahun 2016, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Banten. Dengan demikian, terdapat dua belas provinsi yang telah menyandang status pembangunan manusia "tinggi". Sementara itu, sebagian besar provinsi di Indonesia masih berstatus "sedang" dan hanya tersisa satu provinsi yang masih berada pada level "rendah", yaitu Provinsi Papua.

Pada tingkat kabupaten/kota, capaian tertinggi berada di Kota Yogyakarta dengan IPM sebesar 85,32 sementara capaian terendah berada di Kabupaten Nduga dengan IPM hanya sebesar 26,56. Berbeda dengan status pembangunan manusia di tingkat provinsi, terdapat kabupaten/kota yang sudah berada pada kategori pembangunan manusia "sangat tinggi" pada tahun 2016. Tercatat sebanyak 19 kabupaten/kota telah mencapai status "sangat tinggi". Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumya yang hanya 12 kabupaten/kota saja. Sebagian besar dari kabupaten/kota yang

berstatus "sangat tinggi" pada umumnya berada di Pulau Jawa. Selain kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia berkategori "sangat tinggi", terdapat 28,21 persen kabupaten/kota yang sudah mencapai kategori "tinggi" dan 60,70 persen kabupaten/kota sudah berada pada status "sedang". Namun, masih ditemukan 7,39 persen kabupaten/kota yang bertahan pada kategori "rendah".

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia juga dikuatkan *World Economic Forum (WEF)* melalui laporan *Global Human Capital Report 2017,* yang mengkaji kualitas SDM di 130 negara berdasarkan sejumlah indikator yang dipakai, Indonesia berada di urutan ke-65, naik tujuh peringkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Namun, secara rata-rata kualitas SDM kita masih berada di bawah negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (11), Malaysia (33), Thailand (40), dan Filipina (50). Laporan itu memotret seberapa berkualitas SDM di tiap-tiap golongan umur lewat empat elemen indikator human capital, yakni *capacity* (kemampuan pekerja berdasarkan melek huruf dan edukasi), *deployment* (tingkat partisipasi pekerja dan tingkat pengangguran), *development* (tingkat dan partisipasi pendidikan), dan *know-how* (tingkat pengetahuan dan kemampuan pekerja serta ketersediaan sumber daya) di tiap negara.

Menurut Mulyadi (2003), kebijaksanaan dalam peningkatan kualitas hidup antara lain meliputi :

a. Pembangunan pendidikan akan pemperhatikan arah pembangunan ekonomi di masa yang akan datang.
b. Pembangunan kesehatan mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan pelayanan kesehatan terutama pada penduduk terpencil.
c. Untuk penduduk miskin, peningkatan kualitas dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis, menumbuhkan sikap produktif serta mendorong semangat keswadayaan dan kemandirian untuk bersama melepas diri dari kemiskinan.

d. Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan keluarga berencana, serta meningkatkan keseimbangan kepadatan dan penyebaran penduduk antara lain melalui transmigrasi dan industri di pedesaan.

Selain itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, maka koordinasi antarlembaga pemerintah, maupun antarlembaga yang ada di masyarakat dalam pengembangan SDM perlu lebih dikembangkan. Masyarakat, termasuk dunia usaha (swasta), koperasi dan organisasi kemasyarakatan lainya didorong untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai upaya peningkatan kualitas SDM.

Bonus Demografi Indonesia

Bonus Demografi merupakan kondisi suatu wilayah atau negara memiliki jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan usia non-produktif (usia 65+). Dikatakan sebagai "bonus" karena kondisi ini tidak terjadi secara terus menerus melainkan hanya terjadi sekali dan tidak bertahan lama.

Bonus demografi adalah peluang *(window of opportunity)* yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Di Indonesia fenomena ini terjadi karena proses transisi demografi yang berkembang sejak beberapa tahun lalu dipercepat oleh keberhasilan kebijakan kependudukan menurunkan tingkat fertilitas, meningkatkan kualitas kesehatan dan suksesnya program pembangunan sejak era Orde Baru hingga sekarang.

Keberhasilan program (KB) selama berpuluh tahun sebelumnya telah mampu menggeser penduduk berusia di bawah 15 tahun yang awalnya besar di bagian bawah piramida penduduk Indonesia ke penduduk berusia lebih tua (produktif 15-64 tahun).

Struktur piramida yang menggembung di tengah semacam ini menguntungkan, karena dengan demikian beban ketergantungan atau dukungan ekonomi yang harus diberikan oleh penduduk usia produktif kepada penduduk usia anak- anak (di bawah 15 tahun) dan tua (di atas 64 tahun) menjadi lebih ringan. Kemudian muncul parameter yang disebut rasio ketergantungan *(dependency ratio),* yaitu rasio yang menunjukkan perbandingan antara kelompok usia produktif dan nonproduktif. Rasio ini sekaligus menggambarkan berapa banyak orang usia nonproduktif yang hidupnya harus ditanggung oleh kelompok usia produktif. Semakin rendah angka rasio ketergantungan suatu negara, maka negara tersebut makin berpeluang mendapatkan bonus demografi.

Berdasarkan data BPS hasil sensus penduduk tahun 2010 angka rasio ketergantungan kita adalah 51,3% (lihat grafik). Bonus demografi tertinggi biasanya didapatkan angka ketergantungan berada pada rentang antara 40-50%, yang berarti bahwa 100 orang usia produktif menanggung 40-50 orang usia tidak produktif. Kalau dipilah ke dalam kelompok desa dan kota, maka angka ketergantungan di perkotaan sudah mencapai angka 46,6%, artinya sudah masuk dalam rentang masa keemasan bonus demografi. Sementara untuk pedesaan masih 56,3%. Sekitar 34% dari masyarakat kita berada di rentang usia muda (15-35 tahun) yang sangat produktif. Kaum muda harapan bangsa inilah yang akan menjadi *engine of growth* yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kencang lagi. Oleh karena itu kesempatan seabad sekali ini harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dengan meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai kebijakan pembangunan kependudukan.

Secara garis besar Kebijakan Pembangunan Kependudukan meliputi lima aspek penting, yaitu :

1) Berkaitan dengan kuantitas penduduk (jumlah, struktur dan komposisi, laju pertumbuhan, pesebaran).
2) Berkaitan dengan kualitas penduduk (status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, angka kemiskinan).

3) Berkaitan dengan mobilitas penduduk (tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, antar pulau, antar perkotaan dan perdesaan).
4) Keempat adalah data dan informasi penduduk.
5) Kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan.

Keberhasilan pembangunan kependudukan dalam rangka menurunkan angka fertilitas dan peningkatan usia harapan hidup selama ini telah menghasilkan transisi demografi yang ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dan kematian serta peningkatan angka harapan hidup. Hal tersebut telah mengubah struktur umur penduduk, yakni menurunnya proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun yang diikuti dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan meningkatnya proporsi penduduk usia tua (65 tahun ke atas) secara perlahan.

Kondisi tersebut menyebabkan angka ketergantungan menurun yang disebut dengan bonus demografi *(Window of Opportunity)* yang menjadi landasan untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi (jendela peluang) tersebut diperkirakan akan terjadi hanya sekali saja dalam sejarah dan waktunya sangat pendek, yaitu sekitar 5 tahun dari tahun 2020- 2025, dengan syarat angka kelahiran dapat dikendalikan.

B. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang terdapat alam lingkungan hidup yang bisa digunakan untuk memenuhi keperluan hidup manusia untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua berdasarkan yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Sumber daya alam dimana volume maupun kuantitasnya di alam akan tersedia terus-menerus disebut sumber daya alam yang dapat diperbaharui . Hal ini disebabkan sumber daya alam terus

memperbaharui dirinya sendiri maupun pembaharuan oleh manusia. Contoh jenis sumber daya ini seperti udara, tumbuhan, air serta sinar matahari.

Ssumber daya alam dimana keberadaannya di alam sangat terbatas dan pada suatu waktu tertentu tidak akan tersedia lagi disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Penyebabnya adalah waktu yang diperlukan untuk membentukan sumber daya sangat panjang, padahal pemanfaatannya sangata cepat dan banyak. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan kuantitas antara hasil dan penggunaan.

Kelompok Sumber daya tidak dapat diperbaharui antara lain sebagai berikut:

- Bahan galian magmatik
- Bahan galian pematit
- Bahan galian hidrotermal
- Bahan galian yang terjadi karena hasil pengendapan
- Bahan galian yang terjadi sebagai hasil metamorfose kontak
- Bahan galian pengayaan sekunder

Berdasarkan jenis sumber daya alam dibagi dua yaitu sumber daya alam hayati (biotik) dan sumber daya alam nonhayati (abiotik).

Sumber daya alam hayati (biotik) atau sumber daya yang berasal dari hewan atau pun tumbuhan. Sumber daya alam non hayati (abiotik) yang berbentuk benda-benda mati. Contohnya adalah udara, sinar matahari dan hasil tambang.

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar berupa hutan, minyak, gas bumi, laut dan berbagi hasil tambang lainnya.

1. Hutan

Luas hutan Indonesia tercatat sebanyak 99,6 juta hektar pada tahun 2011.

Umumnya hutan di Indonesia dapat terdiri dari hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung. Hutan konservasi merupakan kawasan hutan yang memiliki ciri khas khusus dan fungsi utama adalah untuk pelestarian keanekagaraman flora dan fauna dan ekosistem.

Beberapa kawasan hutan konservasi yang ditetapkan di Indonesia berupa taman nasional, suaka margasatwa, cagar alam dan taman hutan rakyat (Tahura). Hutan lindung merupakan area hutan yang memilki fungsi utama untuk melindungi sistem penyangga kehidupan yaitu pengaturan ketersediaan air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, pencegahan intrusi laut, serta mempertahankan kesuburan tanah. Ketersediaan hutan hijau Indonesia yang sangat luas menggambarkan bahwa sumber daya alam indonesia cukup besar.

Hutan produksi merupakan hutan yang dengan sengaja ditanami kayu dan untuk keperluan perdagangan. Indonesiam mempunyai hutan produksi seluas 69,4 juta hektar. Hutan tersebut diusahakan melalui Hak Pengusahaan Hutan atau HPH oleh swasta maupun BUMN. Hasil hutan yang diambil yaitu kayu serta nonkayu. Kayu yang dihasilkan dapat berupa kayu bulat dan kayu olahan. Kayu bulat dihasilkan dari hutan dalam bentuk batangan pohon yang belum diolah seperti kayu jati, mahoni, akasia, cendana, pinus, sedangkan kayu olahan telah mengalami pengolahan lebih lanjut seperti kayu gergajian, *playwood*, dan *veneer*.

Hasil hutan nonkayu berupa buah-buahan, getah dan resin, madu, rotan, terpentin, minyak kayu putih, damar, sagu, sutera dan lain-lain. Potensi hutan berupa kayu ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bahan baku kertas, bahan baku industri meubel dan lain sebagainya. Setidaknya terdapat 4000 jenis kayu yang keberadaannya tersebar di nusantara. Lebih dari 250 jenis kayu tersebut merupakan kayu dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi.

Secara umum manfaat hutan adalah:

a. Sebagai tempat penyimpanan air hujan yang selanjutnya dialirkan menuju sungai atau danau, sehingga pada musim kemarau tidak terjadi kekeringan.
b. Sebagai sumber dan tempat kehidupan berbagai macam hewan dan tumbuhan.
c. Hutan dapat mencegah terjadinya erosi atau pengikisan lapisan tanah oleh air. Hal ini bermanfaat diantara lain untuk menjaga kesuburan tanah dan mengcegah terjadinya bencana tanah longsor.
d. Hutan merupakan paru – paru dunia karena hutan memproduksi oksigen yang dimanfaatkan manusia juga hewan untuk bernafas, dan juga menyerap kelebihan karbon dioksida di udara.
e. Hutan merupakan sumber penghasila bagi penduduk yang berada di sekitarnya.

2. Minyak Bumi

Penggunaan minyak bumi bagi kehidupan manusia antara lain untuk bahan bakar kendaraan, mesin pabrik, dan sebagainya. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagian menggunakan minyak bumi untuk menghasilkan listrik.

Cadangan terbukti minyak bumi Indonesia sebanyak 3,3 miliar barel serta cadangan potensial minyak bumi sebanyak 3,9 miliar barrel dan terdapat *unrecoverable oil* sebesar 55 miliar barel pada tahun 2017.

Berikut adalah daerah di Indonesia yang terkenal sebagai penghasil minyak.

a. Pulau Sumatra antara lain : Pereula dan Loukseumawe (Nangro Aceh Darussalam), Sungai Pakning dan Dumai (Riau), Plaju, Sungai Gerong dan Muara Enim (Sumatera Selatan).

b. Pulau Jawa antara lain : Jatibarang Majalengka (Jawa Barat), Wonokromo, Delta (Jawa Timur), Cepu, Cilacap (Jawa Tengah)
c. Pulu Kalimantan antara lain : Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu dan Sungai Mahakam (Kalimantan Timur), Rantau, Tanjung dan Amuntai (Kalimantan Selatan)
d. Maluku antara lain Pulau Seram dan Tenggara
e. Papua antara lain Klamono, Sorong dan Babo

Tabel 8

Produksi Minyak Bumi dan Gas Alam, 1996-2015

Tahun	Minyak Mentah dan Kondensat (000 barel)	Gas Alam (MMscf)
1996	548.648,30	3.164.016,20
1997	543.752,60	3.166.034,90
1998	534.892,00	2.978.851,90
1999	494.643,00	3.068.349,10
2000	484.393,30	2.845.532,90
2001	480.116,10	3.762.828,50
2002	397.308,50	2.279.373,90
2003	383.700,00	2.142.605,00
2004	404.992,90	3.026.069,30
2005	387.653,50	2.985.341,00
2006	357.477,40	2.948.021,60
2007	348..348,00	2.805.540,30
2008	358.718,70	2.790.988,00
2009	346.313,00	2.887.892,20
2010	344.888,00	3.407.592,30
2011	329.249,30	3.256.378,90
2012	314.665,90	2.982.753,50
2013	301.191,90	2.969.210,80
2014	287.902,20	2.999.524,40
2015	286.814,20	2.948.365,80

Sumber: https://www.bps.go.id/statictable/2009/06/15/1092/produksi-minyak-bumi-dan-gas-alam--1996-2015.html, diakses tanggal 06 Juli 2018

3. Potensi Sumber Daya Tambang

Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan alam bahan tambang. Bahan tambang ini beraneka ragam, namun yang jumlahnya paling banyak adalah minyak bumi dan gas alam, batu bara, bauksit, pasir besi dan emas.

a. Batu Bara

Batu bara adalah bahan bakar fosil yang dibentuk dari tanaman yang sudah mati dan sudah tertimbun selama jutaan tahun. Contohnya pohon *lycopods* dan pakis raksasa merupakan pohon-pohon yang sangat tinggi dan tumbuh zaman dahulu yang sudah mati dan jatuh ke dalam rawa atau genangan air. Pohon-pohon mati tersebut selanjutnya tertimbun lumpur serta pasir dalam keadaan basah secara terus-menerus yang menyebabkan lapisan tumbuhan mati dalam kondisi basah serta asam. Lapisan tersebut kemudian tidak mempunyai akses ke udara dan terus tertekan oleh timbunan diatasnya. Penggunaan batu bara dalam kehidupan manusia adalah sebagai sumber energi pada pembangkit listrik, bahan bakar rumah tangga, pembakaran industri genteng, batu kapur, bijih besi dan baja serta berbagai industri kimia lainnya.

Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5 % dari seluruh batu bara yang ada di dunia tetapi merupakan negara penghasil batu bara peringkat 6 (enam) di dunia. Produksi batu bara Indonesia per tahunnya tercatat hingga 246 juta ton.

Negara penghasil batu bara terbatas jumlahnya, yaitu;

1) China (3,6 miliar ton),
2) Amerika Serikat (800 juta-1 miliar ton),

3) India (585 juta ton),
4) Australia (414 juta ton),
5) Indonesia (376 juta ton),
6) Rusia (334 juta ton),
7) Afrika Selatan (253 juta ton),
8) Jerman (189 juta ton),
9) Polandia (139 juta ton) dan
10) Kazakhstan (117 juta ton).

Tabel 9
Produksi Barang Tambang Mineral (Kg), 2010-2015
Sumber : Statistik lingkungan hidup Indonesia 2016, BPS. Diolah.

Barang Tambang	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Batu Bara	325325793	415765068	466307241	458462513	435742874	405871432
Bauksit	2200000	24714940	-	-	2539274	-
Nikel	9475362	41193335	47106534	65047388	39034912	34063566
Emas	119726	68220	69291	59804	69349	92339
Perak	335040	227173	-	-	-	-
Granit	2172080	3316813	-	-	-	-
Pasir Besi	8975507	11814544	11545752	22353337	5951400	3838546
Konsentrat Tin	97796	89600	44202	59412	51801	93180
Konsentrat Tembaga	993152	1472238	2265865	1909548	1571596	2282831

4. Gas Alam

Cadangan gas alam yang terkandunng di bumi Indonesia s2,8 triliun meter kubik. Jumlah ini hanya sebesar 1,5% dari total cadangan gas alam di seluruh dunia. Indonesia merupakan negara pengekspor gas alam terbesar di dunia walaupun jumlah cadangan gas alam kecil. Negara-negara tujuan ekspor gas alam Indonesia adalah Jepang, Korea, Taiwan, China, dan AS. Urutan negara-negara yang mempunyai cadangan gas alam terbanyak adalah: Rusia 48 triliun meter kubik, Iran 27 triliun meter kubik, dan Qatar 26 triliun meter kubik.

Laporan kementerian ESDM menyatakan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) subsektor minyak dan gas bumi (migas) per tanggal 29 Desember 2017 membukukan sebesar Rp. 85,6 triliun atau lebih tinggi dari target 2017 yang sebesar Rp. 76,6 triliun. Penerimaan ini didapat dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Migas yang sebesar Rp79,6 triliun dan PNBP Migas lainnya Rp. 6 triliun. Pada tahun 2016, PNBP migas adalah sebesar Rp49 triliun dan tahun 2015 Rp 86 triliun.

Selain itu, penerimaan negara yang didapat dari Pajak Penghasilan (PPh) migas adalah sebesar Rp. 49 triliun, sehingga total penerimaan dari subsektor migas mencapai Rp135 triliun atau 113 persen dari target APBNP yang sebesar Rp119 triliun. Tahun 2016, penerimaan dari subsektor ini adalah sebesar Rp. 87 triliun. Hal ini menggambar bahwa sektor ESDM merupakan salah satu sektor yang bisa diandalkan dan sangat mempengaruhi pembangunan dan perekonomian nasional.

6. Sumber DayaLaut

Dua pertiga wilayah Indonesia merupakan lautan. Potensi sumberdaya kelautan yang besar (sekitar 75%) dan sudah berkontibusi secara nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sumberdaya kelautan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat antara lain berupa menyediakan ikan dan tumbuhan laut untuk keperluan pangan, sumber penghasilan masyarakat sekitar, menciptakan lapangan kerja, sumber devisa negara dan

daerah. Sumber daya kelautan yang luas dan sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang dimiliki Indonesia. Sumber daya kelautan jika bersinergi sumber daya manusia Indonesia sangat berpotensi menjadi sektor yang diunggulkan dalam strategi pembangunan nasional karena mempunya keunggulan komparatif, keunggulan kooperatif dan keunggulan kompetitif.

Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi fisik, terdiri dari:

a. perairan Nusantara seluas 2.8 juta km2
b. laut Teritorial seluas 0.3 juta km2
c. perairan Nasional seluas 3,1 juta km2
d. luas Daratan sekitar 1,9 juta km2 ,
e. luas Wilayah Nasional 5,0 juta km2 ,
f. luas ZEE (Exlusive Economic Zone) sekitar 3,0 juta km2 ,
g. panjang garis pantai lebih dari 81.000 km
h. jumlah pulau lebih dari 18.000 pulau.

Potensi Pembangunan Potensi Wilayah pesisir dan laut Indonesia dipandang dari segi Pembangunan adalah sebagai berikut:

a. Sumberdaya yang dapat diperbaharui seperti; Perikanan (Tangkap, Budidaya, dan Pascapanen), Hutan mangrove, Terumbu karang, Industri Bioteknologi Kelautan dan Pulau-pulau kecil.
b. Sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti; Minyak bumi dan Gas, Bahan tambang dan mineral lainnya.
c. Energi Kelautan seperti; Pasang-surut, Gelombang, Angin, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).
d. Jasa-jasa Lingkungan seperti; Pariwisata, Perhubungan dan pelabuhan

Potensi Sumberdaya yang dapat diperbaharui *(Renewable Resource)* Potensi wilayah pesisir dan lautan lndonesia dipandang dari segi perikanan meliputi;

a. Perikanan Laut (Tuna/Cakalang, Udang, Demersal, Pelagis Kecil, dan lainnya) sekitar 4.948.824 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 15.105.011.400,
b. *Mariculture* (rumput laut, ikan, dan kerang-kerangan serta Mutiara sebanyak 528.403 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 567.080.000,
c. Perairan Umum 356.020 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 1.068.060.000, Budidaya Tambak 1.000.000 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 10.000.000.000, Budidaya Air Tawar 1.039,100 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 5.195.500.000, dan Potensi Bioteknologi Kelautan tiap tahun sebesar US$ 40.000.000.000,

Secara total potensi Sumberdaya Perikanan Indonesia senilai US$ 71.935.651.400 dan yang baru sempat digali sekitar US$ 17.620.302.800 atau 24,5 %. Potensi tersebut belum termasuk hutan mangrove, terumbu karang serta energi terbarukan serta jasa seperti transportasi, pariwisata bahari yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

Menurut laporan FAO *(Food and Agricultural Organization),* potensi lestari sumber daya perikanan tangkap laut Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton/tahun, dengan tingkat pemanfaatannya mencapai 5,71 juta ton/tahun.

Indonesia berada peringkat ketiga dalam memproduksi ikan tangkap. Peringkat pertama adalah negara China dan yang kedua adalah negara Peru. Sedangkan kategori memproduksi ikan budi daya, Indonesia berada pada peringkat keempat. Peringkat pertama sampai dengan ketiga secara berturut adalah negara China, India, dan Vietnam (FAO, 2012).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mencanangkan banyak program untuk menambah produksi ikan. Program industrialisasi kelautan dan perikanan merupakan salah satu contoh yang sudah dilakukan pemerintah. Program ini dilakukan dengan peningkatan kapasitas industri untuk ikan kaleng cakalang, sarden, tuna, udang, dan produk olahan ikan.

Program lain yang juga dilakukan pemerintah adalah meningkatkan produksi rumput laut. Program ini berhasil peningkatkan jumlah ekspor hasil laut serta menurunkan jumlah impor hasil laut. Komoditi hasil laut yang di impor ke Indonesia adalah tepung ikan serta ikan beku.

Laut Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati biota laut yang sangat kaya. Laut Indonesia mempunyai 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, serta 950 spesies biota terumbu karang. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati laut paling besar di dunia (*Marine Mega-Biodiversity).*

C. POTENSI SUMBER DAYA BUATAN

Hasil pengembangan buatan dari sumber daya alam hayati atau non hayati disebut sumber daya buatan. Pengembangan ini umumnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan atau kemampuan daya dukung sumber daya alam tersebut. Sumber daya buatan umumnya diciptakan dengan cara meningkatkan kegunaan atau manfaat sumber daya alam demi kepentingan masyarakat dan negara. Pengembangan sumber daya buatan diharapkan dapat menurunkan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan sehingga ekosistem tetap lestari dan seimbang.

Berbagai wujud sumber daya buatan bisa ditemukan di lahan budidaya, daerah pedesaan, perkotaan, dan kawasn cagar alam. Kawasan pengembangan sumber daya buatan tersebut dikembangkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga tetap dapat bermanfaat untuk mewujudkan masyarakat makmur dan sejahtera.

Sumber daya buatan di Indonesia antara lain : sawah, waduk, perkebunan, dan cagar budaya.

1. Sawah

Sawah adalah lahan basah yang digunakan untuk kegiatan pertanian. Di berbagai daerah di Indonesia sawah digunakan untuk bercocok tanam padi. Padi merupakan tanaman membutuhkan air dalam jumlah yang banyak, sehingga sawah harus mampu menahan air dalam waktu yang lama. Air yang digunakan untuk pertanian umumnya berasal dari air hujan serta air aliran dari sungai, danau atau rawa.

Organisasi pangan dan pertanian dunia atau *Food and Agriculture Organization (FAO)*, di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai Indonesia memiliki lahan persawahan padi terproduktif di Asia. Indonesia tertinggi dalam hal produktivitas padi di Asia pada tahun 2015. Potensi produksi beras di Indonesia bisa meroket bila sistem irigasi dan teknis cocok tanam diperbaiki. Sebesar 52% area sawah tidak memiliki saluran irigasi yang baik. Selain itu, petani Indonesia masih bergantung pada orang di dalam proses cocok tanah. Jika irigasi diperbaiki, cukup memenuhi kebutuhan beras nasional.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (2017) melaporkan lebih dari separuh sawah terdapat di Pulau Jawa. Seluas 3,4 juta hektar atau 42% sawah di Indonesia berada di Pulau Jawa dari total 8,1 juta hektar sawah di seluruh Indonesia. Luas sawah di Pulau Sumatera sebesar 2,3 juta hektar atau 29,59%, Kalimantan 937.606 hektar atau 11,57%, Sulawesi 886.501 hektar atau 10,94%, Nusa Tenggara 285.852 hektar atau 3,53%, Bali 76.003 hektar atau 0,94%, Papua 55.840 hektar atau 0,69% dan Maluku 21.763 hektar atau 0,27%

Sawah mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia. Hal ini disebabkan beras merupakan makanan pokok dan utama hampir seluruh masyarakat Indonesia. Data BPS tahun 2006 menjelaskan bahwa sebanyak 41% lahan sawah berada di pulau Jawa, dan sisanya sebesar 59% berada di luar pulau Jawa. 2006). Pertambahan populasi penduduk yang sangat tinggi menyebabkan peningkatan permintaan lahan di semua sektor sehing alih fungsi lahan sawah meningkat drastis.

Pengembangan teknologi di bidang pertanian berkembang cukup pesat tetap penggunaan teknologi tersebut masih tergolong lambat dan rendah di tingkat petani. Hal ini menyebabkan laju kenaikan produktivitas sangat lambat sehingga kenaikan produksi beras nasional jadi stagnan atau tidak mengalami peningkatan produktivitas. Umumnya lahan sawah di pulau Jawa lebih subur dengan lahan sawah di daerah lain karena lahan sawah di pulau Jawa merupakan tanah yang berbahan induk volkan sedangkan sawah daerah lain berbahan induk tersier. Selain kesubururan tanah yang lebih alami, pertanian di Pulau Jawa juga di dukung dengan penggunaan teknik bercocoktanam yang lebih maju, sehingga ditemukan kesenjangan produktivitas yang cukup signifikan antara lahan sawah di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa. Permasalahan yang sekarang ini muncul di pulau Jawa adalah tingginya kejadian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Salah satu upaya untuk mengatasi srmakin berkurangnya luas lahan sawah produktif, pemerintah mencanangkan program intensifikasi pertanian. Program ini dapat diterima oleh para petani tetapi memakan waktu yang lama untuk sosialisasi dan kemudian diterapkan. Penerapan sistem intensifikasi pertanian yang lamat dan tingginya laju alih fungsi lahan sawah mengakibatkan luas baku lahan sawah menyusut dari sekitar 8,3 juta ha pada tahun 1990 menjadi sekitar 7,8 juta ha pada tahun 2005 (BPS, 1990 dan 2005).

Sebagian besar lahan sawah yang sudah alih fungsi menjadi pusat pembangunan baik di pulau maupun di luar pulau jawa justru lahan yang sebenarnya memiliki nilai produktivitas tinggi. Sedangkan lahan baru yang dibuka memiliki produktivitas yang rendah. Lahan yang baru dibuka umumnya bermasalah dalam hal fisik, kimia dan biologi. Selain itu permasalahan lain yang sering muncul adalah masalah sosial, kelembagaan, infrastruktur, serta profit yang sangat rendah dari usaha pertanian. Hal ini menyebabkan sebagian besar pemanfaatan lahan sawah yang baru dibuka jadi kurang optimal. Hal ini mendorong petani mengalihkan fungsi lahan yang tadinya untuk bercocok tanam padi

menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, karet dan lainnya. Kondisi ini menimbulkan permasalahan ketahanan pangan nasional yang semakin buruk. Oleh karena itu diperlukan upaya yang dilakukan secara berkesinambungan yaitu: menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah, membuka lahan sawah yang baru serta menggalakkan intensifikasi sistem pertanian melalui penerapan teknologi pertanian. Penerapan teknologi pertanian diharapkan mampu menaikkan produktivitas dan juga memelihara kelestarian lingkungan. Ketahanan pangan mencakup berbagai aspek yang sangat luas, bukan hanya penyediaan beras tetapi ketersediaan semua jenis bahan pangan yang berasal dari dalam negeri ataupun yang diimpor dari luar negeri. Walaupun ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan beras, tetapi kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia serta usaha pencapaian ketahanan pangan lebih diutamakan pada peningkatan kemandirian *(self sufficiency)* komoditi beras. Kebijakan pembangunan pertanian tersebut antara lain Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) yaitu upaya untuk meningkatkan produksi beras nasional hingga 5% per tahun pada tahun 2007-2009. Program ini adalah salah satu komitmen pemerintah untuk membangun sektor pertanian Indonesia sehingga tercipta swasembada beras.

Luas lahan sawah di seluruh Provinsi Indonesia tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10

Luas lahan sawah di seluruh Provinsi Indonesia tahun 2010-2015

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	313649	307556	308973	300808	294129	290337
Sumatera utara	468724	467138	448722	438346	433043	423465
Sumatera barat	229693	231463	230775	224182	225890	226377

Riau	115961	115897	109585	93338	87594	71910
Jambi	112434	113757	113379	113546	101195	94735
Sumatera selatan	611386	629355	610314	612424	616753	620632
Bengkulu	92976	90217	88877	93382	88756	85131
Lampung	345437	350949	364111	360237	363055	377463
Kep. Bangka Belitung	4056	5932	6133	5358	7490	10654
Kep. Riau	442	393	559	487	405	246
Dki Jakarta	1312	1098	1001	895	778	650
Jawa barat	930268	930507	923575	925042	924307	912794
Jawa tengah	962471	960970	962289	952980	966647	965262
Di yogyakarta	55523	55291	55023	55126	54417	53553
Jawa timur	1107276	1106449	1105550	1102921	1101765	1091752
Banten	196744	197165	195951	194716	200480	199492
Bali	81425	80164	79399	78425	76655	75922
Nusa tenggara barat	238619	240180	246569	253208	254298	264666
Nusa tenggara timur	142479	144574	148810	169063	172954	177238
Kalimantan barat	307016	318581	322541	330883	323959	330724
Kalimantan tengah	175633	202237	226903	225836	215545	196553
Kalimantan selatan	436318	457155	451869	440429	431437	450152
Kalimantan timur	82796	90518	90887	63323	55485	57000
Kalimantan utara	-	-	-	21762	21775	21448
Sulawesi utara	52789	56181	56173	56157	60475	55820
Sulawesi tengah	136241	137786	143475	146721	141448	128323
Sulawesi selatan	572089	576559	592376	602728	623139	628148
Sulawesi tenggara	83356	85585	92280	95378	96826	103812
Gorontalo	29566	28707	30728	32239	32116	32058

Sulawesi barat	59476	55016	59020	61070	62312	61292
Maluku	11451	14085	15972	15042	13519	13394
Maluku utara	9478	9093	9359	10510	10516	11802
Papua barat	7711	7648	8330	9587	9587	10126
Papua	27757	27756	27756	42350	42843	44462
Indonesia	8002552	8095962	8127264	8128499	8111593	8087393

Sumber : https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/895, diakses 6 Juli 2017

2. Waduk

Waduk adalah bangunan yang sengaja dibuat oleh manusia yang berfungsi untuk penampungan air. Nama lain dari waduk di beberapa daerah adalah bendungan. Di berbagai daerah umumnya masyarakat membangun sendiri bendungan. untuk keperluan pertanian dan digunakan secara bersama-sama. Ukuran waduk bervariasi sesuai dengan kebutuhan yaitu ukuran besar, sedang, dan ukuran kecil. Ukuran waduk selain disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penggunaan, tetapi juga karena menyesuaikan dengan besarnnya aliran air yang masuk.

Beberapa manfaat waduk yang ditemukan saat ini antara lain irigasi lahan pertanian, tempat wisata, menjalankan listrik tenaga air, mengendalikan banjir dan tempat budidaya ikan air tawar.

Indonesia memiliki ketersediaan air yang cukup banyak karena Indonesia mempunyai iklim tropis. Selain itu Indonesia mempunyai wilayah perairan yang sangat luas yang tersebar di seluruh wilayah. Iklim tropis berpengaruh terhadap musim di Indonesia yaitu hanya musim hujan dan kemarau yang berganti setiap enam bulan sekali dalam setahun. Ketersediaan air pada musim hujan sangat banyak, bahkan terkadang sampai menimbulkan banjir. Sebaliknya pada saat musim kemarau ketersediaan air sangat sedikit. Di beberapa daerah bahkan mengalami kekeringan dan sangat suasah untuk mendapat air

untuk keperluan sehari-hari. Kondisi kelimpahan dan kekurangan air yang terjadi di Indonesia sama-sama menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Kesenjangan ketersediaan air yang cukup tinggi pada kedua musim tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat melakukan upaya agar air yang berlimpah saat musim hujan ditampung sehingga tidak menimbulkan banjir atau kerusakan di sepanjang area yang dialirinya. Pembangunan waduk merupakan upaya nyata yang sudah banyak dilakukan di berbagai daerah baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Waduk sanga efektif untuk menampung air sehingga alirannya tidak terlalu deras. Waduk berbentuk cekungan besar yang dapat mengendalikan aliran air yang masuk sehingga sekaligus dapat menampung ai untuk digunakan pada saat musim kemarau. Pembangunan waduk ini telah ditemukan di berbagai daerah sejak zaman dahulu. Umumnya pembangunan berada di wilayah yang memiliki aliran sungai besar yang pada saat musim hujan menampung banyak debit air.

Beberapa fungsi dari waduk antara lain adalah:

a. Penampungan air sehingga aliran air bisa dikontrol agar tidak meluap.
b. Cadangan ketersediaan air di musim kemarau.
c. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
d. Keperluan rumah tangga masyarakat sekitar
e. Pengairan lahan pertanian

keberadaan waduk sangat penting di Indonesia karena sebagian besar masyarakat adalah petani dan tinggal di pedesaan.

Target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama tahun 2015-2019 adalah membangun waduk 65 unit di beberapa daerah supaya ketahanan air dan ketahanan pangan terpenuhi.

Berikut beberapa bendungan yang memiliki ukuran yang sangat besar di Indonesia :

a. Waduk Jatiluhur di Jawa Barat

Waduk Jatiluhur terdapat di Jawa Barat di titik radius 100 Km dari sebelah tenggara kota Jakarta. Nama lain waduk ini sering disebut waduk Ir. Juanda. Waduk ini diketahui sebagai waduk yang paling besar di Indonesia dan dibangun pada tahun 1957. Kapasitas penampungan air sangat tinggi. Pemanfaatannya adalah untuk irigasi lahan pertanian, dan bisa mencukupi pengairan lahan pertanian yang sangat luas hingga 242 ribu hektar sawah.

b. Waduk Karangkates

Waduk Karangkates merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia, berlokasi di Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Nama lain waduk ini sering juga disebut waduk Ir. Sutami. Sumber air waduk berasal dari liran air Sungai Brantas. Pembangunan waduk ini dilakukan selama dua tahun dari 1975 sampai dengan tahun dengan biaya yang dihabiskan berkisar 10 milyar rupiah. Penggunaan waduk ini adalah sebagai sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA bagi penduduk sekitar, tempat wisata dan merupakan sumber air keperluan rumah tangga bagi beberapa daerah di Kabupaten Malang.

c. Waduk Sigura-gura

Urutan ketiga waduk yang mempunya ukuran besar adalah waduk Sigura-gura. Lokasi waduk Sigura-gura ada di Propinsi Sumatera Utara dengan jarak sekitar 23,3 Km dari Danau Toba. Waduk ini digunakan untuk menyediakan air yang diperlukan masyarakat dan sumber energi PLTA di masyarakat sekitar. Pembangunan waduk Sigura- gura dilakukan pada tahun 1978 dan serta diresmikan pada tahun 1981. Waduk ini bisa memproduksi daya listrik sebanyak 1868 GWH per tahun.

d. Waduk Batutegi

Waduk Batutegi adalah waduk yang berada pada urutan keempat dari waduk paling besar di Indonesia. Waduk ini berlokasi di propinsi Lampung. Kegunaan utama waduk adalah sumber energi PLTA bagi penduduk setempat dan daerah sekitarnya. Kegunaan lainnnya adalah memenuhi kebutuhan air minum masyarakat setempat. Pembangunan waduk menggunakan dana APBN pemerintah Indonesia serta dana bantuan dari *Japan Bank for International Corporation*.

e. Waduk Gajah Mungkur

Waduk Gajah Mungkur berlokasi Wonogiri Propinsi Jawa Tengah. Sumber air waduk ini mengalir dari sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo adalah sungai paling besar di wilayah Wonogiri. Pembangunan waduk ini dilakukan pada tahun 1970. Penggunaan waduk adalah untuk sumber eneri PLTA, pengairan lahan pertanian serta memenuhi kebutuhan air untuk penduduk setempat.

f. Waduk Wonorejo

Waduk Wonorejo berlokasi Tulungagung Propinsi Jawa Timur, berjarak 12 kilometer dari pusat Kota Tulungagung. Kapasitas penampungan waduk ini mencapai 122 juta meter kubik. Penggunaan utama waduk ini adalah untuk sumber energi PLTA serta penyediaan air minum bagi penduduk Jawa Timur.

g. Waduk Riam Kanan

Waduk Riam Kanan berlokasi Propinsi Kalimantan Selatan. Pembangunan waduk ini dilakukan pada tahun 1973. Penggunaan utama adalah sebagai sumber energy PLTA di provinsi Kalimantan Selatan.

3. Perkebunan

Perkebunan merupakan semua aktifitas yang membudidayakan tumbuhan tertentu di tanah atau media tumbuh lainnya pada ekosistem yang cocok; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasilnnya, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran. Hal ini yang membedakan usaha perkebunan dengan usaha ladang dan hortikultura sayur mayur dan bunga. Tetapi usaha penanaman pohon buah termasuk dalam usaha perkebunan. Tumbuhan yang dibuddaya biasanya berukuran besar serta waktu penanaman yang cukup lama, antara kurang dari setahun hingga tahunan.

Berdasarkan sifat intensifnya, usaha perkebunan dibagi menjadi agroforestri dan silvikultur budidaya hutan. Proses pemeliharaan tanaman sangat penting dalam usaha perkebunan. Sementara dalam agroforestri dan silvikultur, tanaman cenderung dibiarkan untuk tumbuh sesuai kondisi alam. Karena sifatnya intensif, perkebunan hampir selalu menerapkan cara budidaya monokultur, kecuali untuk komoditas tertentu, seperti lada dan vanili.

Penciri sekunder, yang tidak selalu berlaku, adalah adanya instalasi pengolahan atau pengemasan terhadap hasil panen dari lahan perkebunan itu, sebelum produknya dipasarkan. Perkebunan dibedakan dari usaha tani pekarangan terutama karena skala usaha dan pasar produknya.

Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung volume komoditas yang dihasilkan. Perkebunan memerlukan luas minimum agar memperoleh keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya. Kepemilikan lahan bukan merupakan syarat mutlak dalam perkebunan, sehingga untuk beberapa komoditas berkembang sistem sewa-menyewa lahan atau sistem pembagian usaha, seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Sektor perkebunan di Indonesia setiap tahunnya terus berkembang. Perkembangan sektor perkebunan mempunyai peran

penting dalam pengembangan pertanian baik skala regional maupun nasional. Salah satu komoditas perkebunan yang saat ini sedang intensif dikembangkan adalah kelapa sawit. Pangsa pasar minyak kelapa sawit masih terbuka lebar. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya permintaan pasar dunia terhadap minyak kelapa sawit.

Berdasarkan data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, pada tahun 2011 Indonesia adalah negara pengekspor minyak kelapa sawit nomor satu di dunia dengan nilai ekspor mencapai 9,7 juta ton. Minyak sawit telah menjadi minyak makan terbesar yang dikonsumsi dunia menggantikan minyak kedelai. Pangsa pasar dunia minyak sawit adalah 24,4% dan pangsa pasar minyak kedelai adalah 23,9% dari total konsumsi minyak dan lemak dunia sebanyak 143 juta ton.

Perkembangan kelapa sawit dapat terlihat dengan selalu meningkatnya lahan pertanaman untuk kelapa sawit setiap tahunnya. Berdasarkan data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan, luas areal lahan kelapa sawit di Indonesia pada 2011 mencapai 8,9 juta hektar, sementara di 2012 angka sementara mencapai 9,3 juta hektar. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya selalu ada upaya untuk meningkatkan areal perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia tersebar di berbagai daerah dan tumbuh di jenis tanah yang beragam sesuai kondisi tanah di daerah masing-masing. Setiap tanah mempunyai tingkat kesuburan yang berbeda. Secara umum kelapa sawit bisa tumbuh di beberapa jenis tanah seperti podzolik, latosol, regosol, andosol, organosol, dan alluvial. Jenis tanah podzolik yang berwarna merah-kuning paling banyak ditemukan di perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Walaupun Jenis tanah ini memiliki solum yang cukup serta tekstur liat berpasir yang bagus untuk pertumbuhan akar serta mekanisme air, tetapi jenis tanah ini diketahui

mempunyai tingkat kesuburan kimia yang rendah. Tanah podzolik tanah ini banyak ditemukan di wilayah Sumatera Utara.

Jenis tanah organosol atau gambut umum ditemukan di wilayah Kalimantan, Jambi, Sumatera Selatan dan Riau. Tanah jenis ini mempunyai bahan organic yang belum dihumifikasi lebih lanjut serta mempunyai pH rendah. Jenis tanah ini dikategorikan cukup baik untuk pertumbuhan kelapa sawit, tetapi kekurangan jenis tanah ini antara lain mengandung unsur Kalium yang cukup rendah serta masalah drainase dan permukaan air tanah yang kurang baik.

Jenis tanah yang sesuai untuk penamanan kelapa sawit sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi kelapa sawit. Produksi dari suatu tanaman dipengaruhi faktor internal (sifat genetis tanaman) serta faktor eksternal seperti manajemen pengelolaan tanaman, sifat tanah dan iklim (Pahan, 2006). Oleh karena itu, perbedaan kesuburan tanah yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit akan sangat mempengaruhi produktivitas tanaman. Semakin sesuai lahan yang digunakan terhadap syarat tumbuh kelapa sawit, maka pengelolaan yang dilakukan semakin mudah dan akan menghasilkan produktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan lahan yang tidak sesuai.

Perkembangan industri dan perkebunan kelapa sawit yang selalu meningkat, mendorong para pengusaha perkebunan untuk menambah luas lahan perkebunannya. Tetapi lahan tumbuh yang tersedia tidak selalu memenuhi syarat tumbuh kelapa sawit. Keterbatasan ini menyebabkan beberapa perkebunan sawit ditanam pada lahan yang tidak sesuai seperti kedalaman efektif tanah yang dangkal, terutama pada daerah dengan jenis tanah yang memiliki kandungan batuan yang tinggi dan kondisi drainase kurang baik, lahan gambut, drainase yang jelek pada dataran pasang surut, dataran aluvium, dan lahan gambut, potensi tanah sulfat masam pada daerah dataran pasang surut.

Tabel 11

Luas areal tanam (ha) perkebunan berdasar jenis tanam tahun 1995-2015

Tahun	Karet	Kelapa Sawit	Coklat	Kopi	Teh	Tebu
1995	471,9	992,4	125,4	49,3	81,0	496,9
1996	538,3	1146,3	129,6	46,7	88,8	400,0
1997	557,9	2109,1	146,3	61,8	89,3	378,1
1998	549,0	2669,7	151,3	62,5	91,2	405,4
1999	545,0	2860,8	154,6	63,2	91,6	391,1
2000	549,0	2991,3	157,8	63,2	90,0	388,5
2001	506,6	3152,4	158,6	62,5	83,3	393,9
2002	492,9	3258,6	145,8	58,2	84,4	375,2
2003	517,6	3429,2	145,7	57,4	83,3	340,3
2004	514,4	3496,7	87,7	52,6	83,3	344,8
2005	512,4	3593,4	85,9	52,9	81,7	381,8
2006	513,2	3748,5	101,2	53,6	78,4	396,4
2007	514,0	4101,7	106,5	52,5	77,6	427,8
2008	515,8	4451,8	98,4	58,3	78,9	436,5
2009	482,7	4888,0	95,3	48,7	66,9	422,9
2010	496,7	5161,6	92,2	47,6	66,3	436,6
2011	524,3	5349,8	94,3	48,7	67,3	192,5
2012	519,2	5995,7	81,1	47,6	65,3	194,9
2013	529,9	6108,9	79,8	47,6	66,4	208,7
2014	538,9	6332,4	41,3	46,8	65,5	187,1
2015	551,1	11325,3	42,1	47,9	65,6	186,8

Sumber:https://www.bps.go.id/statictable/2009/09/08/1665/luas-areal-tanaman perkebunan-besar-menurut-jenis-tanaman-000-ha-1995-2015-.html

20

Berdasarkan data Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian RI tahun 2016, keberhasilan pembangunan perkebunan kelapa sawit nasional, berasal dari berhasilnya pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan di berbagai provinsi. Begitu pula dengan hasil produksi yang dihasilkan, sejalan dengan

perkebunan kelapa sawit yang berhasil dikembangkan. Pada tahun 2015, luas perkebunan kelapa sawit nasional sebesar 11,3 juta hektar, yang berada di 5 (lima) Provinsi di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit paling luas ditemukan di Pulau Sumatera dan merupakan wilayah terbesar perkebunan dan produksi CPO nasional. Propinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Pulau Sumatera adalah Provinsi Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Selanjutnya, Propinsi di pulau Kalimantan yang memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar adalah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Pulau Kalimantan memiliki keunggulan untuk melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit karena lahan yang tersedia masih cukup dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan dibandingkan Pulau Sumatera. Kelima provinsi yang disebutkan di atas, memiliki kontribusi sebesar 64% dari luas lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di Indonesia. Keberadaan perkebunan kelapa sawit ini, mampu berkontribusi sebesar 71% terhadap produksi CPO nasional.

Pertama, Provinsi Riau, mempunyai kekhasan karena sebagian besar perkebunan kelapa sawit adalah perkebunan rakyat atau pemiliknya adalah masyarakyat bukan perusahaan. Tercatat seluas 1,44 juta hektar perkebunan kelapa sawit adalah milik Perkebunan Rakyat (PR). Jumlah ini sanggup menyumbang sebanyak 3,85 juta ton terhadap produksi CPO pada tahun 2015. Hal ini termasuk jumlah yang besar dan sangat membanggakan, karena rakyat sanggup berdaulat dan mengusahakan atas kepemilikan lahan di daerahnya sendiri.

Selain perkebunan rakyat, propinsi Riau juga mempunyai Perkebunan Besar Swasta (PBS) sebesar 931.662 hektar, dimana dapat menghasilkan CPO hingga 3,59 juta ton. Keberadaan PBS di Provinsi Riau, secara nyata ikut mendukung kuatnya keberadaan perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar dimiliki masyarakat Riau.

Propinsi Riau secara total mempunyai perkebunan kelapa sawit seluas 2,46 juta hektar yang mampu menyediakan produksi CPO nasional sebanyak 7,27 juta ton.

Kedua, Provinsi Sumatera Utara, diketahui sudah mempunyai perkebunan kelapa sawit dari jaman penjajahan Belanda. Perkebunan Besar Swasta (PBS) di propinsi Sumatera Utara berperan sangat penting memperkokoh usaha perkebunan kelapa sawit. PBS Sumatera Utara mempunyai lahan seluas 721.771 hektar dan menghasilkan CPO sebanyak 5,31 juta ton. Selain PBS, Perkebunan kelapa sawit milik rakyat juga tergolong cukup luas di Propinsi Sumatera Utara. Luas perkebunan kelapa sawit milik rakyat sebanyak 418.075 hektar, dan memproduksi CPO sebanyak 1,20 juta ton. Perkebunan Besar Negara (PBN) di propinsi Sumatera Utara dilaporkan mempunyai perkebunan kelapa sawit 326.574 hektar dan mampu memproduksi CPO sebanyak 1,11 juta ton. Propinsi Sumatera Utara diketahui sebagai perintis usaha perkebunan kelapa sawit nasional. Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, sering dijadika contoh untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit daerah lain. Hal ini disebabkan perkebunan kelapa sawit Sumatera Utara merupakan cikal bakal lahirnya perkebunan kelapa Sawit nasional dan mempunyai sejarah tersendiri dalam pengembangannya.

Ketiga, Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki kekuatan dari PBS seluas 1,07 juta hektar. Dengan total luas lahan sebesar 1,21 juta hektar yang dimiliki. Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi ini, menjadi kokoh dibangun oleh perusahaan swasta. Berbanding terbalik dengan Provinsi Riau yang berasal dari PR.

Kendati memiliki kondisi terbalik dengan Provinsi Riau, yang perkebunan kelapa sawit milik rakyat hanya seluas 143.058 hektar, tetapi mampu menghasilkan produksi CPO sebesar 235.921 ton. Diperkuat dengan PBN seluas 725 hektar yang menghasilkan CPO sebesar 395 ton pada tahun lalu.

Keempat, Provinsi Sumatera Selatan, memiliki kekuatan berimbang PR & PBS, dengan total luas 1,06 juta hektar. Kekuatan perkebunan rakyat dan perkebunan swasta dalam membangun perkebunan kelapa sawit di wilayahnya memiliki kekuatan sama

besar, sehingga memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan didaerahnya.

Kementerian Pertanian melaporkan bahwa dari sektor perkebunan, kelapa sawit masih berkontribusi tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, melaporkan tahun 2016 bahwa dari sektor perkebunan berkontribusi dalam PDB nasional sebanya 429 triliun rupiah. Kontribusi tersebut sebagian berasal dari 15 komoditas yang menghasilkan devisa negara, dan kelapa sawit merupakan penyumbang terbesar dengan nilai hingga 260 triliun rupiah.

4. Cagar Budaya

Para ahli mendefisikan kata Cagar Budaya berbeda-beda. Cagar Budaya merupakan budaya yang diwariskan, seperti Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang memerlukan pelestarian karena mempunya nilai penting untuk sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Cagar Budaya ditetapkan oleh kebijakan pemerintah.

Kata "cagar", didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan daerah perlindungan untuk melarikan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Upaya untuk melindungit flora dan fauna yang sudah terancam punah disebut pencagaran.

Kata "*Budaya"* dijelaskan dalam KBBI adalah hasil akal budi manusia. Sehingga *cagar budaya* dapat diartikan sebagai benda yang dihasilkan dari akal budi manusia yang perlu dilakukan pencagaran, yang apabila tidak dilakukan perlindungan akan punah atau rusak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 (ayat 1) menjelaskan bahwa benda cagar budaya merupakan "warisan budaya yang bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya baik di darat dan /atau di air

yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan /atau kebudayaan melalui proses penetapan."

Benda cagar budaya merupakan benda yang dibuat oleh manusia, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Benda tersebut merupakan satu kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, dengan usia minimal 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya minimal 50 (lima puluh) tahun, dan dianggap memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; dan benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (UU No. 5/1992 Pasal 1).

UNESCO mendefinisikan kawasan bersejarah adalah sebagai berikut: *"Group of buildings: Group of separate or connected buildings, which because of their architecture, their homogeneity ar their place in landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science" (UNESCO dalam "Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage" 1987).*

Benda alam yang dianggap memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan juga disebut sebagai benda cagar budaya. Benda Cagar Budaya belokasi di suatu tempat yang disebut dengan situs, situs itu sendiri terdapat dalam suatu kawasan yang disebut dengan kawasan cagar budaya.

Benda cagar budaya merupaka salah satu sumber daya budaya yang memiliki nilai tinggi antara lain nilai akademis untuk keperluan kajian ilmu sejarah dan budaya, nilai ideologis dimana menunjukkan kekayaan budaya bangsa serta nilai ekonomis dimana kawasan ini dapat dijadikan menjadi destinasi wisata untuk menghasilkan devisa negara. Candi Borobudur sebagai salah satu cagar budaya yang menjadi tujuan wisata pada tahun 2014 bisa menyumbang devisa sebesar Rp 3 triliun.

Tabel 12

Jumlah Penetapan Cagar Budaya Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1992 tiap Provinsi Tahun 2015

NO	Provinsi	Jumlah
1	DKI Jakarta	80
2	Jawa Barat	100
3	Banten	26
4	Jawa Tengah	72
5	DI Yogyakarta	151
6	Jawa Timur	44
7	A c e h	33
8	Sumatera Utara	29
9	Sumatera Barat	103
10	R i a u	23
11	Kepulauan Riau	15
12	J a m b i	20
13	Sumatera Selatan	9
14	Bangka Belitung	15
15	Bengkulu	20
16	Lampung	7
17	Kalimantan Barat	12
18	Kalimantan Tengah	3
19	Kalimantan Selatan	7
20	Kalimantan Timur	5
21	Kalimantan Utara	2
22	Sulawesi Utara	16
23	Gorontalo	8
24	Sulawesi Tengah	5
25	Sulawesi Selatan	66
26	Sulawesi Barat	-
27	Sulawesi Tenggara	5
28	M a l u k u	14
29	Maluku Utara	21
30	B a l i	24
31	Nusa Tenggara Barat	10

32	Nusa Tenggara Timur	1
33	Papua	-
34	Papua Barat	7
	I n d o n e s i a	**953**

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015

BAB V
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BERBAGAI BIDANG

A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN

Berbagai negara di dunia menghadapi permasalahan akibat fenomena perubahan iklim yang terjadi saat ini. Perubahan iklim memilik dampak negatif dan menimbulkan permasalahan terhadap

semua penduduk dunia karena setiap tahun terjadi kenaikan permukaan air laut, terutama masyarakat yang berada di pesisir laut. Permasalahan lingkungan akan semakin memburuk jika tidak ditangani dengan segera dan juga penerapan strategi yang tidak tepat.

Masyarakat harus diberdayakan agar mampu melakukan pengelolaan yang tepat terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Berikut beberapa upaya yang dapat dilaksanakan:

1) Berkomunikasi dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat merencanakan dan melaksanakan pengelolaan dan pelestarian lingkungan sekitarnya.
2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa atau penyuluhan langsung.
3) Mengajak peran serta masyarakat atau kelompok masyarakat untuk mengelola lingkungan.
4) Memberi penghargaan kepada masyarakat yang sukses melestarikan lingkungan.
5) Mengintegrasikan aliansi mitra strategis untuk menjalankan program pengelolaan lingkungan. Hal ini dilaksanakan dengan cara mengajak kelompok masyarakat terlibat secara aktif dan juga mendukung serta mengakui kelompok masyarakat yang memiliki potensi tawar *(bargaining power)* terhadap pengelolaan lingkungan.
6) Menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan upaya terus menerus sehingga mereka menyadari bahwa mereka merupaka bagian dari lingkungan, sehingga timbuk kearifan lokal dalam mengelola lingkungan, dan secar perlahan diharapkan akan menjadi budaya ”Cinta Lingkungan” yang tumbuh di hati warga masyarakat.

Pengumuman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas perusahaan masuk kategori hitam dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 2017 merupakan suatu langkah pemberdayaan masyarakat di Bidang lingkungan hidup. Langkah ini diharapkan

dapat memberikan efek jera bagi perusahaan yang melanggar ketentuan yang berakibat pada kerusakan lingkungan.

Di sisi lain, Wakil Presiden menyerahkan Penghargaan Proper 2017 Kategori Emas kepada 19 perusahaan di Indonesia yang dinilai sangat baik dalam mengelola lingkungan dan memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan. Penghargaan Proper kategori Emas 2017 diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada 19 perusahaan. Selain kategori emas, KLHK juga memberikan penilaian kategori hijau 150 perusahaan, kategori biru kepada 1.486 perusahaan dan 130 perusahaan masuk kategori merah.

Kementerian LHK melaporkan selama periode 2016-2017, sektor industri di Indonesia telah berhasil menurunkan emisi sebesar 75,7 juta ton dan mengurangi air limbah berbahaya sebanyak 536,5 juta ton. Apabila dikonversikan ke nilai uang, maka kita telah berhasil melakukan penghematan sebesar Rp53,1 triliun yang semuanya ini tidak terlepas dari inovasi dunia usaha.

Upaya lain memberdayakan masyarakat di bidang lingkungan, pemerintah telah menerbitkan beberapa Undang-Undang yang mencantumkan kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan istilah tanggungjawab sosial dan lingkungan;

1) UU No. 25 Th. 200 Tentang Penanaman Modal (Pasal 15);
2) UU No. 40 Th. 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74);

Di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dilakukan melalui kegiatan Kemitraan dan Bina Lingkungan (PK-BL) melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007, serta Surat Edaran Meneg BUMN No. SE07/MBU/2008 dan SURAT Edaran Meneg BUMN SE-14/MBU/2008.

Praktek tanggungjawab sosial perusahaan sudah dimulai sejak awal 1990-an oleh PT. Aneka Tambang yang kemudian diinstruksikan oleh pemerintah untuk dipraktekkan oleh semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui kegiatan PUKK

(Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi); yang kemudian juga dihimbau untuk dilaksanakan oleh perusahaan swasta.

Beberapa contoh di bawah ini merupakan program pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan hidup yang cukup berhasil.

a) Program Posdaya PT. Holcim Tbk. Di Cilacap

Program Posdaya pertama kali diperkenalkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman. Program pemberdayaan masyarakat diujicobakan pada beberapa desa di Kabupaten Purbalingga. Hasil uji coba menunjukkan pencapaian yang baik, sehingga program ini diteruskan sampai sekarang ke beberapa Kabupaten di Daerah Tawa Tengah.

Terdapat empat bidang yang termasuk dalam Program POSDAYA yaitu bidang kesehatan, ekonomi atau kewirausahaan, pendidikan, serta bidang lingkungan. Bidang yang paling baru pada program posdaya adalah bidang lingkungan. Alasan paling utama lahirnya bidang lingkungan disebabkan penduduk yang kurang sadar atau bahkan tidak memperdulikan kerusakan dan permasalahan lingkungan. Selain itu, alasan lain munculnya bidang ini adalah sebagian besar warga desa mempunyai pekarangan luas tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Program ini mengajak masyarakat agar menanami lahan pekarangan yang bisa memberi nilai tambah untuk masyarakat.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini sudah mempertimbangkan kelestarian lingkungan, tidak hanya mengeksploitasi alam saja. Perusahaan harus memberi solusi dan mengatasi permasalahan lingkungan yang muncul akibat kegiatan produksi perusahaan.

Program Posdaya yang dilakukan oleh PT Holcim difokuskan pada pemberdayaan masyarakat yang berbasis 4 (empat) pilar, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi serta lingkungan.

Pelaksanaan program Posdaya terdiri dari dua tahapan, yaitu analisis kebutuhan kemudian pelaksanaan sosialisasi ke warga yang akan dijadikan sebagai subjek pelaksanaan program Posdaya.

Program pemberdayaan di bidang lingkungan yang pertama kali oleh dilaksanakan oleh PT Holcim Indonesia yaiut mengadakan kerjabakti secara rutin dan berkala. Dalam menjalankan program pemberdayaan lingkungan PT Holcim mengupayakan langkah lain, antara lain pemberian berbagai jenis pohon dan tanaman yang bisa dikonsumsi masyarakat, seperti seledri, terong, tomat maupun cabe. Bantuan yang diberikan adalah bibit, tanah, sampai pada polybagnya Upaya ini dilakukan selain untuk mengurangi pengeluaran masyarakat terhadap keperluan rumah tangga, juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih segar serta hijau. Program ini diberlakukan bagi masyarakat dan desa yang sudah membentuk program Posdaya di desanya.

Upaya lain untuk memberdayakan masyarakat di bidang lingkungan adalah membuat Bank Sampah Mandiri. Program Bank Sampah mandiri ini bertujuan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam mengelola sampah. Langkah-langkahnya mulai dari pemilahan sampah (organik dan an-organik), mendirikan warung sampah serta bank sampah untuk menghimpun sampah dari masyarakat. Program ini diterapkan seperti proses menabung di bank, kalauu di bank konvensional, yang ditabung adalah uang, tetapi di bank sampah mandiri ini, masyarakat menabung sampah. Tabungan sampah tersebut pada satu saat tertentu dapat diganti menjadi sembako. Sampah yang ditabung oleh masyarakat akan digunakan kembali melalui *Re-Use* dan *Re-Cycle* menjadi kerajinan yang mempunyai nilai ekonomi.

b) Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir Tambakrejo Kelurahan Tanjung Mas, Semarang

Penelitian Akbari, dkk (2016)melaporkan bahwa warga Tambakrejo yang membentuk kelompok peduli lingkungan untuk mengelola lingkungan pesisir berperan sangat penting dalam pemberdayaaan masyarakat di bidang lingkungan. Kelompok peduli lingkungan yang terbentuk di Semarang antara lain Kelompok Prenjak di Tapak Kelurahan Tugurejo dan Kelompok Camar di Tambakrejo Kelurahan Tanjung Mas. Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir dilakukan dengan program utama menanam ekosistem mangrove yang kemudian diterapkan konsep *ecoedu* wisata. Konsep ini bisa memberdayakan anggota kelompok dan penduduk yang berada di sekitarnya.

Luas wilayah pesisir pantai yang terdapat di kota Semarang sebesar 9.111,28 hektar. Wilayah pesisir ini berada di empat yang kecamatan yaitu Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Genuk. Berdasarkan analisis resiko kerusakan pantai yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, kerusakan lingkungan wilayah pesisir Kota Semarang dikategorikan tinggi yang menyebakan timbulnya berbagai permasalahan antara lain penurunan tanah serta tingginya tingkat erosi pantai. Tingkat erosi yang tinggi dapat mengakibatkan mundurnya garis pantai setiap tahunnya dan akan menyebabkan kerusakan tambak ikan milik masyarakat, pemukiman, jalan, serta infrastruktur lainnya.

Wilayah pesisir Kota Semarang secara sosial memiliki kekuatan pada lokal based community-nya. Khususnya dalam hal pengelolaan ekosistem mangrove. Kota Semarang mempunyai banyak kelompok pelestari lingkungan pesisir yang berfokus pada program rehabilitasi ekosistem mangrove. Kelompok-kelompok ini berperan sebagai mitra Pemerintah Kota Semarang dalam upaya konservasi lingkungan pesisir. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat *(civil society),* di Kota Semarang cukup tinggi.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap kelompok pelestari lingkungan pesisir antara lain:

1) Terdapat tiga kantor dinas yang berperan melakukan kepada masyarakat yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan terkait konservasi, Dinas Kehutanan dan Pertanian terkait penyediaan dan penanaman bibit, serta Badan Lingkungan Hidup terkait pengelolan lingkungan sekitar.
2) Dinas Kehutanan dan Pertanian Kota Semarang menyediakan dana kepada Kelompok-kelonpok melakukan studi banding ke Mangrove Center yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur.
3) Dinas Pariwisata Kota Semarang memberikan pelatihan guide tour, studi banding ke berbagai daerah serta dukungan penuh terhadap program ecoedu wisata mangrove di Tapak.
4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi melatih kelompok tersebut terkait budidaya mangrove. Seperti contoh, LSM Bintari mendampingi kelompok untuk penanaman dengan konsep ecoedu wisata dan juga membangun jaringan ke pihak-pihak terkait.
5) Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mennguatkan dari sisi hukum misal meendamping pada kasus terkait reklamasi serta pencemaran yang merusak ekosistem mangrove.
6) *Mercy Corps* melatih di bidang wirausaha agar masyarakat lebih berdaya dan semakin mandiri. Program Mercy Corps antara lain mengelola hasil mangrove dan membangung innfrastuktur jembatan penghubung

Berbagai program tersebut sejauh ini berhasil memberdayakan masyarakat. Kelompok tersebut sudah menanam bibit mangrove di wilayah pesisir hingga 2015 mencapai 600.000 batang. Tujuan program ini adalah untuk melindungi kawasan pesisir dari kerusakan dan pencemaran. Upaya konversasi ini dilaporkan terus meningkat setiap tahun.

Program konservasi tengan menerapkan *ecoedu wisata mangrove* juga dinilai sukses. Program ini meningkakan pengetahuan masyarakat tentang pelestarian alam dan juga dapat

berwisata. Konsep ini ecoedu wisata merupakan program yang melibatkan masyarakat untuk merencanakan dan menjalankan program konservasi sehingga ditemukan wilayah pesisir yang hijau dan sehat. Dampak positif lainnya dari penerapan konsep ecoedu adalah meningkatnya perekonomian penduduk setempat khususnya nelayan, pemilik tambak ikan, serta ibu rumah tangga yang berada di daerah pesisir. Nelayan bisa menyewakan perahunya jika sedanga ada program menanam mangrove. Harga yang dikenakan untuk satu perahu sebesar 250.000 rupiah. Usaha ini sangat membantu nelayan karena menjadi penghasilan tambahan.

c) Membimbing masyarakat cara membangun ketahanan pangan dan praktik bertani yang lebih ramah lingkungan di dusun Nanga Bian Propinsi Kalimantan Barat

Pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar sangat merugikan banyak aspek yaitu lingkungan, sosial dan kesehatan. Dampak pembakaran hutan inilah yang dirasakan oleh penduduk dusun Nanga Bian Propinsi Kalimantan Barat. Pemerintah harus mengupayakan pengelolaan lahan yang dibuka mernjadi lahan pertanian yang berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan ini selain dapat melestarikan lingkungan juga dapat menciptakan ketahanan pangan rumah tangga dan warga.

Salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat telah dilakukan oleh anak perusahaan *Golden Agri-Resources (GAR*) yaitu PT Paramitra Internusa Pratama (PIP). Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan ini berlokasi di Dusun Nanga Bian Propinsi Kalimantan Barat. Warga dusun dilibatkan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan program. Terdapat dua aliran sungai yang mengelilingi dusun Nanga Bian yaitu sungai Bian dan Kenepai. Sehingga dusun ini merupakan kawasan berair. Selain itu dusun ini juga dikelilingi hamparan rawa-gambut. Kondisi ini menyebabkan masyarakat

tidak mudah untuk mendapat sayuran dari daerah terdekat. Banjir akan dating jika musim hujan tiba yang menyebabkan jalut transportasi terputus akibatnya dusun ini terpencil dari daerah sekelilingnya hingga berbulan-bulan. Sebaliknya, bila musim kemarau air sungai menjadi sangat sedikit dan hamparan rawa-gambut kering. Hal ini menyebabkan kendaran bermotor sulit untuk menjangkau dusun ini karena banyak debu.

Perusahaan GAR mencanangkan program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian terutama penanaman sayuran agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu kendala yang dihadapi perusahaan ini adalah sulitnya mengajak petani dan warga sekitar untuk menghentikan pembukaan lahan untuk pertanian dengan cara pembakaran lahan yang selama ini sudah dilakukan. Keengganan petani ladang dan warga untuk mengubah cara tradisional disebabkan cara bercocok tanam tradisional yang selalu dilakukan cocok, murah dan mudah. Dilaporkan sebanyak 20 *titik* lebih kebakaran terjadi di ladang-ladang pertanian dusun Nanga Bian pada tahun 2016.

Perusahaan GAR memberdayakan masyarakat melalui program Kebun Sayur Pekarangan (KSP). Program ini telah berhasil dikembangkan secara berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan baru. Solusi alternatif yang ditawarkan adalah pemanfaatan lahan halaman rumah warga dengan pengelolaan yang ramah lingkungan. Selain berhasil mengurangi pengeluaran rumah tangga, program ini juga berhasil menambah penghasilan masyarakat karena warga menjual sayur-sayuran yang mereka tanam ke masyarakat dusun lain. Pencapaian ini sesuai dengan tujuan program pemberdayaan masyarakat perusahaan GAR di bidang lingkungan yaitu Kebijakan Tanpa Bakar. Pendekatan terhadap masyarakat yang inovatif serta program konservasi berbasis masyarakatini selanjutnya dikembangkan di perkebunan-perkebunan GAR lainnya di Propinsi Kalimantan Barat.

d) Pengelolan Bank Sampah di Kelurahan Sei Jang, Kota Tanjung Pinang

Mengelola sampah seperti tertuang dalam Perda Nomor 14 Tahun 2009 Kota Tanjungpinang adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah serta masyarakat. Pengelolaan sampah yang dimaksud adalah memelihara kebersihan lingkungan masing-masing, yang dapat dilaksanakan secara sendiri atau gotong royong; memilah sampah berdasarkan jenis, menyediakan tempat sampah yang cukup di berbagai lokasi di lingkungan sekitar.

Program Bank Sampah adalah satu dari beberapa program yang dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi warga untuk membuat lingkungan sehat dan bersih. Bank sampah merupakan sarana pengumpulan bermacam-macam sampah yang sudah dipilah berdasarkan jenis. Masyarakat yang sudah mengumpulkan dan memilah sampah selanjutnya menyetor sampah tersebut ke tempat bengkel kerja lingkungan yang dikenal dengan sebutan Bank Sampah. Sampah yang disetor akan dicatat sebagai tabungan, dan pada suatu waktu tertentu bisa diambil atau dicairkan. Sistem ini dilakukan dengan mengikuti prinsip perbankan, dimana masyarakat yang menyetor sampah akan memperoleh buku tabungan dari petugas.

Prinsip program Bank sampah adalah mengelola sampah dengan basis rumah tangga, dan setiap rumah tangga yang menyetor dan memilah sampah diberikan bayaran uang tunai atau *voucher*. Pemilahan sampah yang disetor ke bank sampah dibagi atas organik dan non organik. Sampah organik merupakan sisa-sisa sayuran atau makanan rumah tangga. Sedangkan sampah nonorganik berupa plastik, besi dan lain sebagainya. Dengan pemilahan tersebut dapat dilakukan pendaurulangan sampah. Sampah bahan organik umumnya dibuat menjadi kompos dan biogas. Sedangkan sampah nonorganik dibuat menjadi berbagai macam bernilai ekonomi berupa tas, sandal, hiasan dan lain sebagainya.

Program Bank sampah yang diterapkan dinilai mampu menurunkan jumlah sampah dilingkungan warga serta di tempat pembuangan akhir (TPA). Bank sampah merupakan program yang cocok untuk diterapkan di berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan, karena selain berhasil melestarikan lingkungan, program ini juga bermanfaat memperbaiki perekonomian masyarakat.

Beberapa upaya pemerintah Sei Jang agar program Bank sampah berhasil adalah sebagai berikut :

- Sosialisasi program secara terus menerus. Sosialisai dapat dilakukan di kegiatan pertemuan warga, arisan, wirit, dan gotong royong. Di kelurahan Sei Jang, sosialisasi melalui aktifitas warga paling sedikit dilakukan sebulan sekali.
- Pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan partsipasi warga dilakukan secara berkala di Kota Tanjungpinang.
- Bantuan sarana dan fasilitas seperti timbangan analog, buku tabungan bank sampah, kantong sampah serta mesin pemotong rumput kepada masyarakat.

B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG SOSIAL EKONOMI

1. Sektor Pertanian

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor pertanian juga mempunyai keterkaitan yang kuat antara hulu serta hilir. Tetapi sejauh ini partisipasi masyarakat maupun swasta masih tergolong rendah untuk terlibat di sektor ini. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain pemanfaatan peluang ekonomi yang mampu merubah dan memberikan kesejahteraan masyarakat masih belum terlalu menjanjikan. Berbagai upaya pemerintah sudah dilakukan untuk meningkatkan aktifitas sektor pertanian sepert menyediakan sarana

dan prasarana fisik pendukung pertanian dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha pertanian.

Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan upaya perlindungan terhadap petani. Pemberdayaan petani didefinisikan dalam UU No 19 2013 dalam Pasal 1 Ayat 2 merupakan segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Petani perlu diberikan perlindungan serta pemberdayan supaya petani memiliki kapasitas untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih sejahtera.

Salah satu bentuk program pemberdayaan petani adalah untuk membantu modal usaha pertanian. Selain itu mendorong perkembangan usaha di hulu, hilir dan jasa penunjang dalam pembangunan pertanian, mendorong penguasaan teknologi, melatih petani serta menguatkan kelembagaan petani.

Pemberdayaan pelaku usaha tani telah dirintis melalaui berbagai model pemberdayaan masyarakat antara lain melalui proyek Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (P4K), *Participatory Integrated Development in Rainfed Area* (PIDRA) dan pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Kementerian Pertanian yang dahulu disebut Departemen Pertanian telah melakukan upaya peningkatan kemandirian masyarakat melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) sejak tahun 2005. Sebagian besar LM3 tersebut berbasis keagamaan seperti : Pondok Pesantren, Seminari, Paroki, Pasraman, Vihara, Subak dan lain sebagainya.

Program Pemberdayaan LM3 berbasis agribisnis ini diharapkan dapat mempercepat dan mendorong tumbuhnya LM3 sebagai embrio pembentuk inti kawasan agribisnis, meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar lokasi untuk mengembangkan

agribisnis serta mendorong terbentuknya jaringan kelembagaan LM3 di bidang agribisnis.

Bentuk lain pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian adalah melalui fasilitasi Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Pemanfaatan dana PMUK ini dilakukan dalam format bergulir dalam rangka pemantapan kelembagaan kelompok menjadi lembaga usaha yang dapat meningkatkan kewirausahaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif.

Pola pemberdayaan seperti ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kelompok usaha dan mempercepat terbentuknya jaringan kelembagaan pertanian yang akan menjadi embrio tumbuhnya inti kawasan pembangunan wilayah. Fasilitasi penguatan modal usaha kelompok ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat petani, yang dikawal dengan kegiatan terkait yaitu penguatan kelembagaan petani dan peningkatan SDM petani melalui pembinaan, penyuluhan, pelatihan, monitoring, evaluasi, dan lainnya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok adalah:

a. Menguatkan modal pelaku usaha agar mampu mengembangkan usaha pertanian serta ketahanan pangan;
b. Meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku usaha pertanian;
c. Mengembangkan usaha pertanian dan agroindustri di kawasan pengembangan;
d. Meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok;
e. Mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya.

Lembaga keuangan mikro perdesaan merupakan lembaga yang mengelola jasa keuangan yang bertujuan dalam pembiayaan usaha skala mikro di perdesaan baik berbentuk formal ataupun informal yang dibentuk oleh masyarakat atau pemerintah. Kelembagaan dibentuk atas dasar harapan dan cita-cita untuk kemajuan usaha

dan kesejahteraaan penduduk, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Pelayanan yang dilakukan oleh lembaga keuangan adalah jasa pinjaman/kredit serta menghimpun dana masyarakat yang terkait dengan persyaratan pinjaman. Beberapa contoh lembaga keuangan mikro yang ditemukan di berbagai daerah antara lain: Credit Union (CU), Baitul Mal Wattanwil (BMT), Pusat Inkubator Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK), Lumbung Petitih Nagari, Kelompok Usaha Mandiri, dan lainnya.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat pertanian yang dilakukan dengan cara menguatkan modal usaha kelompok dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

a. Dana PMUK yang sudah dimanfaatkan dengan benar telah menambah jumlah kelompok petani yang mampu mengelola permodalan sesuai prinsip-prinsip dan kaidah bisnis;
b. Meningkatnya produksi hasil usahatani kelompok yang menerima dana PMUK;
c. Modal bergulir kepada kelompok petani yang lain sehingga dapat menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas;

Kelompok sasaran Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) adalah kelompok yang menjalankan usaha tani yang mengutamakan kelompok terkendala modal usaha dan yang tidak disetujui pinjamannya di lembaga keuangan lain. Kegiatan pemilihan kelompok sasaran serta calon lokasi penerima dana dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. Pemilihan dilaksanakan secara transparan, penetapannya melalui musyawarah yang mengutamakan kepentingan pengembangan usaha pertanian di daerah serta usulan dari warga.

Calon kelompok sasaran penerima dana secara umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. kelompok usaha telah dibentuk paling sedikit 3 tahun serta aktif. Kelompok tersebut tidak baru dibentukan, dapat dipercaya dan bisa mengembangkan usaha melalui

kerjasama kelompok serta jumlah anggota paling sedikit 20 orang.

b. kelompok yang bersangkutan belum pernah mendapat penguatan modal, BLM, BPLM atau fasilitasi dari kegiatan lain pada saat yang bersamaan atau pada tahun-tahun sebelumnya.
c. kelompok yang bersangkutan tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya.
d. anggota kelompok adalah pelaku usaha yang berpotensi dan berminat menjadi penggerak untuk mendorong perkembangan usaha pertanian atau menciptakan ketahanan pangan masyarakat secara luas.
e. anggota kelompok sulit untuk mendapat akses terhadap sumber permodalan komersial, yang menyebabkan kesulitan dalam penggunaan teknologi pertanian yang dianjurkan, serta kesulitan memanfaatkan peluang pasar.

Pemberdayaan kelompok usaha tani juga dilakukan melalui pendampingan oleh Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Swakarsa, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), swasta, LSM dan perguruan tinggi. Kegiatan pendampingan tersebut antara lain mengembangkan kelembagaan, manajerial serta usaha kelompok. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan serta pasca kegiatan. Kegiatan pendampingan tersebut agar disinergiskan dengan kegiatan pendampingan/ penyuluhan pertanian dari pos kegiatan pemberdayaan/penyuluhan.

Salah satu contoh pemberdayaan pelaku usaha tani akan dibahas dalam bab ini adalah Pemberdayaan petani di Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Di Kabupaten Kediri terdapat lahan pertanian seluas 47.786 hektar. Luas ini sebesar 34,5% dari luas total seluas 138.605 Hektar. Hasil pertanian unggulan desa Asmorobangun adalah cabai dan jagung. Desa ini dinilai sangat berpotensi untuk penerapam program pembangunan pertanian berkelanjutan. Selain memiliki lahan

pertanian yang cukup luas, di desa ini juga banyak ditemukan usaha peternakan.

Beberapa hambatan yang dihadapi penduduk desa Asmorobangun dalam menciptakan pembangunan pertanian berkelanjutan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, beberapa kelompok tani yang sudah dibentuk masih kurang aktif, permodalan yang terbatas serta dampak perubahan iklim. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan diatas. Dengan program pemberdayaan masyarakat diharapkan petani lebih mandiri serta permasalahan yang dihadapi dapat teratasi.

Program Pemberdayan Masyarakat Pertanian Berkelanjutan dilakukan Desa Asmorobangun adalah sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi program secara langsung melalui demplot yang dilakukan oleh penyuluh pertanian serta tokoh masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengubah pola pikir petani terkait efek pupuk anorganik terhadap ligkungan serta menjelaskan manfaat pupuk organik. Dengan program ini diharapkan masyarakat mengubah kebiasaan penggunaan pupuk anorganik menjadi pupuk organik untuk kegiatan pertanian.
b. Melatih masyarakat dalam pengolahan limbah ternak serta limbah pertanian. Limbah tersebut diolah menjadi pupuk organik. Selain beberapa jenis limbah pertanian dapat digunakan juga sebagai pakan ternak sapi.
c. Melatih ibu-ibu mengolah hasil pertanian menjadi makanan olahan.
d. Melatih penyusunan AD-ART (Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga) dalam kelompok petani, agar jelas hak dan kewajiban anggota kelompok.
e. Memberikan bantuan dana, penyuluh dan pelatih serta sarana pertanian. Dana yang digunakan bersumber dari APBN dan APBD.
f. Membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang bertujuan untuk pembiayaan usaha petani. Dana yang

dikelola lembaga ini adalah dari Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).

Pelaksana utama program pemberdayaan petani di Desa Asmorobangun adalah pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Kediri. Pegawai tersebut adalah Mantri Tani, tugasnya adalah mengkoordinasikan program yang diberikan dari dinas dengan kelompok tani. Koordinasi yang dilukakan berkaitan terkait dengan perencanaan dan implementasi program yang akan diberikan. Penyuluh pertanian lapangan yang berperan sebagai pendamping teknis akan mendampingi pelaksanaan program yang sudah diberikan kepada kelompok tani.

Selain pegawai dinas pertanian kabupaten Kediri, tokoh masyarakat serta pengurus/anggota Gapoktan juga berperan dalam menjalankan program pemberdayaan petani. Dinas Pertanian Kabupaten Kediri merumuskan Program dan Kegiatan Pemberdayaan. Program tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten dalam kurun 5 (lima) tahun.

Program prima tani serta program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) telah berhasil dilaksanakan di Desa Asmorobangun sebelum tahun 2014.

Pemberdayaan masyarakat melalui Pertanian Berkelanjutan yang sudah dilaksanakan selama ini telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hasil yang dicapai melalui program ini adalah perubahan pola pikir petani menjadi bersedia menggunakan pupuk organik serta ketergantungan penggunaan pupuk anorganik berkurang, melakukan pengolahan limbah pertanian dan limbah ternak menjadi pupuk bokashi atau organik, mampu mengelola Dana PUAP hingga berkembang dan menjadi Juara 1 Tingkat Provinsi, mampu mengadakan sarana produksi dari hasil usaha tani kelompok tani. Pencapaian dari pemberdayaan ini juga berdampak positif pada aspek pertanian berkelanjutan yang terdiri dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

Dampak aspek ekonomi terhadap petani adalah berkurangnya biaya produksi pertanian karena penggunaan pupuk organik yang

diproduksi oleh Gapoktan dan kelompok tani, membantu kekuatan modal petani melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM), perempuan tani melakukan pengolahan hasil pertanian menjadi makanan yang menambah sumber penghasilan keuangan keluarga. Dampak positif pada aspek lingkungan yaitu, pengurangan penggunaan penggunaan pupuk anorganik dan mengganti menjadi pupuk organik membuat tanah tidak tersemar, kesuburan tanah meningkat. Memanfaatkan limbah pertanian menjadi pakan ternak mengurangi pencemaran lingkungan dari sampah.

Dampak positif pada aspek sosial adalah, munculnya rasa kepedulian sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya pusat pelatihan pertanian pedesaan swasdaya. Pusat pelatihan ini bertujuan untuk melatih warga di bidang pertanian. Selain itu, Gapoktan juga memperhatikan lingkungan sosial dengan cara menyimpan keuntungan usaha sebesar 5% yang diperuntukkan sebagai dana sosial dan dana pendidikan. Kelompok tani mempunyai kandang komunal sapi yang mampu menyediakan lapangan kerja. Jumlah ternak sapi yang cukup banyak berhasil menyerap tenaga kerja untuk memellihara sapi. Sistem pembayaran yang digunakan adalah sistem bagi hasil.

2. Sektor Industri dan Ekonomi Kreatif

John Howkins menjelaskan pengertian ekonomi kreatif dalam bukunya *The Creative Economy: How People Make Money From Ideas*, adalah semua aktifitas ekonomi yang menjadikan kreativitas (kekayaan intelektual), budaya dan warisan budaya maupun lingkungan sebagai tumpuan masa depan. Industri kreatif menggunakan kreativitas, keterampilan serta bakat yang dimiliki untuk meningkaktan kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja. Ekonomi serta industri kreatif memadukan ide, seni dan teknologi dan upaya memenuhi permintaan kebutuhan sesuai perkembangan ekonomi pada masa saat ini.

Peran sektor ekonomi kreatif sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia saat ini. Sebelumnya sektor ini masih belum dipertimbangkan secara serius dan masih

sedikit upaya pemerintah untuk mengangkat sektor ini. Hal ini disebabkan pemerintah masih fokus pada sektor manufaktur, fiskal, dan agribisnis sebagai sumber pendapatan negara. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan tercatat bahwa sektor industri kreatif berkontribusi sebesar 104,4 triliun rupiah, atau rata-rata 4,75% terhadap PDB Nasional. Subsektor dari sektor industri kreatif yang dilaporkan memberi sumbangan terbesar yaitu fashion 30%, kerajinan 23% serta periklanan 18 %.

Sektor ekonomi kreatif mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4,4 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 17,6%. Kondisi ini jauh melebihi tingkat pertumbuhan tenaga kerja nasional yang hanya sebesar 0,54%. Tetapi sektor ekonomi kreatif Indonesia dilaporkan saat ini menyumbang untuk perdagangan ekspor hanya sebesar 7 %. Angka ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Korea Selatan dan Singapura yang mempunyai nilai ekspor sektor ekonomi kreatif melebihi 30%.

Industri kreatif di Indonesia harus dikembangkan karena industri kreatif dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan dan menciptakan iklim bisnis yang positif serta membangun citra serta identitas bangsa. Di sisi lain, industri kreatif berbasis pada sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa serta memberikan dampak sosial yang positif. Upaya untuk menggerakkan industri kreatif memerlukan beberapa faktor. Antara lain arahan edukatif, memberikan penghargaan terhadap insan kreatif, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Beberapa Bidang dalam sektor Industri Kreatif yang berkembang di Indonesia diantaranya adalah :

- **Bidang Arsitektur**

Bidang Arsitektur dikelompokkan dalam jenis industri Kreatif yang terkait dengan Design Bangunan, perencanaan Konstruksi bangunan, pengawasan kontruksi dan konservasi Bangunan warisan. Bidang arsitektur meliputi semua aspek

arsitekur. Peranan bidang ini dalam industri kreatif mempunyai dua level yaitu level makro dan level mikro.

Level makro merupakan level yang mengerjakan kontruksi bangunan secara menyeluruh seperti perencanaan pembuatan *Town planning, urban design, landscape architecture*. Level mikro merupakan level yang mengerjakan kontruksi atau renovasi bangunan yang berskala kecil misalnya membuat detail arsitektur taman dan desain interior.

- **Bidang Periklanan**

Bidang periklanan dikelompokkan dalam jenis Industri kreatif yang terkait dengan jasa periklanan. Industri kreatif ini berhubungan dengan pekerjaan produksi serta distribusi iklan. Kegiatannya awal yang dilakukan adalah penelitian pasar serta perencanaan pengembangan iklan tersebut. Pekerjaan yang termasuk dalam sektor periklanan antara lain pembuatan iklan di luar ruangan, memproduksi materi iklan dan proses promosi iklan tersebut.

Upaya promosi sebuah iklan biasanya dilakukan melalui berbagai berupa media cetak, media elektronik. Selain itu, promosi juga dapat dilakukan dengan mencetak dan mengedarkan poster, pamflet serta brosur. Semua kegiatan usaha yang terkait dengan periklanan dikelompokkan dalam industri kreatif sektor periklanan.

- **Bidang Pasar Barang Seni**

Bidang pasar barang seni dikelompokkan dalam jenis industri kreatif yang terkait dengan kegiatan jual beli barang-barang asli unik dan langka yang memiliki nilai seni yang tinggi. Kegiatan jual beli umumnya dilakukan dengan cara lelang, membuka galeri barang antic serta penjulan *on line*. Beberapa contoh yang termasuk barang seni adalah berbagai jenis alat musik antik, automobile, film, seni rupa serta lukisan.

- **Bidang Kerajinan**

Bidang kerajinan dikelompokkan dalam jenis industri kreatif yang di terkait dengan proses kreasi, produksi serta

distribusi dari suatu produk kerajinan. Bidang ini ditekuni para tenaga pengrajin mulai dari Design sampai proses hasil penyelesaiannya. Berbagai produk kerajinan dihasilkan antara lain dengan pemanfaatan serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, dan kayu yang kemudian diciptakan menjadi karya seni kerajinan yang memiliki nilai jual yang tinggi.

- **Bidang Design**

Sektor design dikelompokkan dalam jenis industri kreatif yang berkaitan dengan pembuatan design grafis, design interior serta design produk. Bidang antara lain mengerjakan design kemasan suatu produk serta jasa pengepakan.

- **Bidang Fashion**

Bidang fashion dikelompokkan dalam jenis industri kreatif yang berkaitan dengan produksi pakaian, model serta aksesoris pakaian. Selain itu, konsultasi model serta jasa pendistribusian produk fashion juga termasuk dalam bidang ini.

- **Bidang Video, film dan Fotografi**.

Bidang ini dikelompokkan dalam jenis industri kreatif yang berkaitan dengan pembuatan suatu video, film serta jasa fotografi. Bidang ini mencakup banyak aspek antara lain produksi suatu film hingga pemasaran.

- **Bidang Kuliner**

Bidang ini dikelompokkan dalam jenis industri kreatif yang berkaitan dengan produksi makanan hingga pemasaran. Industri kreatif kuliner Indonesia sudah mempunyai pasar tersendiri baik di indonesia maupun di luar negeri. Bidang ini antara lain adalah pembuatan kuliner khas daerah serta pemasaran produk khas daerah di indonesia. Kuliner Indonesia sudah memiliki pasar yang luas dan juga sudah bisa bersaing dengan pasar ritel modern. Sektor kuliner menjadi industri kreatif yang cukup menjanjikan saat ini karena bidang ini memiliki keuntungan yang cukup tinggi.

- **Bidang Industri Kreatif Berbasis Teknologi**

Industri kreatif saat ini sudah tidak hanya mengandalkan kreatifitas secara manual, tetapi sudah sudah banyak yang berbasis teknologi.

Jenis Industri Kreatif Teknologi

- ***Industri Permainan***

Industri permainan merupakan salah satu jenis industri kreatif berbasis teknologi. Industri ini berkaitan dengan kreasi permainan, produksi permainan. Permainan yang diciptakan bukan hanya untuk hiburan tetapi bisa juga memberikan pengetahuan serta ketangkasan otak.

- **Industri Musik**

Industri musik terkait dengan, penciptaan musik, komposisi sebuah lagu, arransement lagu sampai proses produksi atau rekaman. Software yang digunakan untuk mengolah musik sudah banyak ditemukan saat ini antara lain PC atau laptop. Hal ini menyebabkan industri kreatif musik di indonesia mengalami peningkatan.

- **Industri layanan komputer serta perangkat lunak**

Industri layanan komputer serta perangkat lunak terkait dengan pengembangan suatu teknologi yang mencakup, jasa layanan komputer, pengolahan data, pembuatan website, periklanan berbasis internet, desain sistem dan desain portal termasuk perawatannya.

Pertumbuhan Industri Kreatif di Berbagai Sektor

Pertumbuhan industri kreatif meningkat tetapi bervariasi di berbagai sektor. Industri kreatif mempunyai peranan yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi secara global, baik ekonomi makro maupun mikro. Pada tabel berikut menunjukkan pertumbuhan industri dan ekonomi kreatif tahun 2011-2015.

Tabel 13
Perkembangan Ekonomi Kreatif Dari Berbagai Sektor Dari
Tahun 2011-2015

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1	Industri Makanan dan Minuman	5,24%	5,31%	5,14%	5,32%	5,61%
3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,38%	1,35%	1,36%	1,32%	1,21%
4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,28%	0,25%	0,26%	0,27%	0,27%
5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,76%	0,70%	0,70%	0,72%	0,67%
6	Industri Furnitur	0,28%	0,26%	0,26%	0,27%	0,27%
7	Ekspor Kerajinan Tangan	–	15.54%	17.77%	20.18%	21.72%
8	fashion dan kerajinan		44,3%	24,8 %	–	–
9	Industri Periklanan	15%	20%	–	–	–

Sumber: BPS.go.id, diolah

Kontribusi Industri Kreatif

Industri kreatif di Indonesia berkontribusi positif dalam meningkatkan perekonomian nasional. Peningkatan jumlah pelaku industri kreatif di indonesia sangat signifikan, dan berkontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

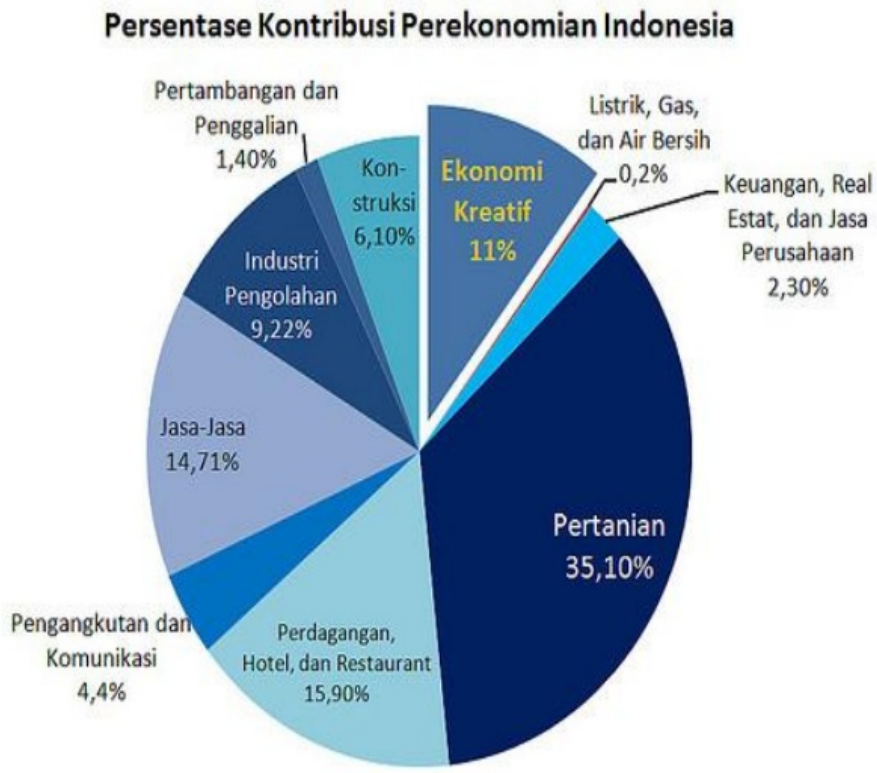

Gambar 6. Persentase Kontribusi Perekonomian Indonesia
Sumber : BPS.go.id

Berbagai daerah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan industri kreatif yang meningkat pesar. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri kreatif mempunyai potensi yang tinggi untuk dikembangkan di Indonesia. Komoditi ekspor dari sektor industri kreatif juga meningkat setiap tahun. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan industri kreatif di Indonesia antara lain:

- *Kreativitas*

Kreativitas yang tinggi adalah hal yang mutlak dimilik dalam pengembangan industri kreatif. Di Indonesia, pelaku industri kreatif umumnya adalah anak muda yang memiliki kreativitas dan ketrampilan tinggi serta tenaga yang masih prima . Hal ini salah satu penyebabnya tumbuhnya industri kreatif di Indonesia.

- *Kemajuan Teknologi*

Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi industri kreatif tanah air. Di Indonesia, dukungan teknologi dan jaringan internet sudah banyak diupayakan oleh pemerintah di berbagai daerah. Teknologi ini merupakan sarana mempermudah produksi bagi pelaku industri kreatif menengah dan besar.

- *Media sosial*

Media sosial berperan sangat siginifikan bagi pelaku bisnis di semua sektor terutama sektor industri kreatif. Pemasaran produk sangat efektif menjangkau daerah-daerah bahkan negara lain. Keberhasilan media sosial dalam industry kreatif karen aumumnya peminat produk suatu daerah adalah daerah lain atau negara lain. Pemasaran ini selain murah juga mudah dilakukan karena tidak memerlukan keahlian yang sangat tinggi.

Berikut beberapa upaya yang harus dilaksanakan Pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Tanah Air:

1. Pemberian insentif agar pertumbuhan industri kreatif berbasis, budaya, kerajinan, seni dan teknologi terpacu. Insentif tersebut meliputi perlindungan terhadap produk budaya, kerajinan, seni dan teknologi. Akses untuk mendapat modal pengembangan, sarana pemasaran dan promosi ke berbagai daerah sampai kemancanegara.

Pemerintah saat ini masih memberlakukan suku bunga perbankan yang masih cukup tinggi yakni mencapai 13 hingga 20 % bagi pelaku usaha. Angka ini cukup tinggi jika dibandingkan pemerintah China dengan suku bunga bank hanya sekitar 6%. Suku bunga yang tinggi ini menyebabkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang umumnya bergerak di sektor industri kreatif menjadi sulit untuk mengembangkan usaha. Dampak yang umum ditemukan adalah terbatasnya jumlah barang yang diproduksi oleh pelaku usaha.

2. Menyusun *roadmap* industri kreatif yang melibatkan berbagai kementerian dan stakeholder terkait. Roadmap tersebut

bertujuan untuk menciptakan industri-industri kreatif tertata rapi. Dengan demikian pemerintah bisa lebih intensif dan komprehensif menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan desain, peningkatan kualitas produk serta pengembangan pasar. Selain itu jaminan serta perlindungan hukum bagi karya industri kreatif juga harus diberikan pemerintah bagi pelaku usaha. Jaminan serta perlindungan hokum merupakan masalah yang penting dalam usaha industry kreatif karena jika tidak ada maka kepemilikan hasil karya industri bisa dipatenkan oleh orang lain. Sebagai contoh, pakaian khas Indonesia Batik pernah dinyatakan milik negara Malaysia.

3. Pembentukan sarana atau lembaga perkumpulan Industri Kreatif Indonesia. Di Indonesia sudah terbentuk satu perkumpulan para pelaku usaha industry kreatif yaitu *Indonesian Creative Council*. Para pelaku industri kreatif Indonesia bisa melakukan pertemuan dan berdiskusi dalam pengembangan industri kreatif masing-masing melalui lembaga ini. Lembaga ini juga mengidentifikasi kebutuhan para pelaku industri kreatif untuk meningkatkan industrinya. Campur tangan dan dukungan pemerintah untuk membina agar menjadi pelaku industri kreatif yang lebih besar masih sangat diperlukan terutama bagi pelaku usaha UMKM yang bergerak di sektor ekonomi kreatif.

Presiden Republik Indonesia pada pertengahan tahun 2015 menyatakan bahwa ekonomi kreatif harus dijadikan sebagai sektor utama untuk peningkatan perekonomian Indonesia. Pernyataan tersebut adalah untuk menegaskan isi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2015. Kemudian dibentuk lembaga baru non-Kementerian bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia merupakan tanggung jawab Bekraf. Bekraf berperan untuk membantu presiden dalam perumusan, penetapan pengkoordinasian, serta sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi

kreatif. Perpres tersebut juga menjelaskan bahwa pimpinan tertinggi Bekraf adalah kepala badan dan dibantu seorang wakil, sekretaris utama, dan para deputi. Bekraf mempunyai enam deputi. Deputi-deputi tersebut adalah Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan; Deputi Akses Permodalan; Deputi Infrastruktur; Deputi Pemasaran; Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi; dan Deputi Hubungan Antar- Lembaga dan Wilayah.

Bekraf mempunyai visi membangun Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam ekonomi kreatif pada 2030 nanti. Untuk mencapai visi tersebut, Bekraf merancang enam misi besar, yaitu:

a. Menyatukan seluruh aset dan potensi kreatif Indonesia untuk mencapai ekonomi kreatif yang mandiri.
b. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif.
c. Mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional.
d. Membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala aspek yang berhubungan dengan ekonomi kreatif.
e. Membangun kesadaran dan apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk perlindungan hukum terhadap hak cipta.
f. Merancang dan melaksanakan strategi yang spesifik untuk menempatkan Indonesia dalam peta ekonomi kreatif dunia.

Bekraf juga menetapkan ada 16 subsektor dari industri kreatif yang menjadi fokus untuk dikelola dan dikembangkan. Setiap deputi kemudian menerjemahkan visi dan misi di atas melalui berbagai program unggulan yang bisa diimplementasikan dalam konteks 16 subsektor tersebut. Terbentuknya Bekraf merupakan optimisme pemerintah bahwa ekonomi kreatif pasti akan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Inilah awal tonggak baru ekonomi kreatif Indonesia.

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data statistik ekonomi kreatif 2016

yang terdiri dari data makro ekonomi kreatif, yakni PDB, tenaga kerja, dan ekspor, serta hasil dari Survei Khusus Ekonomi Kreatif. Dari hasil data tersebut, dalam lima tahun terakhir, yakni 2010-2015, besaran PDB ekonomi kreatif mengalami kenaikan dari Rp 525,96 triliun menjadi Rp 852,24 triliun atau meningkat rata-rata 10,14% per tahun. Nilai ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional berkisar 7,38% sampai 7,66%, dengan sub sektor dominan yakni kuliner, fashion, dan kriya. Laju pertumbuhan PDB ekonomi kreatif 2010-2015 berkisar 4,38% sampai 6,33%. Target Bekraf mendorong pertumbuhan PDB ekonomi kreatif mencapai 6,75% dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 17 juta orang serta nilai ekspor produk kreatif mencapai angka US$ 21,5 miliar pada 2019.

Sektor ekspor komoditi ekonomi kreatif juga meningkat 6,60% atau sebesar US$ 19,36 miliar, dibandingkan dengan 2014 yang mencapai US$18,16 miliar. Tiga sub sektor yang memiliki kontribusi terbesar dari keseluruhan ekspor komoditi ekonomi kreatif adalah fashion 56,27% kemudian kriya 37,52%, dan kuliner 6,09%.

Tiga negara tujuan ekspor komoditi ekonomi kreatif terbesar pada tahun 2015 adalah Amerika Serikat (AS) 31,72% kemudian Jepang 6,74%, dan Taiwan 4,99%. Sedangkan, untuk sektor tenaga kerja ekonomi kreatif 2010-2015 mengalami pertumbuhan sebesar 2,15%. Jumlah tenaga kerja ekonomi krestif pada tahun 2015 sebanyak 15,9 juta orang, dengan *share* sebesar 13,90%.

3. Sektor Pariwisata

Keanekagaman etnis, suku bangsa, bahasa, budaya, adat istiadat, dan berlimpahnya potensi alam Indonesia merupakan potensi yang sangat menguntungkan untuk mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. Pariwisata yang dikembangkan pada suatu wilayah bisa menimbulkan dampak positif ataupun negatif. Dampak tersebut mempengaruhi keadaan fisik atau mengubah aspek sosial ekonomi penduduk yang berada di sekitar obyek wisata (Soekadijo, 1995).

Konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan harus diterapkan dalam pembangunan kepariwisataan. Beberapa model pengembangan berikut dapat diterapkan agar pembangunan kepariwisataan berlandaskan pembangunan berkelanjutan.

- Pengembangan pariwisata sebaiknya memiliki orientasi jangka panjang serta menyeluruh *(holistic)* dimana pengembangan dilakukan bukan hanya mengeksploitasi alam tetapi juga harus menjaga kelestarian alam sebagai objek wisata agar generasi berikut tetap bisa menikmati potensi alam.
- Mengembangkan pariwisata yang cocok dengan karakter wilayah, kondisi lingkungan, konteks sosial serta dinamika budaya.
- Menciptakan keselarasan dan sinergitas antara kebutuhan wisatawan dan penyedia oleh masyarakat local. Keselaran dan sinergitas diharapkan akan menciptakan hubungan timbal balik serta saling menghargai nilai, adat istiadat, kebiasaan, warisan dan budaya.
- Memanfaatkan sumber daya alam sebagai objek wisata harus mempertimbangan batas kemampuan daya dukungnya. Mengelola objek wisata harus berprinsip *ecoefficiency (reduce, reuse, dan recyle)* agar tercipta *ecoeffectivity (redistribute, reactual)*.
- Pengembangan pariwisata yang dikelola tanggap terhadap perubahan yang terjadi pada permintaan atau pasar serta penawaran atau produk.

Undang-undang No.10 Tahun 2009 menjelaskan bahwa prinsip pembangunan kepariwisataan adalah memberdayakan masyarakat sekitar objek wisata melalui pemberian hak dan peran kepada warga agar terlibat dalam proses pembangunan kepariwisataan serta memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; serta membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Hasil penelitian Goodwin pada tahun 1996 menemukan Pariwisata di bahwa umumnya masyarakat lokal dan nasional di negara-negara berkembang menganggap bahwa kegiatan pariwisata tidak memberi dampak nyata terhadap perbaikan ekonomi. Hal ini terjadi karena pada umumnya pelaku usaha kepariwisataan berskala besar dimonopoli oleh pengusaha besar yang mempunyai modal serta sumber daya lainnya. Oleh karena itu, peran dan campur tangan pemerintah sangat diperlukan agar tercipta pengelolaan pariwisita bebasis masyarakat agar manfaat pengembangan pariwisata bisa dinikmati warga sekitar.

Pembangunan pariwisata yang dilakukan dengan prinsip melibatkan partisipasi warga lokal secara langsung atau tidak langsung pada pengembangan dan menjalankan progam kepariwisataan disebut sebagai pariwisata berbasis masyarakat *(Community based tourism)*. Kriteria pengembangan pariwisata jika warga setempat memegang sangat penting dalam kegiatan mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan. Penerapan prinsip ini adalah melalui pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam manajemen serta pembangunan pariwisata sehingga tercipta pengelolaan yang demokratis. Hasil keuntungan dari kegiatan usaha pariwisata juga dibagai secara terbuka dan adil untuk warga setempat yang terlibat.

Keterlibatan masyarakat serta menempatkan masyarakat sebagai pelakasana utama merupakan paradigma baru pembangunan yang saat ini dicanangkan di berbagai sektor pembangunan. Paradigma ini disebut paradigman pembangunan berkelanjutan (*sustainable development paradigm*). Oleh karena itu pengembangan pariwisata berbasis masyarakat pariwisata juga termasuk dalam paradigma pembangunan berkelanjutan. Pariwisata berbasis masyarakat adalah kesempatan agar seluruh potensi serta dinamika masyarakat bergerak, sehingga dapat menurunkan monopoli pengusaha pariwisata berskala besar.

Pembangunan kepariwisataan akan terwujud apabila upaya memberdayakan masyarakat lokal merupakan komitmen utama dalam pengembangan kepariwisataan. Beberapa hal penting yang

harus dipertimbangkan untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan adalah terpeliharanya kualitas sumber daya lingkungan *(quality of resources)*, terciptanya pengalaman wisata pengunjung yang berkualitas *(quality of visitor satisfaction)*, serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat lokal *(quality of local community)*. Pengembangan masyarakat dan pengembangan pariwisata menurut Inskeep (1991), terdapat Komponen-komponen pengembangan pariwisata yang terkait dengan perencanaan pariwisata menurut Inskeep (1991) adalah daya tarik wisata yang meliputi wisata alam, keunikan budaya, serta daya tarik lainnya; ketersediaan akomodasi berupa hotel dan jenis fasilitas lainnya yang berhubungan dengan pelayanan terhadap wisatawan yang menginap; fasilitas dan pelayanan wisata lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata; fasilitas dan layanan tranportasi yang mencakup transportasi darat, laut, dan udara; infrastruktur lainnya seperti penyediaan air bersih, tenaga listrik, telekomunikasi, dan lainlain; elemen institusi yang terkait dengan pengembangan pariwisata, elemen ini penting untuk mengatur dan merencanakan program-program yang dapat meningkatkan kegiatan pariwisata.

Peran dan keterlibatan warga dalam proses perencanaan pengembangan kepariwisataan adalah sebagai berikut:

1. mendukung semua kegiatan para petugas perencana mulai dari identifikasi wilayah hingga pembuatan keputusan.
2. menyumbang pemikiran dan pengetahuan tentang kondisi lingkungan yang akan dijadikan objek wisata.
3. mengawasi dan memantau jalannya perencanaan sehingga hak-hak warga setempat dapat dipenuhi dalam penetapan keputusan.
4. mengawasi pengembangan kepariwisataan yang dilakukan oleh pengusaha besar. Pengusahan diwajibkan agar memprioritaskan pemasaran produk penduduk setempat serta mengutamakan warga setempat menjadi tenaga kerja.

Penduduk setempat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan kepariwisataan, yang mencakup

penyampaian saran, pendapat serta pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Memberdayakan masyarakan terbukti telah berhasil dalam peningkatan perekonomian, sosial serta transformasi budaya.

Potensi kunjungan wisata dapat ditingkat melalui pemberdayaan masyarakat dalam hal filosofi hidup, pendidikan, keterampilan, sikap, tata krama, adat, aturan bermasyarakat, dan penampilan.

✓ Filosofi hidup

Filosofi pembangunan kepariwisataan sebaiknya selaras dengan filosofi penduduk yang berada disekitar objek wisata. Filosofi yang tidak selaras kemungkinan bisa menjadi hambatan dalam pengembangan kepariwisataan. Pola pikir warga yang tidak tepat tentang pengunjung atau wisatawan sebaiknya diluruskan. Sebagai contoh, masih banyak ditemukan bahwa warga setempat menganggap pengunjung/wisatawan adalah saingan. Perlu upaya untuk mengubah pola piker ini agar warga menganggap wisatawan sebagai hal yang menguntungkan atau sumber penghasilan. Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan sosialisasi tentang manfaat kegiatan pariwisata terhadap warga. Dalam kegiatan ini dijelaskan kepada masyarakat bahwa wisatawan yang berkunjung dapat meningkatkan kesejahteraan warga setempat, selain wisatawan akan berbelanja langsung kepada warga, kegiatan pariwista juga bisa menciptakan lapangan kerja.

✓ Pendidikan

Memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan formal terkait kepariwisatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan potensi kunjungan wisata. Pendidikan yang ditempuh diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang tepat dalam pelayanan, manajemen fasilitas akomodasi serta penyediaan informasi. Informasi yang dimaksud dapat berupa informasi tentang kondisi geografis dan fisik daerah, informasi kebudayaan yang diperlukan oleh wisatawan. Indonesia

memiliki banyak objek wisata yang belum banyak dikunjungi oleh wisatawan salah satunya disebabkan rendahnya pendidikan warga sekitar objek wisata. Warga tidak mempunyai kemampuan untuk menjelaskan kepada wisatawan secara lengkap dan benar tentang kondisi alam mereka dan tidak memahami dengan sejarah beberapa objek wisata.

Selain pengetahuan tentang manajemen dan informasi kepariwisataan, melalui pendidikan formal generasi muda juga harus dibekali pengetahuan tentang pengembangan objek wisata yang berkelanjutan yaitu tetap menjaga kelestarian lingkungan dan objek budaya.

- ✓ Keterampilan

Keterampilan masyarakat dalam menjalankan usaha pariwisata merupakan salah satu faktor utama berkembangnya pariwisata di suatu daerah. Keterampilan tersebut berupa keterampilan untuk menyuguhkan atraksi budaya, menyiapkan informasi yang jelas dan tepat, pembuatan kerajinan atau cinderamata yang khas daerah. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan masayarakat adalah melakukan pelatihan-pelatihan singkat suntuk mendorong kreativitas serta gagasan masyarakat.

- ✓ Sikap dan tata karma

Sikap dan tata krama dipengaruhi oleh filosofi penduduk setempat. Filosofi masyarakat yang sudah selaras dengan pengembangan pariwisata akan mempunyan sikap dan tata kramanya yang selaras juga. Apabila diumpakan warga setempat adalah tuan rumah dan wisatawan adalah tamu maka sikap dan tata karma sebagi tuan rumah akan sesuai dengan filosofi penduduk setempat. Tuan rumah yang memiliki sikap dan tata krama yang baik akan menyebabkan tamu menjadi betah dan akan menghabiskan waktu yang lama di lokasi wisata. Prinsip usaha pariwisata adalah usaha akan lebih menguntungkan dan terus bertumbuh jika wisatawan menghabiskan waktu yang lama di lokasi tersebut. Hal ini akan menyebabkan wisatawan

membelanjakan dananya untuk keperluan sehari-hari. Dengan demikian, sikap dan tata karma merupakan kunci penting keberhasilan usaha pariwisata. Pemerintah dan instansi terkait perlu melakukan upaya pembinaan sikap dan tata krama masyarakat agar tetap baik atau bahkan lebih baik. Memiliki sikap dan tata karma yang baik yang dimaksud tidak harus mengubah kebiasaan kita dan mengikuti sikap wisatawan justru hanya ramah dan sopan saja dapat membuat wisatawan betah dan merasa aman di lokasi wisata.

- ✓ Aturan bermasyarakat

Beberapa pendapat menyatakan bahwa pengembangan pariwisata pada suatu daerah akan menyebabkan rusaknya dan tidak dipatuhinya aturan yang beraku di masyarakat. Hal ini merupakan anggapan yang tidak benar karena pengembangan pariwisata yang berkelanjutan harus tetap melestarikan lingkungan, budaya dan aturan yang berlaku di masyarakat. Sebaliknya aturan bermasyarakat dapat dikelola menjadi daya tarik wisata. Banyak wisatawan yang tertarik dan mau mempelajari aturan bermasyarakat yang dipegang teguh. Wisatawan tidak diwajibkan untuk menjalankan aturan bermasyarakat penduduk setempat, tetapi bisa menjadi sarana pendidikan bagi para wisatawan. Hal ini akan menjadi keunggulan kompetitif yang bisa ditawarkan sebagai daya tarik wisata.

- ✓ Adat

Adat adalah daya tarik wisata yang sangat potensial. Upaya untuk promosi adat perlu digalakkan untuk menarik kunjungan wisatawan. Berbagai ritual kepercayaan yang dilakukan oleh beberapa daerah tertentu dapat menjadi daya tarik wisaya. Sebagian wisatawan diketahui datang mengunjungi suatu daerah hanya karena tertarik dengan keunikan adat istiadat yang masih dipegang teguh dan dijalankan oleh penduduk setempat. Adat mengandung banyak filosofi hidup serta nilai-nilai pendidikan yang tinggi karena umumnya adat terbentuk melalui proses

kehidupan bermasyarakat yang cukup panjang yaitu sepanjang kehidupan masyarakat itu sendiri.

✓ Penampilan

Penampilan terbentuk dari akumulasi banyak pemahaman dan pengetahuan. Keterampilan masyarakat bisa tercermin dari penampilan. Penampilan masyarakat dan penampilan lingkungan merupakan satu faktor yang mempengaruhi daya tarik wisatawan. Penampilan yang baik adalah penampilan yang membuat wisatawan merasa aman dan nyaman.

Dalam buku *Community Development Through Tourism* (2006) dijelaskan pembagian pariwisata berbasis masyarakat berdasarkan pengembangan pariwisata dimana kriteria utamanya adalah kualitas objek dan daya tarik wisata ada 7 (tujuh) yaitu:

1) *Basic Visitor facilities*.

Tipe ini terdiri atas fasilitas pariwisata yang sangat mendasar seperti akomodasi *home stay* dan restoran yang melayani pengunjung. Tipe ini biasanya diperuntukkan bagi desa yang terletak di rute yang menuju objek dan daya tarik wisata. Tipe ini tidak melibatkan organisasi kemasyarakatan dan pada tipe ini, manfaat ekonomi yang diterima masyarakat lokal masih sedikit.

2) *Basic visitor facilities plus tourism theme*.

Pada tipe ini, biasanya disediakan fasilitas dasar dengan tema tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Misalnya dengan menetapkan tema pertanian organik atau wisata alam. Tipe pengembangan pariwisata ini masih berskala kecil dan biasanya merupakan inisiatif dari pengusaha lokal.

3) *Handicraft Villages*.

Pengembangan tipe ini biasanya dilakukan pada desa-desa yang berfungsi sebagai pusat lokasi produksi dan penjualan barang

hasil kerajinan, dan juga merupakan desa yang masih kurang atau bahkan tidak memiliki atraksi lainnya. Pengelolaannya cenderung berdasarkan pada ikatan keluarga atau kelompok dan menggunakan tenaga kerja lokal.

4) *Hotels and Villages Communities*.

Masyarakat di daerah ini berada di sekitar hotel atau resort yang pembangunannya terintegrasi. Masyarakat mendapat manfaat langsung dan tidak langsung dari pengembangan pariwisata tipe ini. Manfaat yang dapat langsung dirasakan masyarakat yaitu terbukanya lapangan pekerjaan dan pelatihan baik di hotel maupun di pusat penjualan barang produksi kerajinan, sedangkan manfaat lainnya adalah pembangunan infrastruktur berupa jalan, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, dan sarana lainnya.

5) *Traditional Tourism Villages*.

Budaya dan adat istiadat perdesaan, gaya hidup masyarakat, dan arsitektur tradisional yang dikemas dalam lingkungan yang menarik merupakan komponen yang ditonjolkan dalam mengembangkan pariwisata.

6) *Community Close to Primary Tourism Attraction*.

Daya tarik dari desa ini adalah atraksi wisata alam dan buatan yang dipadukan sehingga menarik wisatawan dan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat.

7) *Integrated and Organized Community Based Tourism*.

Tipe ini terorganisasi dan terintegrasi dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Masyarakat telah mengetahui konsep jangka panjang, keberlanjutan dan manfaatnya. Masyarakat pada tipe ini sudah mengerti akan kebutuhannya dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut USAID 2011, terdapat berbagai indikator untuk penerapan pariwisata berbasis masyarakat.

a) Promosi kegiatan pengembangan komunitas
b) Memberikan dukungan pada masyarakat lokal
c) Menyediakan dasar kegiatan dan informasi yang diperlukan
d) Menjaga keberlanjutan sumber daya, kepuasan wisatawan dan lingkungan hidup Membangun sistem yang berkolaborasi dengan pemerintah
e) Memberikan usaha-usaha yang terorganisir
f) Membangun pengembangan komunitas yang sistematis
g) Menjaga keberlangsungan lingkungan hidup
h) Konservasi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
i) Mendukung kegiatan industrial yang bertujuan kehidupan komunitas
j) Menjaga keberlangsungan sumber daya
k) Terus menggali sumber daya yang ada
l) Menjaga nilai-nilai sumber daya yang ada
m) Keseimbangan penggunaan dan pelindungan
n) Menjaga kepuasan wisatawan/ pengunjung Penerimaan (hospitality) yang lebih baik
o) Keberadaan dan penyebaran informasi
p) Pengamanan lingkungan terutama untuk sarana dan prasarana transportasi Membangun sistem keseimbangan antara lingkungan sekitar, sumber daya dan kepuasan wisatawan
q) Membangun sistem informasi, untuk pertukaran dan kolaborasi informasi Menyebarkan koleksi informasi
r) Usaha publisitas oleh pemerintah
s) Membangun sistem pengembalian keuntungan untuk komunitas
t) Menyisihkan sebagian hasil dari pemasukan pariwisata untuk konservasi lingkungan

Salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di bidang kepariwistaan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata. PNPM mandiri pariwisata merupakan sebuah kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan sebagai solusi mencapai pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat baik individu maupun secara berkolompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan kultur kewirausahaan, penggalangan partisipasi masyarakat serta kegiatan usaha produktif lainnya yang berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan. Selain itu, masyarakat kurang mampu mendapat kesempatan untuk mengelola kegiatan, sumberdaya dan dana sendiri. Salah satu contoh program PNPM Mandiri Pariwisata adalah pengembangan desa wisata.

Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan. Desa wisata sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Tercatat pada tahun 2009 sampai 2011 melalui PNPM Mandiri Pariwisata, sebanyak 569 desa yang sudah dikembangkan menjadi desa wisata, dengan rata-rata bantuan dana Rp 150.000.000,- setiap desa. Sebanyak 960 menjadi desa wisata pata tahun 2012 sesuai target Kementerian Pariwisata dan mencapai 2000 desa wisata pada tahun 2014.

4. Sektor Perdagangan dan Jasa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang

terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Perdagangan Dalam Negeri adalah perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan Luar Negeri. Perdagangan Luar Negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara.

Perdagangan merupakan sektor yang berperan penting untuk peningkatan pembangunan ekonomi. Perkembangan perdagangan saat ini belum optimal berperan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mendukung perdagangan yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang meliputi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Upaya Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri agar terarah untuk memajukan kesejahteraan umum dan memberdayaakan masyarakat adalah melalui kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian perdagangan dalam negeri yang dilakukan pemerintah adalah:

a) peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi;
b) peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
c) pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
d) peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri; dan
e) pelindungan konsumen

Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini mengatur:

a) pengharmonisasian peraturan, standar, dan prosedur kegiatan perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah;
b) penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus barang;
c) pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;

d) pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
e) pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan;
f) peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
g) Perdagangan antarpulau; dan
h) pelindungan konsumen.

Pengendalian perdagangan dalam negeri meliputi perizinan, standar dan pelarangan dan pembatasan. Pemerintah mengembangkan sarana perdagangan berupa pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, gudang, perkulakan dan pasar lelang komoditas. Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing. Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan *Pasar Rakyat* dilakukan dalam bentuk:

a) pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat;
b) implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
c) fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
d) fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di Pasar Rakyat.

Kegiatan ekspor secara umum akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah yang lebih spesifik untuk memberdayakan masyarakat dalam hal perdagangan luar negeri adalah dengan membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan daya saing *(supply-side)* seperti *capacity building* kepada rumah tangga baik di desa maupun kota serta rumah tangga buruh tani. Dengan demikian diharapkan pemerataan kesejahteraan masyarakat atau pendapatan di seluruh jenis rumah tangga dapat terwujud.

Berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam sektor perdagangan seperti :

1) Memperkuat Permodalan

Menyediakan lembaga keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk menambah modal usaha sehingga dapat mengembangkan usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Hal ini sesuai dengan tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat yaitu mewujudkan ekonomi rakyat sebagai ekonomi yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan modern.

2) Membangun Sarana dan Prasarana

Menyediakan sarana produksi dan pemasaran merupakan komponen yang sangat penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Prasarana pemasaran yang tersedia berupa jalan dan transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran. Hal ini akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil dan menengah.

3) Pendampingan

Tugas utama pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, kecil maupun menengah dengan usaha besar.

4) Penguatan Kelembagaan

Pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis.

8

Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri diarahkan untuk:

a) peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia;
b) peningkatan dan perluasan akses pasar di luar negeri; dan

c) peningkatan kemampuan eksportir dan importir sehingga menjadi pelaku usaha yang andal.

Kebijakan perdagangan luar negeri meliputi:

a) peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
b) pengharmonisasian standar dan prosedur kegiatan perdagangan dengan negara mitra dagang;
c) penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;
d) pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan
e) pelindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri.

Sektor Jasa

Pada masa pemulihan paska krisis keuangan Asia, sektor jasa mempunyai peran penting dalam menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Pada pertengahan tahun 2000-an, sektor jasa merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja yang paling banyak dibanding sektor-sektor lain. Jasa merupakan bagian penting dalam perdagangan global Indonesia, sehingga memiliki dampak besar terhadap pasar tenaga kerja dan pekerjaan di dalam negeri. Pada tahun 2000 sektor ini menyumbang lebih dari 10% dari nilai total ekspor dan impor, baik ekspor dan impor jasa, tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang sama dengan perdagangan komoditas. Ekspor jasa tumbuh hampir 10% per tahun dalam nominal US$ dari periode 2000-2010.

Pekerjaan di sektor jasa memberikan kontribusi kurang dari 20% dari jumlah total pekerjaan yang diciptakan dari kegiatan ekspor. Sebanyak 7,1 juta pekerjaan yang disediakan sektor jasa yang terkait dengan semua kegiatan ekspor (dengan mempertimbangkan hubungan langsung maupun tak langsung), adalah lebih besar dari jumlah total pekerjaan yang diciptakan oleh semua ekspor manufaktur (makanan olahan, industri ringan dan

berat), yang berjumlah kurang dari 5 juta pekerjaan. Jumlah pekerjaan di sektor jasa yang diciptakan melalui ekspor adalah yang kedua terbesar setelah pekerjaan yang di sektor industri primer, dan melebihi penciptaan lapangan pekerjaan di sektor manufaktur.

Perpindahan pekerja dan transfer internasional sangat menguntungkan ekspor tenaga kerja (TKI). Remitan dari migrasi ke luar sangat besar (Indonesia berada di peringkat 20 terbesar dalam hal tingkat penghasilan devisa tahunan). Sebaliknya, remitan penghasilan pekerja asing yang bekerja di Indonesia lebih kecil yaitu $1.7 milyar tahun 2010, walaupun nilai rata-rata remitan jauh lebih besar untuk pekerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia. Dua masalah kebijakan besar yang saling terkait bagi TKI adalah rendahnya keterampilan pekerja yang bekerja ke luar negeri dan rendahnya upah dan kondisi kerja yang dihadapi TKI di luar negeri.

Berbagai pemberitaan di media massa mengekspos masalah-masalah yang menimpa TKI di negara tujuan, antara lain di Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura. Tampaknya pekerjaan sebagai TKW merupakan pekerjaan yang mengandung banyak resiko, meskipun di sisi lain banyak pula yang membawa manfaat bagi diri maupun keluarganya di daerah asal.

Hasil penelitian Pulistbang Kesejahteraan Sosial (Sutaat dkk, 2007) tentang Pelayanan Sosial TKI di Malaysia, menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia bersumber dari dua hal. *Pertama*, adalah kurang siapnya tenaga kerja Indonesia untuk menduduki pekerjaan tertentu, termasuk kurang siapnya menghadapi kondisi sosial lingkungan kerja di negara tujuan. Belum lagi mereka yang terjebak dalam pengiriman tenaga kerja secara illegal, dan korban perdagangan wanita (*trafficking*). *Kedua,* adalah perlindungan oleh negara tujuan terhadap tenaga kerja asing yang masih sangat minim, ditambah lagi perlakuan majikan yang sering kurang manusiawi, tidak memperhatikan budaya dan agama pekerjanya,

dan tuntutan yang terlalu tinggi terhadap performa pekerja yang disewanya.

Upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia saat ini telah mendapat perhatian besar dari pemerintah, antara lain dengan dibentuknya lembaga khusus untuk menangani masalah tenaga kerja Indonesia (TKI), yakni adanya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Pembentukan satuan tugas dalam wadah *(Citizen Services)* di beberapa Perwakilan RI negara tujuan TKI. Tujuan satuan tugas ini adalah memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri terutama Tenaga Kerja Indonesia. Pembentuka satuan tugas di negara tujuan merupakan relatif yang sulit dilakukan karena melalui langkah-langkah diplomatik dari pemerintah Indonesia, dan kesediaan pemerintah negara tujuan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan bagi perlindungan tenaga kerja di negara yang bersangkutan. Salah satu untuk mengurangi permasalahan TKI yang harus dilakukan adalah memberikan perlindungan dan penyiapan calon tenaga kerja di dalam negeri melalui pengawasan terhadap lembaga penyedia tenaga kerja.

5. Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)

Sebagian besar usaha yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Oleh karena itu pemberdayaan sektor KUMKM berperan penting untuk meningkatkan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa sumbangan koperasi sebagai lembaga terhadap Produk Domestik Bruto Nasional Triwulan III/2017 mencapai 4,48%. Hal ini meningkat dari sebesar 1,71% pada tahun 2014. Data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) mencatat, jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik tentang total PDB Nasional Triwulan III/2017 atau hingga September 2017, yang sebesar Rp10.096 triliun maka kontribusi koperasi sebagai lembaga sekitar Rp 451

triliun. Dilaporkan bahwa sumbangan koperasi sebagai lembaga terhadap PDB Nasional meningkat setiap tahunnya. Data Kemenkop UKM pada 2014 tercatat 1,71%, pada 2015 4,41%, pada 2016 turun menjadi 3,99% tetapi pada tahun 2017 naik lagi menjadi 4,6%.

Kontribusi koperasi sebagai lembaga ini berasal dari beberapa komponen, yaitu modal koperasi, modal luar, aset, omzet untuk koperasi simpan pinjam, volume untuk koperasi sektor riil, dan sisa hasil usaha. Perkiraan kontribusi anggota koperasi terhadap PDB Nasional yaitu Rp 3.114 triliun atau 30,84% dari total PDB Nasional. Total perkiraan kontribusi lembaga dan anggota koperasi sebesar 35,32%. Data koperasi tercatat melalui Online Data System (ODS) di Kementerian Koperasi dan UKM. Berdasarkan data per Desember 2017, jumlah Koperasi sebanyak 153.171 unit. Dari jumlah tersebut, anggota koperasi aktif tercatat mencapai 26,53 juta orang.

Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional mencapai sekitar Rp 7.005 triliun atau sekitar 62,57% dari total PDB pada tahun 2016. Jika dihitung menurut skala usaha, komposisi UMKM pembentuk kontribusi PDB UMKM adalah 38,90% dari usaha mikro, 9,73% dari usaha kecil, dan 13,95% dari usaha menengah. Kontribusi anggota koperasi terhadap PDB Nasional berdasarkan skala usaha, untuk anggota koperasi skala usaha mikro yaitu 43,87%. Kemudian, anggota koperasi skala usaha kecil 0,53% dan anggota koperasi skala usaha menengah 0,05%. Kemenkop UKM memiliki dua kebijakan utama yang dilakukan. *Pertama*, reformasi koperasi yang bertujuan untuk menjadikan koperasi sebagai lembaga yang sehat, kuat, tangguh, dan mandiri agar berkualitas serta mampu memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. *Kedua*, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sekitar 75.000 koperasi sehat dan 75.000 koperasi yang akan dibina menjadi sehat. Sebanyak 40.000 koperasi yang dibubarkan karena tdiak aktif. Jumlah pelaku UMKM tahun 2017 sebanyak 59,69 juta unit. Terkait pengembangan UMKM untuk naik kelas, telah dikembangkan program kewirausahaan nasional,

di antaranya pemasyarakatan kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan, magang kewirausahaan, bantuan wirausaha pemula, dan pendampingan kewirausahaan. Pengembangan KUMKM memiliki potensi yang besar dan strategis dalam rangka mengurangi kemiskinan, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan KUMKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa KUMKM dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja. KUMKM dapat diandalkan sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat pedesaan, perkotaan, bahkan di daerah tertinggal.

Berkaitan dengan upaya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, maka beberapa kegiatan pokok yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka program memberdayakan KUMKM antara lain :

1. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UKM.
2. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi usaha dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perijinan;
3. Penyempurnaan peraturan perundangan, seperti UU tentang UKM, UU tentang Perkoperasian, dan UU tentang Wajib Daftar Perusahaan, beserta ketentuan pelaksanaannya dalam rangka membangun landasan legalitas usaha yang kuat, dan melanjutkan penyederhanaan birokrasi, perijinan, lokasi, serta peninjauan terhadap peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi UMKM terutama peninjauan terhadap pemberlakuan berbagai pungutan biaya usaha, baik yang sektoral maupun spesifik daerah;
4. Memperbaharui/memulihkan hak-hak legal, antara lain dengan memperbaharui/ memulihkan surat-surat ijin usaha

melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana, mudah dan cepat serta tanpa pungutan. Bila memungkinkan bahkan cukup dengan sekedar melapor/mendaftar saja;

5. Program pengembangan sistem pendukung usaha KUMKM. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini, yaitu: Perluasan sumber pembiayaan, khususnya skim kredit investasi dan penyediaan skim pembiayaan ekspor melalui lembaga modal ventura dan lembaga nonbank lainnya, terutama yang mendukung UKM;
6. Penguatan jaringan pasar domestik produk-produk UKM dan anggota koperasi, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan/kemitraan usaha, dan sistem transaksi usaha yang bersifat *on-line,* terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi;
7. Penguatan infrastruktur pembiayaan bagi petani dan nelayan di perdesaan dan pengembangan skim-skim pembiayaan alternatif seperti sistem bagi hasil dana bergulir, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan, penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas;
8. Fasilitasi pengembangan skim penjaminan kredit melalui kerjasama bank dan lembaga asuransi, dan fasilitasi bantuan teknis kepada BPR dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk meningkatkan penyaluran kredit bagi sektor pertanian;
9. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin, melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dengan dukungan penyediaan infrastruktur perdesaan;
10. Bantuan penguatan untuk KSP/USP yang masih dapat melakukan kegiatan;
11. Memfasilitasi UKM untuk dapat berdagang di pasar darurat yang disediakan Departemen Perdagangan.

12. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUKM. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini, yaitu:
13. Bantuan teknis dan pendampingan teknologi kepada pemerintah daerah, masyarakat dan UKM di wilayah perbatasan (melalui pengembangan agroindustri unggulan dan agroforestry bernilai ekonomis tinggi, dan perbaikan mutu/kualitas benih genetik);
14. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan wirausaha baru UKM berbasis teknologi, berorientasi ekspor, pengembangan inkubator teknologi dan bisnis serta pemberian dukungan pengembangan kemitraan investasi antar-UKM;
15. Pemasyarakatan kewirausahaan, penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan wirausaha baru UKM berbasis teknologi, berorientasi ekspor, subkontrak dan agribisnis/agroindustri;
16. Pendataan ulang/revitalisasi kelembagaan KUKM;
17. Bantuan perkuatan alat/sarana usaha berupa kapal penangkap kapal ikan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap bersama Departemen Kelautan dan Perikanan.
18. Pemberdayaan usaha skala mikro. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini, yaitu:
19. Peningkatan kesempatan dalam berusaha dengan penyediaan kemudahan dan pembinaan teknis manajemen dalam memulai usaha, perlindungan usaha, tempat berusaha wirausaha baru, dan penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif untuk usaha;
20. Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan perkoperasian serta fasilitasi pembentukan wadah koperasi di daerah kantong-kantong kemiskinan;
21. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan LKM dan KSP di sektor pertanian dan perdesaaan antara

lain melalui pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan bank;

22. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas koperasi sebagai wadah organisasi untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dan efisiensi kolektif;
23. Memfasilitasi sarana usaha bagi usaha skala mikro, yang berlokasi di sekitar tenda-tenda penampungan, dan pasar darurat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Departemen Perdagangan;
24. Peningkatan kredit skala mikro dan kecil serta peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan KSP/USP;
25. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pengusaha mikro dan kecil.
26. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini, yaitu:
27. Fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di perdesaan berdasarkan identifikasi *best practices* dan *lessons learned* program-program pemberdayaan masyarakat;
28. Peningkatan pelayanan lembaga perkoperasian dan UKM pada zona aman bencana terhadap kelompok kegiatan ekonomi terdekat yang terkena bencana.

Program-program tersebut diupayakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sektor riil sehingga dapat membuka lapangan kerja yang luas, meningkatkan nilai tambah produk, peningkatan daya beli masyarakat, dan meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang selanjutnya diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan.

Kementerian Koperasi dan UKM juga telah mengembangkan berbagai bentuk dan skema pemberian dukungan perkuatan melalui beberapa kegiatan program sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari program pokok sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut.

1. Program Pembiayaan Usaha Mikro
2. Program Pembiayaan Produktif KUM Pola Konvensional

Dalam rangka memberikan bantuan UMKM di daerah terpencil yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN, Pemerintah telah mengembangkan usaha di bidang ketenaga-listrikan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pada tahun 2005 diberikan bantuan dana untuk pembangunan PLTMH kepada 1 koperasi di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan; pada tahun 2007 telah diberikan bantuan pembangunan PLTMH kepada dua koperasi di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu dan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.

Selain dapat memenuhi kebutuhan listrik di daerah terpencil tersebut, pembangunan PLTMH itu juga dapat menciptakan peluang usaha lainnya bagi UMKM. Pemerintah juga mendukung pemberdayaan UMKM di bidang perikanan. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan fasilitas alat pendingin. UMKM nelayan diketahui sangat memerlukan alat tersebut untuk kelangsungan usaha. Langkah nyata yang dilakukan pemerintah adalah pembanguna pabrik es sebanyak 6 unit di Jawa Tengah, Jawa Timur dan NTB pada tahun 2005. Dilanjutkan pembangunan pabrik es sebanyak 3 unit lagi pada tahun 2006 dan sebanyak dua unit di Jawa Tengah dan di Bali pada tahun 2007.

Kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM sangat mempengaruhi keberhasilan uasaha. Pemerintah mengupayakan peningkatan kualitas SDM yang tangguh, memiliki daya saing yang tinggi, serta mandiri. Upaya yang sudah ditemuh pemerintah adalah memberikan kesempatan memperoleh pendidikan formal dan melatih masyarakat di bidang kewirausahaan, keterampilan teknis, dan kemampuan manajemen. Pelatihan kewirausahaan dilakukan dengan tujuan menumbuhkembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan. Pelatihan ini sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada 13.600 peserta pada tahun

2005 s/d 2008. Pemerintah Pusat dan daerah juga telah melaksanakan pelatihan manajerial terhadap 27.326 peserta pada tahun 2005 s/d 2008. Pelatihan manajerial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk mengelola usahanya. Kemudian masih kurun waktu yang sama tahun 2005 s/d 2008 diselenggarakan pelatihan keterampilan teknis terhadap 6.247 peserta. Pelatihan keterampilan teknis bertujuan untuk meningkatkan keterampilan yang bersifat teknis yang dapat meningkatkan kualitas produk

Pengembangan tempat praktik keterampilan usaha (TPKU) bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen usaha bagi para peserta didik di lembaga pendidikan pedesaan/santri. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menciptakan calon wirausaha di berbagai bidang yang mampu mengembangkan usaha secara mandiri, sekaligus juga meningkatkan peran serta lembaga diklat pedesaan. Bidang keterampilan usaha yang dikembangkan melalui TPKU, antara lain otomotif, elektronik, konveksi, industri kerajinan, dan agribisnis.

Pada periode tahun 2005-2008, pengembangan TPKU telah dilaksanakan pada 716 unit. Dalam rangka meningkatkan kapasitas lembaga keuangan mikro (LKM), Pemerintah telah mengembangkan peningkatan kualitas SDM pengelola LKM agar memiliki kompetensi di bidangnya. Kepemilikan kompetensi ini dibuktikan dengan pemberian sertifikasi profesi melalui proses pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi. Kegiatan pengembangan standardisasi dan sertifikasi pengelola LKM dilaksanakan sejak tahun 2007 kepada 266 orang.

Pemberdayaan UKM dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Pemberdayaan terhadap Usaha Kecil Menengah merupakan salah satu contoh pemberdayaan masyarakat di sektor koperasi dan UMKM yang dilakukan pemerintah.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melakukan berbagai upaya pemberdayaan terhadap Usaha Kecil Menengah, antara lain:

- Pembinaan sumber daya manusia (SDM)

Pembinaan dilakukan dengan memberikan bimbingan kewirausahaan berupa pelatihan-pelatihan terhadap UKM seperti pelatihan peningkatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pelatihan tersebut tentang prosedur kepengurusan hak paten, hak merk, legalitas usaha, desain produk, kewirausahaan dan manajemen. Pemerintah memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka, serta memberikan bimbingan dan dukungan agar masayarakat mampu bertahan agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang memberikan penguatan dan penyokongan kepada pelaku UKM melalui pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan sumber daya bagi pelaku industri kecil agar mampu bertahan dan usahanya lebih berkembang.

- Bantuan pengaksesan permodalan.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang memberikan bantuan informasi bagaimana mendapatkan modal pada pihak ke tiga yaitu perbankan dan memberikan informasi bagaimana menyusun proposal yang baik dalam mengajukan permodalan. Selain itu juga Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang juga memfasilitasi antara UKM dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk mendapatkan dana hibah maupun bergulir.

Bantuan pengaksesan permodalan yang dilkukan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang sesuai dengan pendapat Suharto (2009) bahwa pemberdayaan dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan salah satunya yaitu pemungkinan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pendekatan tersebut sesuai yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam memberikan bantuan pengaksesan permodalan

berupa informasi untuk mendapatkan modal dan bagaimana cara menuyusun proposal yang baik.

Bantuan lain yang diberikan kepada KMUKM yaitu, mengembangkan jaringan kerjasama bagi UKM. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang bekerjasama dengan pihak swasta maupun Dinas terkait. Kerjasama dengan pihak swasta yaitu dengan CV. Mega Tama Persada selaku klinik UKM untuk menangani UKM yang bermasalah dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi UKM yang berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.

Selain itu Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang berkerjasama dengan Dinas terkait seperti dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG). DISPERINDAG memberikan bantuan tenaga ahli yang berkompeten untuk menjadi narasumber di berbagai pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang juga mendukung dan memediasi Paguyuban Amangtiwi yang merupakan binaan dari Dinas dengan pihak swasta lain seperti travel agent. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan promosi bagi pelaku UKM Kota Malang yang tergabung dalam Paguyuban Amangtiwi tersebut.

Hal yang perlu diupayakan dalam pengembangan UKM salah satunya adalah pengembangan kemitraaan, perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Di samping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam hal ini Paguyuban Amangtiwi yang merupakan wadah bagi perkumpulan UKM yang ada di Kota Malang mencoba bermitra dengan pihak swasta yaitu *travel agent*. Dalam kerjasama tersebut pihak *travel agent* membatu UKM dalam pemasaran produknya.

- Pengenalan produk-produk UKM melalui pameran dan promosi.

Dalam mengenalkan produk UKM ke masyarakat luas, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melakukan kegiatan pameran dan promosi bagi UKM. Dengan adanya pameran dan promosi ini UKM dapat memperluas pemasarannya serta memberikan peluang untuk bekerjasama dengan UKM lain maupun pengusaha besar. Dinas Koperasi dan UKM kota Malang memberdayakan UKM Kota Malang dalam hal pengenalan produk-produk UKM melalui pameran dan promosi. Dari adanya pameran dan promosi tersebut selain membantu dalam memasarkan produk mereka, manfaat yang diperoleh dari beberapa UKM yang mengikuti pameran dapat mengembangkan kerjasama dengan UKM di daerah lain.

Faktor pendukung dan faktor penghambat proses pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan UKM adalah, adanya struktur yang terintegrasi. Dengan adanya kejelasan di dalam struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan telah mendukung keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan UKM Kota Malang.

C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG SOSIAL BUDAYA

1. Sektor Pendidikan

Pembangunan manusia Indonesia pada hakikatnya adalah membangun manusia sebagai sumber daya pembangunan yang produktif dan berdaya saing. Pembangunan manusia Indonesia juga untuk menciptakan individu dan warga masyarakat yang dapat hidup secara rukun, damai, gotong royong, patuh pada hukum, serta aktif dalam bermasyarakat. Pembangunan manusia Indonesia harus dilakukan secara kohesif dan inklusif karena memiliki keanekaragaman latar belakang sosial ekonomi, budaya,

dan geografi. Pembangunan manusia yang kohesif dan inklusif dimana pembangunan tidak membedakan latar belakang masyarakat dapat mewujudkan manfaat pembangunan yang merata dapat dirasakan oleh semua komponebn masyarakat. Oleh karena itu kebijakan dan program yang ditetapkan harus berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia dapat dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat di bidang pendidikan. Kondisi pendidikan Indonesia saat ini berdasarkan beberapa laporan dan penelitian adalah sebagai berikut

- Biaya untuk melanjutkan sekolah di perguruan tinggi tergolong mahal. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk terutama yang berpenghasilan rendah tidak dapat menikmati pendidikan di perguruan tinggi.
- Di bebagai daerah di Indonesia masih ditemukan keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak cukup rendah. Kondisi ini terutama ditemukan di daerah pedesaan terpencil yang sulit mendapat akses transportasi.
- Masih terdapat sarana dan prasarana penduduk yang berkualitas rendah. Beberapa gedung sekolah dan perguruan tinggi telah rusak, tidak memiliki media pembelajaran yang cukup, buku perpustakaan tidak lengkap, laboratorium tidak standar, dan penerapan teknologi informasi yang masih rendah. Dalam beberapa kasus, bahkan masih ditemukan sekolah yang tidak mempunyai gedung sendiri, tidak tersedia perpustakaan, dan laboratorium.
- Kualitas pengajar yang masih rendah. Masih sangat umum ditemukan pengajar yang tidak professional dan belum memiliki ketrampilan yang memanai untuk melaksanakan tugasnya. Tugas guru atau pengajar dijelaskan dalam pasal 39 UU No.20/2003, adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia telah dilakukan beberapa program sebagai berikut:

- Memberi kesempatan belajar buat masyarakat Indonesia melalui jalur pendidikan sekolah atau luar sekolah.
- Sosialisi manfaat sekolah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengembangkan minat sekolah anak.
- Menurunkan biaya pendidikan, beasiswa bebas biaya sekolah untuk masyarakat yang tidak mampu, dan pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Hal ini untuk memenuhi amanat UUD yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas dan murah adalah kewajiban pemerintah.
- Pembangunan sarana prasaran pendidikan, dan meningkatkan kualitas sarana serta prasarana pendidikan yang sudah ada.

Dalam RPJMN 2015-2019, kebijakan pemerintah dalam memberdayaan masyarakat di bidang pendidikan adalah melalui Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar dilakukan melalui penerapan Wajib Belajar 12 Tahun. Sasaran program ini adalah:

1. Peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Besarnya peningkatan angka partisipasi pada tahun 2014 dan 2019 dijelaskan dalam tabel 14 berikut:

Tabel 14
Sasaran Pembangunan Pendidikan Indonesia

Jenjang/Komponen	Satuan	Status Awal 2014	Target 2019
I. Pendidikan Dasar			
a. SD/MI/SDLB/Paket A			

Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	91,3	94,8
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ SDLB/Paket A	%	111,0	114,1
b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B			
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	79,4	82,0
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	101,6	106
I. Pendidikan Menengah			
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	%	55,3	67,5
Partisipasi Kasar SMA/MA/ SMK/Paket C	%	79,2	91,6
II. Pendidikan Anak Usia Dini			
Angka Partisipasi PAUD	%	66,8	77,2
IV. Pendidikan Tinggi			
Angka Partisipasi Kasar PT	%	28,5	36,7

Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

2. Penurunan angka putus sekolah serta peningkatan angka siswa yang melanjutkan sekolah menunjukkan terjadi peningkatan keberlanjutan pendidikan di Indonesia ;
3. Penurunan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat. Kesenjangan yang menurun terjadi antara masyarakat yang kaya dan miskin, antara penduduk laki-laki dan perempuan, serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan
4. Peningkatan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
5. Peningkatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;

6. Peningkatatan jumlah murid SMK yang bisa mengikuti program pemagangan di industri;
7. Peningkatan kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar;
8. Peningkatan jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan serta karir guru yang bertugas di daerah khusus;
9. Peningkatan dan pemerataan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
10. Tersusunnya peraturan perundangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun.

2

Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Program ini memberi perhatian yang lebih besar pada daerah-daerah yang belum tuntas melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Kebijakan untuk pendidikan menengah diarahkan untuk perluasan dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, terutama pemanfaatan bonus demografi dan menyiapkan perdagangan bebas di ASEAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar, melalui:

a) Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia, dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak

dari keluarga kurang mampu, di daerah pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);

b) Penyediaan bantuan untuk anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar;
c) Penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus termasuk melalui pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, non-formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas;
d) Peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antardaerah dan kesenjangan gender.
e) Peningkatan angka partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas Wajib Belajar 12 Tahun.

2. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja:

a) Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar;
b) Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, dan terutama penambahan RKB, dan pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu atap, serta ketersediaan SMK yang mendukung pembangunan bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur dan ekonomi kreatif;
c) Penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler;

d) Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas;
e) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah untuk mendorong kemauan orangtua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi
f) Penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas
g) Penilaian terhadap sekolah/madrasah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya.
h) Penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah/madrasah baru.
i) Penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah swasta dan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah ; dan
j) Penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidangbidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa asing;
k) Penguatan kecakapan akademik siswa SMK seperti matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar;
l) Pemberian insentif baik finansial maupun non-finansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang;
m) Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri;
n) Penyelarasan program keahlian dan pengembangan kurikulum SMK sesuai dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten/kota dan kebutuhan pasar kerja.

3. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi agar lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja.

4. Memperkuat jaminan kualitas *(quality assurance)* pelayanan pendidikan melalui:

a) Pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antarsatuan pendidikan dan antardaerah;
b) Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta;
c) Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM

5. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya melalui:

a) Penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke 21;
b) Diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu;
c) Penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;
d) Evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan;
e) Peningkatan peran serta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;

f) Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran;
g) Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah; h. Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online untuk membangun jaringan pertukaran materi pembela-jaran dan penilaian antar guru;
h) Peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif gender; dan
i) Penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma-norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan.

6. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel melalui:
a) Peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
b) Peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa;
c) Penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;
d) Pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan;
e) Pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan;
f) Penguatan lembaga penilaian pendidikan yang indepen-den dan kredibel; serta g. Pengembangan sumberdaya lembaga penilaian pendidikan di pusat dan daerah.

7. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, melalui:
   a) Pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien;
   b) Penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh pemerintah kabupaten/kota maupun oleh sekolah atau madrasah berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota;
   c) Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui *multigrade* dan/atau *multisubject teaching;*
   d) Penguatan kerjasama antara Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi yang merata; dan
   e) Pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karir.

8. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi, melalui:
   a) Peningkatan daya tampung perguruan tinggi sesuai dengan pertambahan jumlah lulusan sekolah menengah;
   b) Peningkatan pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektivitas *affirmative policy*: penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas;
   c) Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perguruan tinggi.

9. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, melalui strategi:
   a) Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif;
   b) Peningkatan infrastruktur iptek di perguruan tinggi;

c) Peningkatan pemerataan kualitas perguruan tinggi antar daerah melalui percepatan akreditasi program studi perguruan tinggi di Luar Jawa.

10. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, melalui strategi:

a) Pengembangan jurusan-jurusan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
b) Penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan;
c) Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi di dalam mata kuliah, dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.

11. Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi, melalui strategi:

a) Peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran, dengan tidak menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), agar perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah.
b) Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif dengan mengembangkan kemitraan pemerintah-universitas-industri

16

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.

Pada tahun 2016, IPM Indonesia telah mencapai 70,18, meningkat dibandingkan tahun 2015 (69,55). Pembangunan di bidang pendidikan telah meningkatkan taraf pendidikan penduduk yang ditandai dengan:

1. Meningkatnya partisipasi pendidikan:

a. Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas dari 8,07 tahun (2012) menjadi 8,42 tahun (2016);
b. Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat dari 95,22% (2015) menjadi 95,38% (2016);
c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dari 93,38% (2015) menjadi 93,70% (2016); Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C dari 76,45% (2015) menjadi 81,95% (2016); dan APK pendidikan tinggi dari 29,92% (2015) menjadi 31,61% (2016);

2. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan:
   a. Pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB), termasuk pada daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T) dan daerah yang belum terjangkau layanan pendidikan SD/sederajat;
   b. Inisiasi program Sekolah Garis Depan (SGD) yang merupakan integerasi Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah dalam rangka menyediakan layanan pendidikan yang bermutu bagi siswa di wilayah terjauh, terpencil, dan perbatasan;
3. Penyediaan Kartu Indonesia Pintar bagi 19,2 juta siswa miskin (2016) dan ditargetkan 19,7 juta siswa miskin (2017);
4. Pemerataan akses dan layanan pendidikan tinggi, melalui program bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi), program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), dan program Peningkatan Prestasi Akademik (PPA).

Gambar 7. Perjalanan anak Lebak Indonesia ke sekolah bergelantungan di Jembatan rusak
Sumber: Merdeka.com

2. Sektor Budaya

Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam. Jumlah kelompok dan suku bangsa yang tersebar dari ujung pulau Sumatera sampai ujung pulau Papua diperkirakan sebanyak 300 kelompok etnik dan 1300-an suku bangsa. Keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia meliputi keragaman bahasa, tarian daerah, pakaian daerah, rumah adat dan seni daerah. Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat harus mampu melestarikan dan mengelola keragaman sosial budaya dengan baik. Pengelolaan dan pelestarian budaya yang tidak baik akan menimbulkan beberapa hal buruk seperti berikut:

- Negara lain akan mengklaim budaya Indonesia sebagai milik negara tersebut.
- Generasi baru atau generasi melupakan dan tidak mengetahui budaya sendiri.

- Kepunahan Bahasa daerah karena sudah tidak digunakan penutur asalnya.
- Budaya merupakan identitas daerah. Punah atau hilangnya budaya akan menyebabkan daerah kehilangan identitas.

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan upaya agar keragaman budaya di Indonesia tetap terjaga dan lestari. Pelestarian budaya dapat dilakukan pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat di sektor budaya. Peran pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di sektor budaya adalah sebagai berikut:

a. Sebagai penggerak

Peran pemerintah untuk menggerakkan dan mengarahkan masyarakat untuk mengambil keputusan terkait pengelolaan keragaman sosial budaya. Pemerintah mendukung pendapat masyarakat mengenai program-program yang terkait dengan pelestarian budaya.

b. Memperkenalkan kebudayaan ke domestik dan mancanegara

Pemerintah memperkenalkan budaya suatu daerah ke dalam negeri dan luar negeri. Sebagai contoh peran pemerintah dalam memperkenalkan budaya adalah dengan menyelenggarakan festival budaya yang menampilkan tarian daerah maupun produk-produk kesenian daerah. Festifal budaya ini diharapkan bisa meningktakan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Selain peningkatan pendapatan daerah, manfaat lain yang juga cukup penting adalah budaya daerah setempat tetap terjaga, lestari dan tidak dilupakan generasi muda.

c. Sumber Modal

Dukungan dana terhadap kegiatan kebudayaan pementasan dan penampilan tarian dan seni, perlombaan tari-tarian daerah atau antar daerah, lomba pidato berbahasa daerah dan pendirian sanggar seni.

Salah satu contoh, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dalam upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan tidak hanya terfokus pada peningkatan ekonomi alternatif tetapi juga pada pelestarian budaya lokal. Balai Besar TNBBS menyerahkan bantuan peralatan untuk Sanggar Seni Angon Saka Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka dan Sanggar Seni Bulan Bakha Pekon Kedamaian Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus.

d. Menetapkan peraturan perundang-undangan

Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pengelolaan keragaman budaya merupakan dasar bagi masyarakat untuk melakukan bebagai kegiatan terkait kebudayaan. Peraturan tersebut mengatur tentang hal yang boleh maupun tidak boleh dilakukan terkait pengelolaan kebudayaan di suatu daerah. Hal ini akan menciptakan pengelolaan kebudayaan yang teratur dan terarah. Salah satu contoh perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kebudayaan di Indonesia adalah UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

e. Membentuk Kelembagaan

Pemerintah perlu membentuk lembaga yang bertujuan dalam penanganan masalah dan isu terkait pengelolaan pelestarian kebudayaan di suatu daerah. Lembaga ini diharapkan akan membantu pemerintah untuk melakukan pengelolaan budaya setempat.

f. Menyelenggarakan kegiatan seni dan budaya secara rutin

Kegiatan seni dan budaya yang diselenggerakan secara rutin bertujuan untuk mempromosikan kebudayaan daerah. Kegiatan ini sebaiknya dimasukkan dalam program pemerintah dan merupakan agenda tahunan pemerintah daerah. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Diharapkan dengan kegiatan yang dilakukan secara rutin dan terjadwal ini membuat wisatawan mengetahui waktu kunjungannya ke daerah tersebut.

Pertumbuhan yang pesat di masa ekonomi kreatif saat ini merupakan kesempatan besar untuk meningkatkan nilai jual

keberagaman budaya Indonesia. Kreativitas di bidang seni dapat diciptakan menjadi berbagai hasil karya berupa benda ataupun hasil karya bukan benda. Beberapa contoh kreativitas di bidang seni dan budaya yaitu kerajinan, pertunjukan, musik, seni rupa dan berbagai karya seni lainnya. Memberdayakan masyarakat di bidang seni dan budaya melalui peningkatan kreativitas mengatasi berbagai permasalahan masyarakat antara lain mengatasi permasalahan kepunahaan seni budaya dan mengatasi rendahnya kesejahteraan masyarakat.

Memberdayaan masyarakat agar tetap mengembangkan seni budaya masing-masing mempertahankan eksistensi budaya lokal agar tidak semakin pudar. Pada kondisi nyata, cukup banyak ditemukan kreativitas dibidang seni budaya yang tidak bertahan lama, diganti dengan budaya popular dan budaya asing. Beberapa seni budaya bahkan sudah semakin pudar karena ditinggalkan oleh masyarakatnya,seperti wayang orang, wayang potehi, seni kasidah, seni gambang, kesenian Reog dan Ludruk. Ketua Forum Taman Budaya se-Indonesia menegaskan bahwa paling sedikit 43 kesenian tradisional yang hampir punah di daerah Jawa Barat. Seperti yang terjadi globalisasi ekonomi, di berbagai negara dunia juga mengalami globalisasi kebudayaan. Hal ini ditandai dengan munculnya kebudayaan universal. Penyebaran kebudayaan sangat mudah karena fasilitas media global yang semakin mudah untuk dijangkau masyarakat. Media-media penyebaran tersebut antara lain, televisi, musik, dan jaringan internet. Perkembangan teknologi informasi saat ini membuat negara-negara di dunia menjadi tanpa batas *(borderless)*. Di berbagai negara telah ditemukan arsitektur, makanan, minuman, pakaian, film, olahraga, serta bentuk kreasi lainnya yang semakin sama.

Perkembangan globalisasi kebudayaan yang sangat pesat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dan pemerintah untuk melestarikan kebudayaan daerahnya. Negara Indonesia yang memiliki prinsip keanekaragaman *(diversity)* mengharuskan keanekaragaman kebudayaan dipertahankan. Keberagaman kebudayaan yang di Indonesia merupakan identitas dari setiap

daerah. Pembangunan dan pelestarian kebudayaan merupakan agenda penting harus dipikirkan oleh pemerintah saat ini.

Pembangunan kebudayaan menjadi sebuah komponen penting dari sebuah pendekatan pembangunan masyarakat. Di dalam konteks pembangunan masyarakat, pembangunan kebudayaan mempunyai empat komponen yaotu melestarikan dan menghargai kebudayaan lokal, melestarikan dan menghargai kebudayaan asli, multi-kulturalisme dan kebudayaan partisipatoris *(participatory culture)*.

Berikut Pemberdayaan Masyarakat Sektor Budaya baik yang dilakukan pemerintah atau yang dilakukan oleh masyarakat (swadaya).

a. Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Sleman

Kepala Bidang Kesenian menyatakan bahwa ada dua bidang penting dalam pembinaan seni tradisional di Kabupaten Sleman ,yaitu : bidang teknis meliputi garap tari, gending (iringan/ musik), kostum dan peralatan pendukung lain dan bidang manajemen meliputi manajemen organisasi, manajemen produksi sampai manajemen pemasaran.

Pelaksaan pembinaan dan pelatihan seni tradisional dilaksanakan pemerintah bekerjasama dengan institusi Pendidikan Tinggi, diantaranya ISI Yogyakarta dan Jurusan Seni UNY. Dampak Pembinaan Seni Nilai sosial dari unsur isi cerita seni tradisional, berupa penggambaran kerja sama dan kegotong-royongan, tolong menolong dan persatuan tekad, terutama dari golongan kesatria, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian. Hal tersebut dapat menjadi teladan bagi siapa saja yang menginginkan terwujudnya kesejahteraan dan kedamaian demi kepentingan bersama. Dengan memahapi nilai sosial yang terkandung dalam seni tradisional maka keteguhan masyarakat dalam mengukuhkan integrasi sosial bisa dicapai. Hal ini tercermin dalam bebrapa pelaksanaan upacara adat Tuk Si Bedug di Desa Margodadi Seyegan Sleman.

Di samping itu dengan aktivitas berlatih seni tradisional, bagi masyarakat pedesaan juga menjadi ajang untuk selalu berinteraksi secara sosial bagi seluruh anggota paguyuban sena dan masyarakat yang lain. Dengan adanya aktivitas pembinaan seni tradisi ini banyak program pemerintah dapat disosialisasikan dengan baik kepada seluruh warga masysrakat. Di samping itu jika ada permasalahan sosial baik antar perorangan maupun kelompok warga juga dapat di selesaikan dengan baik dalam kegiatan ini. Pergelaran seni tradisi penuh dengan berbagai ajaran yang berhubungan dengan nilai-nilai religius, etika (sopan-santun) maupun nilai-nilai sosial. Cerita dalam seni traidisional mengangkat berbagai kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam sekitar, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan Sang Pencipta. Sehingga dengan beraktivitas dalam seni tradisional maka interaksi sosial dan kerukunan diantara warga masyarakat dapat diwujudkan.

Dari aktivitas seni tradisional yang dilakukan masysarakat juga terjadi aktivitas perekonomian sabagai aktivitas yang menyertainya. Seperti pada pelaksanaan upacara ada Tuk Si Bedug pada tahun 2010, kegiatan tersebut dikuti tidak kurang dari 25 stan makanan cepat saji dan makanan tradisional, 20 stan kerajinan tradisional dan 5 stan permainan anak. Dari aktivitas tersebut restribusi yang dapat dihimpun panitia pelaksana kira-kira 15 juta rupiah, termasuk dari restribusi parker pengunjung. Penghasilan tersebut digunakan untuk operasional kegiatan dan sisanya untuk kas paguyuban. Di samping itu juga masih ada kelompok seni yang saat ini sangat diminati masyarakat yaitu jathilan, dimana setiap kelompok ini melakukan pemetansan atas undangan dari warga yang mempunyai hajatan, mereka juga mendapatkan bayaran.

Berbagai nilai-nilai simbolik dalam pergelaran seni tradisional dapat ditanamkan pada tunas-tunas bangsa terutama anak-anak dengan jalan banyak beraktivitas dan menyaksikan pagelaran seni tradisi. Dengan memahami filosofi dan tumbuhnya rasa cinta terhadap seni tradisi sejak kecil maka secara tidak langsung akan membantu membentuk manusia yang ulet utuh

mandiri dan penuh tanggung jawab. Mentalitas tersebut sangat diperlukan untuk menemukan jati diri bangsa yang sesungguhnya. Hal ini sesuai dengan pergelaran wayang kulit yang isinya adalah konfrontasi antara kebaikan dengan kejahatan dan selalu dimenangkan oleh kebaikan. Pada akhirnya akan tercipta keseimbangan alam yang penuh dengan ketenangan, kedamaian serta rasa sosial yang tinggi di antara sesama manusia. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Aji Wulantoro bahwa : dengan memahami fisofi seni teater tradisonal (kethoprak, wayang orang) masyarakat sangat mudah untuk memahai azas kepatuhan terhadap pemimpin dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dan tidak jarang pementasan seni tradisi digunakan sebagi propaganda pemerintah untuk sosialisai program strategis pemerintah, seperti menjaga ketentraman dan keamanan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

Gambar 8. Kegiatan upacara adat Tuk Sibedug di Kabupaten Sleman
Sumber : https://budayajawa.id/mengenal-tradisi-tuk-si-bedug-dari-sleman

b. Memberdayakan Masyarakat di bidang seni dan budaya di Kota Bandung Propinsi Jawa Barat dengan mengembangkan Kreativitas Seni Tradisi Saung Angklung Udjo (SAU).

Angklung yang merupakan seni tradisi sunda sukses dikemas oleh Saung Angklung Udjo (SAU) menjadi kegiatan yang berbasis pemberdayaan kepada masyarakat. Program ini berbentuk kegiatan produksi, pendidikan, pertunjukan. Program ini telah sukses memberdayakan masyarakat dari awal berdiri sampai saat ini. Sumbangan terbesar dari kegiatan yang dilakukan oleh sanggar SAU Udjo yaitu berhasil menjadikan angklung sebagai warisan budaya dunia milik Indonesia dan disahkan oleh Unesco pada tanggal 16 Nopember 2010.

Saung Angkalung Udjo yang dididirikan Udjo (Mang Udjo) Ngalagena pada tahun 1966 telah memberdayakan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan langsung yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kegiatan tersebut adalah memproduksi angklung dan benda lain yang diperlukan, pementasan dan memberikan pendidikan seni tradisi angklung kepada masyarakat. Kreativitas seni tradisi angklung sukses dikembangkan Mang Udjo dan sudah berdampak besar untuk kelestarian seni angklung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Saung Anglung Udjo sudah mendukung dan menyumbang untuk meningkatkan kesejahteraan ribuan orang baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejak didirikan hingga saat ini, sudah ada empat generasi penduduk yang dilibatkan oleh SAU di berbagai kegiatan, yaitu produksi, pendidikan serta pertunjukkan angklung di lokal, nasional dan internasional.

Secara tidak langsung, roda perekonomian bidang lain juga digerakkan oleh aktifitas seni SAU. SAU mampu menggerakkan kegiatan pertanian bambu, perdagangan, munculnya pelaku usaha usaha kepariwisataan serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Angklung yang dipasok oleh seorang pengrajin angklung ke SAU saat ini bisa mencapai penghasilan hingga 2 sampai dengan 3,5 juta

dalam satu minggu. Ditinjau dari aspek sosial, kehadiran SAU di tengah masyarakat telah menyatu dengan banyak kegiatan penduduk setempat serta menjadi pusat kegiatan masyarakat. Setelah 50 tahun lebih didirikan, SAU tetap bertahan bahkan terus tumbuh berkembang bersama masyarakat. Melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam semua proses kegiatan SAU menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat berhasil diwujudkan.

Terbentuknya SAU memberi makna yang penting bagi masyarakat, karena selain anak-anak berkesempatan untuk belajar dan tampil dalam pertunjukkan, ada juga penanaman nilai silih asah, silih asih, silih asuh. Dalam melaksanakan semua kegiatan di SAU, Mang Udjo berpartisipasi langsung untuk melatih dan memberdayakan masyarakat tentang cara membuat angklung yang akan dijual. Hal menarik dari cara pemberdayaan pengrajin angklung yang dilakukan oleh SAU adalah para pengrajin bebas untuk menjual angklung ke pembeli yang lain dan boleh juga dijual langsung ke SAU. Hal ini membuktikan bahwa tujuan SAU melakukan berbagai kegiatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya mengeksploitasi produk masyarakat untuk keperluan usahanya. Saung Angklung Udjo hingga saat ini sudah menjalin banyak kerjasama dan kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat seperti pengrajin, pemasok bahan, komunitas seni budaya, dan berbagai lembaga baik lembaga formal maupun lembaga non formal. Pada tahun 2015, ada Sebanyak 108 mitra kelompok pengrajin angklung serta kerajinan dari bambu serta memiliki koperasi yang mewadahi keberadaan mereka. Upaya lain yang diterapkan SAU agar penghasilan pengrajin merata adalah dengan membeli dengan jumlah yang terbatas produk angklung yang dihasilkan oleh setiap mitra atau masyarakat. Artinya tidak ada pengrajin yang memonopoli penjualan kepada SAU. Selain itu, SAU membeli produk angling mitra secara rutin dengan syarat kualitas produksi sesuai dengan standar SAU. Hal ini membuat para pengrajin mempunyai kepastian pasar dan penjualan.

Dari pengalaman program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh SAU, dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan dan kemampuan bertahan suatu hasil karya kreatif. Peran masyarakat dalam menyumbang ide dan gagasan serta turut serta memproduksi menimbulkan hasil karya yang kaya akan kreativitas sehingga bertahan lama dan selalu laku di pasar. Selain memberi dampak terhadap perekonomian, keterlibatan masyarakat dalam menghasilkan karya seni tradisi juga merupakan upaya yang efektif agar penduduk lokal termotivasi untuk mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, serta bertanggung jawab.

Program pemberdayaan masyarakat SAU dengan cara mengembangkan seni tradisi telah sukses menjadikan angklung tidak punah dan tetap lestari di masyarakat Sunda bahkan music angklung sukses di perkenalkan dan dinikmati warga internasional. Keberhasilan angklung di dunia internasional antara lain dengan ditetapkannya angklung sebagai kurikulum di sekolah-sekolah di beberapa negara yaitu Australia Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Selain itu angklung juga telah dijadikan sebagai alat diplomasi budaya secara resmi oleh pemerintah melalui KBRI di berbagai negara.

Pertunjukan yang dilakukan SAU sekitar 20 s/d 35 pertunjukan per bulan. Pertunjukan-pertunjukan tersebut berlokasi di dalam negeri dan luar negeri berupa pementasan angklung interaktif atau alunan rumpun bambu. SAU telah sukses melakukan otentisasi/pengaslian *(authentisation*) sebagai lawan dari indigenisasi. (Kee, 2014). Otentisasi merupakan suatu proses yang membumi, yang mendorong agen perubahan agar mencerminkan budaya lokal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Istilah ini menjelaskan bahwa perubahan yang dilakukan Udjo murni berdasarkan berbagai unsur lokal dan strategi pemberdayaannya juga berdasarkan pada nilai-nilai tradisi Sunda namun berhasil diadopsi oleh berbagai budaya dan masyarakat asing khususnya dari sisi pengembangan pendidikan anak melalui angklung di berbagai negara.

3. Sektor Agama

Salah satu ukuran tercapainya tujuan pembangunan adalah menningkatnya kualitas kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Karena itu pemberdayaan masyarakat di sektor agama harus diupayakan pemerintah untuk memenuhi hak dasar rakyat dalam menjalankan kehidupan beragama. Hak dasar tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Bab XI, Pasal 29, ayat 1 dan 2 yang mengamanatkan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

Pemberdayaan masyarakat di sektor agama adalah salah satu langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam cakupan yang luas, yaitu mencakup dimensi lahir, batin, material, dan spiritual. Oleh karena itu, pembangunan bidang agama merupakan bagian penting untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Upaya menciptakan lingkungan yang kondusif menjalankan ibadah, terciptanya kerukunan antara umat beragama, saling menghomati dan saling mempercayai dan merupakan hal-hal yang termasuk dalam pemberdayaan masyarakat di sektor agama. Kerukunan antar umat beragama dimana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis dapat terwujud jika masyarakat sadar dan menerima keanekaragaman suku dan agama serta paham arti kemajemukan sosial.

Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di bidang agama. Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara, pelatihan bagi penyuluh dan orientasi bagi

pemuka agama, serta pemberian bantuan bagi kegiatan ritual, seperti MTQ, Pesparawi, dan Festival Baca Tulis Kitab Suci Budha.

Tujuan Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama adalah :

a. memberikan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama dan
b. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

Langkah nyata yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan program tersebut yaitu membantu dana perbaikan dan pembangunan tempat ibadah, menyumbang kitab suci, lektur keagamaan, serta membuat perpustakaan di tempat peribadatan. Pemerintah juga memberikan pelayanan pembinaan agama bagi keluarga melalui peningkatan kemampuan para petugas pencatat nikah, peningkatan pelayanan dan pengelolaan dana sosial yang berbasis agama, seperti dana infak, zakat, wakaf, sedekah, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia, dan dana paramita serta ibadah sosial lainnya. Khusus untuk kalangan Muslim, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, efisiensi, transparansi, serta perlindungan jamaah dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Program penting lain yang dilaksanakan adalah program peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama yang bertujuan untuk memantapkan dasar-dasar kerukunan intern dan antarumat beragama, yang dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosial menuju persatuan dan kesatuan nasional. Kegiatan pokok yang dilaksanakan meliputi, antara lain, pendirian sekretariat bersama antarumat beragama di seluruh provinsi; pembentukan forum komunikasi kerukunan antarumat beragama mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan; rekonsiliasi tokoh-tokoh agama dan pembinaan umat beragama di daerah pascakonflik; peningkatan hubungan

antarumat beragama serta hubungan antara majelis agama dengan pemerintah melalui forum dialog; juga pengembangan wawasan multikultural bagi guru dan penyuluh agama.

Pemerintah juga telah dan sedang melaksanakan serangkaian program lain yang menunjang program di atas, di antaranya, adalah program peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Demikian pula dengan program pengembangan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas, kualitas, serta peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi dampak negatif ekstrimisme masyarakat, serta memberikan pelayanan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat pedesaan dan ekonomi lemah. pengadaan alat pengolah data; pengembangan kelembagaan sebanyak 97 kegiatan; penyelenggaraan lomba, sayembara, dan festival; tunjangan untuk penyuluh agama non-PNS sebanyak 90.510 orang.

Pembinaan kerukunan umat beragama merupakan upaya untuk mendukung mewujudkan Indonesia yang aman dan damai dalam masyarakat. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kerukunan hidup umat beragama meliputi musyawarah para pemuka dalam satu agama, musyawarah antarpemuka berbagai agama, musyawarah antarapemuka berbagai agama dan pemerintah, dan musyawarah cendekiawan antaragama. Pada tahun 2005 telah dilaksanakan rehabilitasi mental korban pasca kerusuhan, dialog dan silaturahmi antarpemuka agama, pemberdayaan forum komunikasi kerukunan antar umat beragama di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan LSM yang bergerak di bidang kerukunan umat beragama. Pada tahun 2006 di samping melanjutkan kegiatan-kegiatan tahun 2005 kegiatan penting yang dapat dilaporkan adalah penyempurnaan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969

menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Pada tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan dalam rangka penanggulangan bencana alam dan kerusuhan di empat lokasi; pemberian bantuan sarana peribadatan di 48 lokasi; pemberian bantuan untuk organisasi sosial di 59 lokasi; bantuan pelayanan kepada masyarakat di 9 (Sembilan) lokasi; pembimbingan dan kemitraan umat sebanyak 97 angkatan; dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat sebanyak 102 angkatan; pemberian bantuan sosial di 60 lokasi; pembinaan mental dan agama bagi korban pascakerusuhan sebanyak 77 kegiatan; pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sebanyak 35 angkatan; penerbitan majalah/jurnal sebanyak 19.200 eksemplar; pengadaan buku perpustakaan; pemberian bantuan subsidi di 43 lokasi; penanganan pascabencana alam dan kerusuhan sosial di 13 kegiatan; pengadaan alat pengolah data; pengadaan kitab suci dan buku agama lainnya; peningkatan pengkajian kerukunan umat beragama; penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan sebanyak 271 kegiatan.

Pada tahun 2008 disediakan dana bantuan dalam rangka penanggulangan bencana alam dan kerusuhan di dua lokasi, bantuan sarana peribadatan di 65 lokasi; bantuan untuk organisasi sosial keagamaan di 149 lokasi; bantuan pelayanan keagamaan bagi masyarakat; bimbingan dan kemitraan umat sebanyak 46 angkatan; dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat sebanyak 72 angkatan; pemberian bantuan sosial di 44 lokasi; pembinaan mental dan agama sebanyak 142 kegiatan; pendidikan dan pelatihan kepad bagi masyarakat sebanyak 76 angkatan; penerbitan majalah/jurnal sebanyak 34.600 eksemplar; pengadaan buku perpustakaan; pemberian subsidi kepada forum komunikasi kerukunan umat beragama di 203 lokasi; pembangunan sekretariat bersama kerukunan umat beragama

sebanyak 34 unit; penanganan pascabencana alam dan kerusuhan sosial; pengadaan alat pengolah data; pengadaan kitab suci dan buku agama lainnya sebanyak 6.340 eksemplar; peningkatan pengkajian kerukunan umat beragama; penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/serasehan sebanyak 169 kegiatan.

Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan bagi peserta didik dilakukan melalui program peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Selain ditujukan kepada peserta didik, kegiatan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru agama. Pada tahun 2005 telah dilaksanakan peningkatan kualitas melalui penyetaraan D-2 dan D-3 guru agama, pemberian bantuan biaya pendidikan pascasarjana untuk guru-guru agama yang berprestasi, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional, penyempurnaan materi pendidikan agama, metodologi, dan sistem evaluasi. Kegiatan sejenis juga telah dilaksanakan pada tahun 2006.

Pada tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan berupa bantuan beasiswa kepada 10 orang guru-guru agama; pemberian bantuan sarana peribadatan; pemberian bantuan untuk organisasi sosial keagamaan sebanyak 182 paket; pembangunan gedung kantor; pemberian bantuan sosial kepada 178 lembaga, pemberian subsidi bimbingan pemberdayaan fungsi dan manajemen masjid di 39 lokasi; dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat sebanyak 36 paket; kerja sama antarinstansi pemerintah/swasta/lembaga terkait sebanyak 1.008 kegiatan; pembinaan pendidikan agama pada sekolah umum di 88 lokasi; pembinaan penyuluh agama sebanyak 216 kegiatan; pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan dan ketenagaan di pendidikan tinggi sebanyak 35 kegiatan; pembinaan generasi muda sebanyak 164 kegiatan; pembuatan buku juknis / juklak sebanyak 293 kegiatan; pengadaan buku-buku perpustakaan sebanyak 28.750 eksemplar; penyelenggaraan seni baca kitab suci sebanyak 299 kegiatan; penyelenggaraan lomba, sayembara, dan festival sebanyak 170 kegiatan; pengadaan alat pendidikan; pengadaan alat

pengolah data sebanyak 435 unit, pengembangan hubungan kerja sama luar negeri sebanyak 88 kegiatan, serta peningkatan mutu pendidikan sebanyak 588 kegiatan.

Pada tahun 2008 disediakan dana untuk bantuan beasiswa sebanyak 1.799 orang; bantuan sarana peribadatan 85 lokasi; bantuan untuk organisasi sosial/yayasan/LSM sebanyak 62 paket; pembangunan gedung kantor; pemberian bantuan sosial kepada 145 lembaga; bantuan subsidi di 113 lokasi; bimbingan dan pemberdayaan fungsi dan manajemen masjid di 11 lokasi; dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat sebanyak 48 kegiatan; kerja sama antarinstansi pemerintah/swasta/lembaga terkait sebanyak 825 kegiatan; pembinaan pendidikan agama pada sekolah umum di 2.870 lokasi; pembinaan penyuluh agama sebanyak 112 kegiatan; pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi sebanyak 78 kegiatan; pembinaan generasi muda sebanyak 113 kegiatan, pembuatan buku juknis/juklak; pengadaan buku-buku perpustakaan sebanyak 368.935 eksemplar; pendidikan agama dan penyelenggaraan seni baca kitab suci 306 kegiatan; penyelenggaraan lomba, sayembara, dan festival; pengadaan alat pendidikan;, pengadaan alat pengolah data; pengembangan hubungan kerja sama luar negeri sebanyak 180 kegiatan; peningkatan mutu pendidikan 1.044 kegiatan.

Pemberdayaan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam berpartisipasi untuk menunjang perubahan sosial masyarakat dilakukan dengan memberikan pelayanan pendidikan dan mengembangkan sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat pedesaan dan ekonomi lemah. Pada tahun 2005 telah dilakukan kegiatan pemberdayaan kelompok jemaah keagamaan, majelis taklim, dan organisasi keagamaan; pengadaan buku untuk perpustakaan; pemberian bantuan pembangunan gedung untuk operasional pendidikan; pemberian bantuan pemberdayaan ekonomi umat Hindu dengan sistem bergulir, pelaksanaan pabbajja samanera; pemberian

bantuan penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga sosial keagamaan.

Pada tahun 2006 kegiatan pengembangan lembaga sosial keagamaan, antara lain, meliputi pembangunan dan rehabilitasi gedung; pemberian bantuan operasional, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan di 207 lokasi, bantuan usaha ekonomi produktif; pelatihan kewirausahaan; pemberian bantuan sosial dan pembinaan generasi muda.

Pada tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan beasiswa; pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah di 160 lokasi; bantuan untuk organisasi sosial/yayasan/LSM di 681 lokasi; pemberian bantuan usaha ekonomi produktif; bimbingan dan dakwah agama; kerja sama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga terkait sebanyak 349 kegiatan; bantuan operasional dan pemeliharaan fasilitas pendidikan di 120 lokasi; pemberian bantuan sosial di 530 lokasi; pemberian subsidi di 190 lokasi; pembinaan dan bimbingan ibadah; pembinaan dan pendataan sekolah swasta; pembinaan dan pelayanan pondok pesantren di 5.741 lokasi; pembinaan generasi muda; pembinaan mental dan agama; pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis sebanyak 273 angkatan, pembinaan olahraga dan kesenian; pembuatan buku juknis/juklak; pengadaan alat bengkel/keterampilan; pengadaan alat pengolah data sebanyak 212 unit; pengadaan alat pendidikan; pengadaan kitab suci dan buku agama lainnya sebanyak 24.157 eksemplar; peningkatan kualitas tenaga pengelola lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan; peningkatan pendidikan luar sekolah pada pondok pesantren sebanyak 2.239 kegiatan; penyelenggaraan ceramah/ diskusi/seminar/sarasehan sebanyak 151 kegiatan; pengadaan buku sebanyak 29.277 eksemplar; pengadaan buku-buku perpustakaan sebanyak 5.006 eksemplar; penyelenggaraan pendidikan salafiyah dan pengembangan santri sebanyak 477 kegiatan; penyuluhan dan penyebaran informasi sebanyak 16 angkatan. Pada tahun 2008 disediakan dana untuk kegiatan berupa pemberian bantuan beasiswa; pemberian bantuan

pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah; pemberian bantuan untuk orsos/yayasan/LSM di 364 lokasi, bantuan usaha ekonomi produktif; bimbingan dan dakwah agama; kerja sama antarinstansi pemerintah/swasta/lembaga terkait sebanyak 186 kegiatan; pemberian bantuan operasional dan pemeliharaan fasilitas pendidikan; pemberian bantuan sosial di 483 lokasi; pemberian subsidi di 316 lokasi; pembinaan dan bimbingan ibadah sosial; pembinaan dan pendataan sekolah swasta; pembinaan dan pelayanan pondok pesantren sebanyak 2.705 kegiatan; pembinaan generasi muda; pembinaan mental dan agama sebanyak 318 kegiatan; pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis sebanyak 179 angkatan; pembinaan olahraga dan kesenian; pembuatan buku juknis/juklak; pendidikan agama dan penyelenggaraan seni baca kitab suci; pengadaan alat bengkel/keterampilan; pengadaan alat pengolah data; pengadaan alat pendidikan; pengadaan kitab suci dan buku agama lainnya sebanyak 32.766 eksemplar; peningkatan kualitas tenaga pengelola lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan; peningkatan pendidikan luar sekolah pada pondok pesantren sebanyak 934 kegiatan; penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan sebanyak 434 kegiatan; pengadaan buku sebanyak 53.908 eksemplar; pengadaan buku-buku perpustakaan sebanyak 2.975 eksemplar; penyelenggaraan pendidikan salafiyah dan pengembangan santri sebanyak 622 kegiatan; penyuluhan dan penyebaran informasi.

Upaya penelitian dan pengembangan agama dilaksanakan dalam rangka menyediakan data dan informasi bagi pengembangan kebijakan pembangunan bidang agama serta masyarakat akademik dan umum guna mendukung tercapainya program pembangunan bidang agama. Pada tahun 2008 telah disediakan dana untuk kegiatan berupa pembuatan buku juknis/juklak sebanyak 104 judul, pembudayaan dan pemasyarakatan; penelitian ilmu pengetahuan terapan karya ilmiah/seminar/iptek dan seni sebanyak 8.830 eksemplar; penelitian pengembangan bidang sosial dan ekonomi; penerbitan majalah/jurnal sebanyak 962 kegiatan; pengadaan alat pengolah

data; penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan; penyusunan indikator sasaran dan indikator keberhasilan; peningkatan pengkajian kerukunan umat beragama.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang agama dan hasil yang telah dicapai, diperlukan langkah dan tindak lanjut sebagai sebagai berikut:

- ✓ Upaya untuk meningkatkan pemahaman penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai ajaran agama akan terus dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara; pembinaan calon penganten dan pelaksanaan nikah serta rujuk; pelatihan bagi penyuluh, pembimbing, mubalig/dai, dan orientasi bagi pemuka agama; pembentukan jaringan dan kerja sama lintas sektor serta masyarakat untuk memberantas pornografi, pornoaksi, praktik KKN, perjudian, penyalahgunaan narkoba, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila; pemberian bantuan sarana dan prasarana penerangan dan bimbingan keagamaan; pengembangan materi, metodologi, manajemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan; pemberian bantuan paket dakwah untuk daerah tertinggal, terpencil, pascakonflik dan bencana alam serta bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan keagamaan seperti musabaqah tilawatil Quran (MTQ dan STQ), pesparawi, utsawa Dharma Gita, Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Budha, dan kegiatan sejenis lainnya. Upaya lain yang akan dilakukan adalah melanjutkan subsidi tunjangan fungsional penyuluh agama non-PNS sebanyak 90.510 orang; peningkatan mutu penerangan agama dan bimbingan keagamaan; pemberian bantuan penyelenggaraan festival keagamaan; peringatan hari besar keagamaan; pengembangan materi, manajemen dan pemberian bantuan paket pelayanan agama untuk daerah terpencil, perbatasan, tertinggal, pascakonflik, dan bencana alam; peningkatan

pemberantasan pornografi, pornoaksi; pemantapan peraturan perundangan bidang agama.

- ✓ Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama, antara lain, meliputi pembangunan dan rehabilitasi sarana keagamaan berupa rumah ibadat terutama di daerah yang terkena bencana, pembangunan gedung KUA di daerah yang belum memiliki gedung KUA, dan pemberian bantuan rehabilitasi sarana keagamaan yang mengalami kerusakan serta bantuan sarana ibadat di lingkungan sekolah dan mutu pelayanan ibadat haji.
- ✓ Upaya untuk memantapkan kerukunan umat beragama mengalami kendala, antara lain, karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah dan penegakan hukum yang lemah. Upaya yang akan dilakukan, antara lain, peningkatan pelaksanaan forum dialog dan temu ilmiah antarpemuka agama dan cendikiawan agama; pengembangan wawasan multikultural bagi guru agama dan penyuluh agama; pemberian bantuan operasional forum komunikasi kerukunan umat beragama; pemberian bantuan kegiatan pemulihan pascakonflik; sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, percepatan pembangunan di provinsi Sulawesi Tengah.

- ✓ Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dilakukan melalui penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pelatihan bagi pendidik bidang agama dan keagamaan dengan memberi tambahan muatan materi wawasan

multikulturalisme. Peningkatan mutu juga dilakukan dengan pemberian bantuan beasiswa bagi pendidik bidang agama yang mengikuti program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dilakukan perbaikan kurikulum pendidikan agama yang diarahkan pada pembentukan akhlak dan karakter; pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan lain yang bermutu; penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan lain yang akan dilakukan adalah pemberian bantuan laboratorium dan perpustakaan di lembaga pendidikan keagamaan; pemberian bantuan imbal swadaya untuk madrasah diniyah; pemberian bantuan pengembangan organisasi pondok pesantren, pasraman, pabbajja samanera/ samaneri; pengembangan kegiatan keagamaan oleh organisasi kesiswaan di sekolah; pembinaan lembaga pendidikan agama; pembinaan pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sekolah; pemberian bantuan sarana, peralatan, buku pelajaran agama, dan buku bacaan bernuansa agama lainnya untuk sekolah umum, perguruan tinggi umum, dan lembaga pendidikan keagamaan.

- ✓ Mengingat peran lembaga sosial keagamaan serta lembaga pendidikan agama dan keagamaan cukup strategis, salah satu prioritas pembangunan agama ke depan adalah terus meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga tersebut. Kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan, antara lain, pengembangan manajemen lembaga sosial keagamaan; pemberian bantuan operasional tempat ibada; pemberian bantuan operasional majelis/ormas keagamaan; pemberian bantuan sarana prasarana lembaga keagamaan; peningkatan mutu SDM lembaga sosial keagamaan; pemberdayaan lembaga keagamaan.

- ✓ Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan cermat serta membantu penentuan kebijakan akan dilakukan melalui kajian dan pengembangan dalam meningkatkan mutu pembinaan dan partisipasi masyarakat mendukung pelayanan kehidupan beragama; peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; peningkatan mutu dan relevansi pendidikan agama dan keagamaan; peningkatan kerukunan dan harmonisasi kehidupan beragama; peningkatan mutu pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; serta pemberdayaan pemanfaatan lektur keagamaan.

BAB VII
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Strategi program pemberdayaan masyarakat Indonesia perlu ditetapkan agar tujuan program tersebut dapat tercapai. Penyusunan strategi dilakukan melalui tahap pengumpulan informasi kondisi Indonesia. Selanjutnya dilakukan analisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan analisis faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Pada bab-bab terdahulu sudah dijelaskan secara rinci informasi tentang kondisi Indonesia terkait dengan program pemberdayaan masyarakat. Pada Bab ini akan dilakukan analisis faktor internal dan eksternal berdasarkan informasi yang sudah diperoleh dari bab-bab sebelumnya. Selanjutnya ditetapkan strategi berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal.

A. FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

1. Kekuatan

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di Indonesia dikuatkan dengan adanya lembaga pemerintah, anggaran dan KSM/LSM yang tersedia untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam Indonesia dapat digunakan sebagai faktor pendorong pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Berikut dijelaskan pengaruh faktor-faktor terhadap program pemberdayaan masyarakat :

a. Tersedianya lembaga pemerintah yang berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat

Sebagian besar Kementerian Republik Indonesia mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk memberdayakan masyarakat tetapi hanya beberapa yang secara khusus menangani urusan pemberdayaan masyarakat.

Berikut beberapa Kementerian dan badan/dinas di Pemerintah Daerah yang bertugas secara khusus dalam Pemberdayaan Masyarakat.

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kementerian Sosial
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- Dinas Sosial

Keberadaan lembaga-lembaga yang khusus menangani program pemberdayaan masyarakat merupakan kekuatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

- ✓ Tersedianya Angggaran Negara untuk pemberdayaan masyarakat

Pemerintah menyediakan anggaran tetap setiap tahun untuk program pemberdayaan melalui lembaga terkait. Anggaran tersebut dapat melalui dana tugas pembantuan, dekonsentrasi, APBD dan dana desa.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota,

dan/atau Desa. Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa.

✓ Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk di indonesia mencapai 255 juta penduduk pada tahun 2015. Jumlah penduduk yang besar memiliki keuntungan, yaitu sebagai sumber tenaga kerja bagi pembangunan dan sebagai pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau industri. Karena dengan banyaknya penduduk, Indonesia tidak kekurangan tenaga kerja, khususnya untuk industri dan tidak perlu mengimpor tenaga kerja asing, yang memiliki bayaran lebih mahal dari pada tenaga kerja di dalam negeri.

Selain jumlah penduduk yang besar, Indonesia juga akan mengalami kondisi bonus demografi pada tahun 2020. Dengan adanya kondisi bonus demografi, bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memajukan kesejahteraan serta memakmurkan masyarakat apabila masyarakat usia produktif memiliki kualitas sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara.

✓ Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Buatan

Posisi Indonesia yang terletak di garis ekuator menyebabkan Indonesia memiliki suhu yang hangat sepanjang tahun. Rata-rata suhu permukaan di ketinggian nol (garis pantai) umumnya berada di atas 25°C. Sebagian besar wilayah Indonesia yang merupakan wilayah perairan membuat Indonesia dikenal memiliki iklim maritim, yaitu kondisi iklim yang sangat dipengaruhi oleh kondisi suhu permukaan laut di perairan yang cepat berubah dan sangat fluktuatif. Suhu udara yang tinggi pada siang hari sangat potensial untuk terjadinya penguapan air yang berdampak pada bertambahnya kelembaban udara. Mengetahui dan memahami kondisi dan kualitas lingkungan sangat penting sebagai dasar

kebijakan suatu negara untuk memanfaatkan potensi lingkungan yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar berupa hutan, minyak, gas bumi, laut dan berbagi hasil tambang lainnya. Sedangkan potensi sumber daya buatan yang ada di Indonesia berupa sawah, waduk, perkebunan, dan cagar budaya. Sumber daya ini merupakan kekuatan pendorong yang sangat besar dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Lebih rinci tentang kondisi potensi sumber daya alam dan buatan di Indonesia sudah dijelaskan dalam Bab IV buku ini.

- ✓ Kelompok Swadaya Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat

Munculnya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di tengah masyarakat dapat menjadi faktor pendorong keberhasilan dalam program pemberdayaan masyarakat. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan kumpulan orang yang menghimpun diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu yaitu kepentingan dan kebutuhan yang sama sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Beberapa penelitiian menggambarkan KSM/LSM berperan dalam pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang seperti :

- **Bidang Pertanian.**

KSM/LSM menyelenggarakan proyek-proyek yang mendorong kemandirian masyarakat, seperti proyek tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Secara spesifik, proyek-proyek itu mengembangkan pertanian lahan kering, Tambak Inti Rakyat, Perkebunan Inti Rakyat, mengelola berbagai pusat latihan pertanian, dan mendorong terbentuknya kelompok-kelompok swadaya petani.

- **Bidang Kesehatan.**

KSM/LSM memelopori program dana sehat serta Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), yang kemudian disebarluaskan oleh pemerintah. Demikian juga dengan Program Keluarga Berencana (KB), dirintis oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan selanjutnya dikembangkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Di banyak tempat, KSM/LSM juga mengupayakan tersedianya air bersih untuk minum dan program kesehatan masyarakat.

- **Bidang Keuangan.**

KSM/LSM yang mempunyai kegiatan di bidang pemupukan modal, dengan menyelenggarakan tabungan dan kredit. Mereka kemudian dihubungkan dengan bank, sehingga timbul Program Hubungan Bank dan KSM (PHBK). Sementara itu CUCO (Credit Union Counceling Office) telah menumbuh kembangkan ribuan koperasi kredit dengan total aset puluhan milyar rupiah.

- **Bidang Pendidikan**

KSM/LSM menyelenggarakan program pelatihan untuk tenaga pendamping dan pengelola kegiatan yang mengembangkan kemandirian masyarakat. Selain itu, banyak juga KSM/LSM yang menyelenggarakan pendidikan non-formal di berbagai bidang serta melakukan pembinaan usaha kecil.

- **Bidang Lingkungan Hidup.**

KSM/LSM mengupayakan kesadaran masyarakat dan mendorong kepeloporan untuk melestarikan lingkungan hidup. KSM/LSM juga memperjuangkan dilaksanakannya undang-undang lingkungan hidup dalam dunia industri, seperti masalah pengolahan limbah.

- **Kelemahan**

Beberapa hal berikut diidentifikasi menjadi faktor internal yang melemahkan berjalannya program pemberdayaan masyarakat di Indonesia :

1) Kondisi Sosial Budaya

- Sikap yang tertutup terhadap perubahan/hal baru

Masyarakat yang kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar dapat menyebabkab kurangnya memnadapat informasi tentang perkembangan dunia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tersebut terasing dan tetap terkurung dalam pola-pola pemikiran yang sempit dan lama. Dampak lainnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi pada masyarakat tersebut menjadi lambat. Umumnya masyarakat yang seperti ini masih mempertahankan tradisi dan menganggap tradisi tak dapat diubah secara mutlak, dapat mengakibatkan terhambatnya perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat tak bersedia menerima inovasi dari luar. Padahal, inovasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan dalam suatu masyarakat.

a. Kecurigaan kepada hal-hal baru

Salah satu penghambat terwyujudnya perubahan sosial pada masyarakat adalah timbulnya kecurigaan yang terlalu besar terhadap hal-hal yang baru. Masyarakat yang memiliki rasa curiga terhadap hal-hal baru akan sulit menerima inovasi dan teknologi yang baru. Hal ini menyebabkan, daerah tersebut umumnya akan tertinggal dalam penerapan inovasi dan teknologi yang bermanfaat buat mereka.

b. Adat istiadat yang berlaku di masyarakat

Salah satu yang merupakan penghambat terwujudnya perubahan sikap dan perilaku penduduk adalah adat istiadat yang sudah biasa berlaku di daerah mereka. Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa kedatangan inovasi dan teknologi baru dapat menyebabkan kerusakan pada aturan dalam adat-istiadat yang

sudah dijalankan sejak lama. Muncul kekhawatiran masyarakat, hal-hal baru akan menyebabkan kepunahan adat-istiadat serta kelembagaan sosial yang mereka miliki.

c. Ketidakmandirian masyarakat

Masyarakat yang terlalu tergantung pada pihak lain dapat mengakibatkan upaya mewujudkan kemandirian memerlukan wakyu yang cukup lama. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain, penyuluh, pendamping sosial dan pemerintah setempat.

d. Norma-norma yang sudah ditetapkan dalam masyarakat

Norma yang ditetapkan umumnya sangat terkait dengan kebiasaan yang ada dalam suatu masyarakat. Aturan yang tidak tertulis tetapi dapat mengikat anggota masyarakat disebut norma. Norma yang ada dalam masyarakat bisa jadi pendukung perubahan tetapi ada juga norma yang menghambat terjadinya perubahan dalam masyarakat.

e. Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya *(systemic and cultural coherence)*

Suatu sistem atau pola yang berubah dalam suatu daerah akan diikuti oleh perubahan sistem lain yang masih saling terkait. Hal ini disebabkan adanya kesatuan dan keterpaduan antar sistem. Misalnya, sistem mata pencaharian yang berubah dari ladang berpindah jadi lahan pertanian tetap akan diikuti perubahan pada sistem lain yang terkait, seperti pola pengasuhan anak, pola konsumsi dan lain-lain.

f. Kepentingan sekelompok tertentu

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dapat terhambat akibat kepentingan kelompok tertentu. Sebagai contoh, pengusaha yang berniat untuk membeli lahan yang seharusnya digunakan sebagai lahan pertanian implementasi program pemberdayaan petani. Pada umumnya, kelompok yang berkepentingan tersebut akan mengupayakan segala cara untuk

mendapatkan lahan tersebut. Hal ini menyebabkan program yang sudah direncanakan terhambat atau tidak dapat dilaksanakan.

g. Nilai kesakralan di masyarakat *(the sacrosanct)*.

Program pemberdayaan masyarakat yang tidak berbenturan dengan nilai kesakralan umumnya akan lebih mudah diimplementasikan. Misalnya, di beberapa daerah banyak ditemukan tempat-tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat sehingga tidak diijinkan adanya pembangunan atau pengembangan infrastruktur.

h. Sikap yang menolak terhadap kehadiran orang luar

Dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat sering ditemukan penolakan masyarakat terhadap orang luar seperti penyuluh, pelatih atau pendamping. Hal ini disebabkan adanya kecurigaan dan ketidaknyamanan atas kehadiran orang baru. Kecurigaan ini menyebabkan penyuluh atau pendamping yang bukan berasal dari masyarakat memerlukan waktu yang lama untuk beradaptasi agar bisa diterima di masyarakat. Selain itu, kecurigaan ini akan menyebabkan rendahnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat terhadap program yang dijalankan.

2) Kondisi lingkungan Indonesia

Kondisi lingkungan hidup Indonesia yang sudah banyak mengalami kerusakan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Beberapa penelitan dan laporan lembaga terkait mencatat permasalahan lingkungan hidup yang sedang dihadapi Indonesia saat ini adalah:

- Permasalahan Sungai yang Tercemar
- Kerusakan Hutan
- Pencemaran Udara
- Pencemaran Tanah

B. FAKTOR EKSTERNAL

1. Peluang

Perdagangan Bebas

Kondisi dimana tidak ada hambatan terhadap proses keluar masuknya barang, jasa dan manusia antar negara di seluruh dunia disebut perdagangan bebas. Perdagangan bebas dapat menciptakan peluang dan menimbulkan ancaman untuk negara Indonesia. Kemudahan penjualan produk Indonesia karena ada pemberlakukan non tarif merupakan peluang yang harus dimanfaatkan negara Indonesia.

Perdagangan bebas tidak hanya memungkinkan perdagangan produk dan jasa tetapi juga tenaga kerja. Jumlah penduduk yang sangat banyak sangat menguntungkan jika bisa memanfaatkan peluanga yan tersedia. Tenaga kerja Indonesia mempunyai kesempatan yang luas untuk bekerja di negara lain.

2. Ancaman

Pemanasan Global

Terjadinya peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi merupakan penyebab terjadinya pemanasan global. Suhu permukaan bumi yang meningkat adalah akibat pancaran sinar matahari ke bumi, yang selanjutnya berubah menjadi energi panas berbentuk sinar infra merah yang kemudian udara dan permukaan bumi menyerap sinar ini.

Pemanasan global mengakibatkan cuaca berubah secara ekstrim. Perubahan cuaca ekstrem inilah yang kemudian menimbulkan gangguan terhadap kehidupan manusia serta ekologi yang ada di bumi. Sebagai contoh akibat perubahan cuaca yang ekstrim ditemukannya beberpa hewan yang berpindah dan berdapatasi dengan habitat yang baru. Beberap tanaman ditemukan mengalami perubahan sistem pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang tidak bisa beradapatsi dapat menyebabkan kepunahan karena akan terseleksi alami. Kemampuan bertahan kemungkinan akan memunculkan species baru, dan menyebabkan kepunahan species yang lama.

Pemanasan global juga berpengaruh sangat besar di sektor sosial. Perubahan cuaca ekstrim seperti kemarau panjang menyebabkan gagal panen pada sektor pertanian. Hal ini dapat menculnya bencana kelaparan dan kurang gizi di masyarakat. Banyak penyakit yang muncul akibat terjadinya perubahan cuaca ekstrim. Penyakit yang umum terjadi adalah penyakit kulit dan pernafasan. Penyakit menular sangat mudah merebak karena proses penyebaran sangat mudah pada musim tertentu. Penyakit pernafasan umumnya muncul akibat tingginya pencemaran udara. Terciptanya kelestarian lingkungan di seluruh dunia juga sangat terpengaruh dengan adanya pemanasan global. Terjadinya kekeringan air di berbagai sumber air akibat kenaikan suhu bumi menyebabkan hampir sebagian besar warga dunia untuk menjangkau air bersih. Kesulitan air bersih mendesak masyarakat menggunakan air yang kotor, dan berpotensi untuk menimbulkan berbagai penyakit pencernaan seperti diare.

Di Indonesia sendiri, dampak pemanasan global ini juga menimbulkan persoalan lingkungan yang serius. Beberapa tahun terakhir ditemukan kasus kebakaran hutan karena naiknya suhu bumi yang ekstrim.

Perdagangan Bebas

Selain menjadi peluang, perdagangan bebas pula dipandang sebagai suatu ancaman. Perdagangan bebas akan menjadi ancaman jika Negara Indonesia tidak siap menghadapi persaingan internasional. Upaya-upaya yang harus dipersiapkan dalam menghadapi perdagangan bebas antara lain sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas tenaga kerja dan pelaku usaha yang tinggi sangat dibutuhkan agar mempunyai kemampuan bersaing di dunia internasional. Terbatasnya jumlah lapangan kerja yang tersedia menyebabkan tenaga kerja harus dipersiapkan dengan ketrampilan dan pengetahuan yang memadai.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mutu produk yang memiliki daya saing tinggi. Mutu merupakan bagian isu kritis dalam perdagangan bebas. Kemampuan suatu daerah, negara,

industri dan perusahaan dalam menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional disebut daya saing. Faktor keunggulan komparatif *(comparative advantage)* dan faktor keunggulan kompetitif *(competitive advantage)* merupakan faktor-faktor menentukan kemampuan daya saing negara dalam perdagangan bebas. Keunggulan komparatif merupakan faktor penentu yang bersifat alamiah sedangkan keunggulan kompetitif merupakan faktor yang bisa diciptakan (*acquired)*. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan daya saing suatu negara adalah keunggulan daya saing berkelanjutan atau *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*. Keunggulan ini harus dimiliki suatu negara karena tingkat persaingan perdagangan bebas terus mengalami peningkatan atau *Hyper Competitive*.

Tingkat daya saing Indonesia pada tahun 2011 berada pada peringkat ke-46 berdasarkan laporan yang disampaikan *The Global Competitiveness Report*. Posisi ini menurun dibanding tahun 2010 yang berada di posisi ke-44. Kondisi ini merupakan peringatan buat pemerintah agar mengkaji kembali atas peraturan dan implementasi pembangunan yang sudah dilakukan.

C. MACAM-MACAM STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Secara garis besar, ada 3 (tiga) strategi utama yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu:

1. Strategi tradisional

Prinsip penggunaan strategi ini adalah masyarakat didorong untuk memahami permasalahan dan kebutuhan dan mempunyai kebebasan membuat pilihan paling baik. Dalam hal ini tidak ada pihak lain yang mencampuri masyarakat dalam penentuan keputusan.

2. Strategi *direct-action*

Strategi ini memerlukan dominasi kepentingan yang dihormati semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi.

3. Strategi *transformatif*

Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang diperlukan sebelum pengindentifikasian kepentingan diri sendiri.

Nasikun (dalam Jefta Leibo, 1995), menyatakan berbagai strategi dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Strategi pembangunan gotong royong,
2. Strategi pembangunan Teknikal-Profesional,
3. Strategi Konflik
4. Strategi pembelotan kultural.

1. Strategi pembangunan gotong royong

Penggunaan strategi gotong royong didasari pandangan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem sosial. Dalam hal ini, masyarakat dibentuk dari berbagai elemen yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Strategi gotong royong mempercayai perubahan sikap dan perilaku masyarakat bisa dicapai apabila ada keterlibatan dari setiap elemen atau masyarakat. Demokratis dan kegiatan yang dilakukan atas keikhlasan dan sukarelan merupakan prosedur pelaksanaan gotong royong.

2. Strategi pembangunan Teknikal – Profesional

Strategi pembangunan teknikal-profesional menggunakan prosedur baru dan norma dalam menghadapi perubahan situasi atau untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Peran fasilitator, pendamping dan agen pembaruan sangat penting dalam strategi ini. Agen pembaharuan adalah sebuah kelompok kerja yang dibentuk untuk menemukan cara –cara yang lebih kreatif sehingga hambatan –hambatan. Agen ini terdiri dari beberapa

warga masyarakat yang dipilih dan di beri kepercayaan untuk melakukan tujuan bersama. Para agen pembaruan berperan dalam berbagai hal yaitu menyusun perencanaan program pemberdayaan yang akan didiskusikan bersama dengan masyarakat, melayani masyarakat dalam hal pendampingan, dan menetapkan berbagai pilihan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pencapaian tujuan.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dalam konsiderannya menyatakan bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta swadaya gotong royong dalam pembangunan di desa dan kalurahan perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan. Adapun peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah mempercepat perubahan (*enabler*), perantara *(mediator*), pendidik *(educator)*, perencana *(planer)*, advokasi *(advocation)*, aktivis *(activist)* dan pelaksana teknis *(technisi roles)*. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 menerapkan Strategi pembangunan Teknikal-Profesional

3. Strategi Konflik

Strategi konflik digunakan apabila dalam masyarakat ditemukan adanya dominasi sekelompok masyarakat untuk memenuhi kepentingannya. Dalam penggunaan strategi ini sangat dianjurkan pengorganisasian seluruh masyarakat yang merasa dirugikan agar mempunyai kesempatan menyampaikan pendapat dan mendapat keadilan dalam penggunaan sumberdaya. Strategi ini menekankan pada perubahan struktur oraganisasi sehingga ada pemerataan kekuasaan dan perubahan aturan yang diputuskan masyarakat.

4. Strategi pembelotan kultural

Mengutamakan perubahan pada tingkat personal, berupa perubahan nilai-nilai pribadi menjadi gaya hidup yang saling mengasihi sesama merupakan strategi pembelotan kultural. Gaya hidup ini disebut juga humanis-relegius. Implementasi strategi digunakan dalam rangka pembelotan terhadap kehidupan masyarakat modern industrial yang tumbuh bertentangan dengan gaya hidup yang humanis-religius

D. PEMILIHAN STRATEGI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan strategi dalam pemberdayaan masyarakat antara lain:

1. *Acceptable* dimana masyarakat tidak sulit untuk mendayagunakan serta menerima starategi tersebut.
2. Accountable dimana masyarakat dapat mengelola secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
3. *Profitable,* dimana masyarakat memperoleh manfaat secara ekonomi dan masyarakat dididik untuk mampu melakukan pengelolaan kegiatan secara ekonomis.
4. *Sustainable*, dimana masyarakat dapat melestarikan hasil pemberdayaan masyarakat. Pencapaian dilakukan dengan pemupukan modal serta pembentukan lembaga keuangan di masyarakat.
5. *Replicable*, dimana proses dan hasil pemberdayaan yang diterapkan dapat dengan mudah diimplementasikan dalam lingkup masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan informasi faktor intenal dan eksternal yang diperoleh, beberapa strategi bisa dipertimbangkan untuk diimplementasikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

Strategi 1

Penguatan keberdayaan masyarakat dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. *Enabling*, yaitu penciptaan kondisi yang mendukung berkembangnya potensi masyarakat.

Prinsip *enabling* adalah membuat masyarakat mampu untuk mengoptimalkan penggunaan kemampuan yang dimiliki, karena setipa orang mempunyai kemampuan dan potensi yang bisa dikembangkan.

b. *Empowering* yaitu menguatkan daya dan kemampuan masyarakat.

Upaya nyata dengan *empowering* antara lain dengan meningkatkan pendidikan, kualitas kesehatan, dan akses terhadap sumber peningkatan perekonomian. Sumber-sumber yang bisa meningkatkan ekonomi antara lain permodalan, informasi dan teknologi, pasar dan lapangan kerja. Membangun prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu,

pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

c. Perlindungan

Implementasi program pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencegah terjadinya kondisi dimana masyarakat yang lemah bertambah lemah karena ketidakmampuan berhadapan dengan yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian *(charity)*. Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Strategi 2

Mencanangkan Program Pembangunan Pedesaan, yaitu

1. pembangunan pertanian,
2. industrialisasi pedesaan,
3. pembangunan masyarakat desa terpadu, dan
4. strategi pusat pertumbuhan

1. Pembangunan Pertanian

Program pembangunan pertanian merupakan program untuk meningkatkan output dan pendapatan para petani. Program ini juga menjawab keterbatasan pangan di pedesaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan,

serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor produk pertanian bagi negara maju.

2. Program Industrialisasi Pedesaan

Tujuan utama Program industrialisasi pedesaan adalah, untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Pengembangan industrialisasi pedesaan merupakan alternatif menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dan lapangan kerja dipedesaan.

3. Program Pembangunan Masyarakat Desa Terpadu

Tujuan utama Program pembangunan masyarakat desa terpadu adalah untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian. Ada enam unsur dalam pembangunan masyarakat terpadu, yaitu:

a. pembangunan pertanian dengan padat karya,
b. memperluas kesempatan kerja,
c. intensifikasi tenaga kerja dengan industri kecil, mandiri
d. meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan,
e. mengembangkan perkotaan yang dapat mendukung pembangunan pedesaan,
f. membangun kelembagaan yang dapat melakukan koordinasi proyek multisektor.

4. Strategi pusat pertumbuhan

Strategi pusat pertumbuhan, merupakan alternatif untuk menentukan jarak ideal antara pedesaan dengan kota, sehingga kota benar-benar berfungsi sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produksi. Cara yang ditempuh adalah membangun pasar di dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, dan pusat informasi tentang hal-hal berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen. Pusat pertumbuhan diupayakan agar secara social tetap dekat dengan desa, tetapi secara eknomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti kota.

Strategi 3.

Strategi pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal di era globalisasi yakni dengan memperkuat nilai-nilai dan norma-norma leluhur dari nenek moyang yang ada di masyarakat agar terjaga utuh kearifan lokal; mempertahankan budaya yang ada di masyarakat dengan bertindak secara rasional sebagai akibat dari arus globalisasi; menyaring budaya dari luar (globalisasi) dengan menilai baik buruknya pengaruh dalam bidang teknologi dan komunikasi, transportasi, pengembangan media massa, perubahan gaya hidup, pendidikan, budaya, politik, agama, hukum dll.

Setiap upaya dan strategi pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan kuat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pencapaian suatu programpemberdayaan merupakan hasil interaksi elemen-elemen pemberdayaan sebagai strategi pemberdayaan yang diterapkan. Upaya dan strategi pemberdayaan merupakan suatu pendulum antara paradigma evolusi dan paradigma revolusi, namun tidak berarti bahwa setiap paradigma akan muncul secara mutlak. Kedua paradigma tersebut merupakan suatu gradasi dengan proporsi yang sesuai dengan kebutuhan kelembagaan petani. Pengembangan model pemberdayaan akan selalu berada di antara kedua paradigma tersebut dengan proporsi yang sejalan dengan tuntutan kebutuhan petani.

Implikasi kebijakan pembahasan fungsi dan peran kelembagaan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan kelembagaan petani dan pertanian adalah bahwa kebijakan pemberdayaan kelembagaan petani dan pertanian hendaknya mencakup seluruh elemen sosial ekonomi yang terdapat dalam setiap kelompok masyarakat atau etnis yang berbeda. Konsekuensinya penerapan kebijakan pemberdayaan memerlukan strategi pendekatan yang mampu memfasilitasi aspirasi sosial budaya dan aspirasi teknis petani dan kelembagaan petani serta lembaga pembangunan pertanian setempat.

Berikut salah satu contoh strategi masyarakat yang berhasil diterapkan di masyarakat di Kampung Demangan RW 05, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta yang merupakan laporan hasil penelitian Saparwadi tahun 2016.

Beberapa strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh PKK RW 05 di kampung Demangan, adalah sebagai berikut :

1. Tahap Sosialisasi

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang pertama adalah tahap sosialisasi kepada warga. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk menginformasikan kepada warga kampung Demangan tentang pentingnya memiliki suatu kegiatan, dengan harapan terjadi penyadaran kepada warga seputar jiwa sosial atau kebersamaan, dan dapat mempengaruhi cara berfikir masyarakat terhadap persoalan-persoalan kemiskinan dan masalah-masalah kehidupan yang lainnya, sehingga dapat menekan pemerintah dalam setiap kebijakan dalam pembangunan yang harus memperhatikan kehidupan masyarakat supaya tidak mengejar keuntungan materi semata, tetapi memperhatikan kesimbangan kehidupan masyarakat dalam setiap pembangunan. Sosialisasi yang di lakukan PKK lewat berbagai cara, seperti pengajian, perkumpulan RW, Arisan Ibu-ibu, dan lain sebagainya. Dari perkumpulan itulah pengurus awal PKK mempublikasikan persoalan seputar masalah-masalah sosial kepada warga sekitar.

Dalam penyampaian sosialisasi yang dilakukan pengurus PKK adalah tentang pentingnya hidup sosial saling membantu antar sesama, dan masing-masing memiliki kegiatan, dan pendapatan tambahan, langkah ini dilakukan agar warga tertarik belajar dan mau hidup saling membantu. Awal sosialisasi dilakukan banyak warga yang belum merespon kegiatan yang ada di PKK, dengan kerja keras dari pengurus. Sosialisasi tidak dilakukan pada awal PKK berdiri melainkan sampai sekarang pengurus PKK terus memberi semangat kepada warga yang sudah mengikuti kegiatan PKK dan memberi informasi kepada warga yang belum tertarik dalam kegiatan PKK. Pengurus PKK juga

membuat akun Facebook PKK, sebagai sarana untuk memperkenalkan kegiatan- kegiatan maupun hasil dari keterampilan PKK kepada masyarakat baik di lingkup kelurahan maupun di luar kelurahan. Hal tersebut untuk memperkenalkan kegiatan PKK kepada masyarakat, dengan harapan menjadi contoh semua masyarakat yang ingin memperbaiki kehidupan sosialnya.

Akun Facebook PKK Kampung Demangan terbuka untuk umum sebagai media informasi. Langkah pertama ini sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam pemberdayaan, dimana pemberdayaan adalah sebuah upaya untuk membangun sumber daya manusia, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada warga untuk menentukan kemampuan mereka dalam menentukan kehidupannya dan ikut berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupannya. Dimana dalam strategi pemberdayaan yang terdapat di PKK Kampung Demangan RW 05 yang pertama adalah sosialisasi, sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar masyarakat belajar mendapat 58 pengetahuan maupun keterampilan serta ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan yang ada di PKK kampung Demagan RW 05.

2. Tahap Fasilitasi

Tahapan ini merupakan tahapan pemberian bantuan teknis (*technical assistant*), bantuan manajerial dan pelatihan. Tahap ini dilakukan oleh pengurus PKK dengan menyempurnakan dan memperkuat keorganisasian yang telah dibangun secara bersama-sama antara masyarakat dalam tahap animasi (kegembiraan). Secara umum fasilitasi menjadi bagian penting dalam suatu kegiatan, program atau organisasi untuk mempermudah proses kegiatan

Dalam pembangunan masyarakat kegiatan fasilitasi dilakukan oleh tenaga khusus yang bertugas :

a. Membina kelompok masyarakat yang terkena krisis sehingga menjadi suatu kebersamaan tujuan dan kegiatan yang berorientasi pada upaya perbaikan kehidupan

b. Sebagai pemandu dan fasilitator, penghubung dan penggerak dan pembentukan kelompok masyarakat dan pembimbing pengembangan kegiatan kelompok Tahap fasilitasi ini yang dilakukan oleh PKK supaya masyarakat benar-benar dalam mengikuti program yang ada di PKK Kampung Demangan RW 05.

3. Tahap Pemetaan Tempat

Langkah yang ketiga ini adalah tahap pemetaan tempat, sebelum program PKK direncanakan, para pengurus melakukan Tahap Pemetaan tempat terlebih dahulu, dimana Kampung Demangan warga-nya beraneka ragam dari masing-masing individu, potensi juga berbeda-beda. Langkah yang ketiga ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Edi Suharto: mengetahui karakteristik masyarakat lokal *(Getting to know the local community)* dan mengidentifikasi pemimpin lokal *(Indentifing the local leaders),* dalam penjelasan yang pertama dalam melakukan strategi pemberdayaan, yaitu mengetahui komunitas masyarakat lokal hal ini dapat diartikan mengetahui karakteristik lokal termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat kota yang satu dengan yang lainnya.

4. Tahap Perencanaan

Langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan, dalam perencanaan yang dilakukan PKK Kampung Demangan ini yang pertama adalah membentuk kepengurusan PKK tugas dari pengurus, yaitu bertanggung jawab dalam keberlangsungan program-program PKK, dan perencanaan kedua adalah melakukan studi banding ke PKK yang ada di daerah yang lainnya guna untuk mendapatkan ilmu dan keterampilan dalam kepengurusan PKK. Perencanaan ketiga mengikuti seminar- seminar, perencanaan keempat mencari *link-link* yang dapat diajak kerja sama.

BAB VIII
KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah atau wilayah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab pihak swasta dan seluruh masyarakat. Oleh sebab itu partisipasi pihak swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sangat diperlukan. Supaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tinggi, maka masyarakat harus diberdayakan. Jadi pemberdayaan masyarakat akan sangat mendukung keberhasilan pembangunan.

Sebagaimana sektor-sektor pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, di antaranya menyangkut pembangunan ideologI, pembangunan politik, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, dan lain-lain, maka pemberdayaan masyarakat pun harus diarahkan untuk pembangunan sektor-sektor tersebut.

Bila pemberdayaan masyarakat berhasil, maka akan berkorelasi dengan keberhasilan pembangunan di wilayah atau daerah tersebut.

A. INDIKATOR-INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan
- Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Sosial Ekonomi

Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan

1) Sektor Pertanian

Para petani atau peternak atau petani ikan dan nelayan dikatakan sudah berdaya dapat dilihat dari berbagai ciri atau indikator, yaitu sebagai berikut :

1) Petani pada pertanian tanaman pangan dan perkebunan

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardikanto, bahwa untuk memberdayakan masyarakat perlu dilakukan empat bina, yaitu :

a) bina manusia,
b) bina usaha,
c) bina lingkungan dan
d) bina kelembagaan

Pada kesempatan ini penulis akan menunjukkan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat petani yang meliputi keempat bina tersebut.

a. Bina Manusia

Bina manusia petani dikatakan berhasil jika para petani tersebut mempunyai keterampilan dalam hal melakukan panca usaha pertanian dan penanganan pasca panen dengan baik, yaitu meliputi :

- Pengolahan tanah

Pengolahan tanah yang tepat dari berbagai jenis tanah yang diperuntukkan berbagai jenis tanaman yang akan ditanam di atas tanah tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan produksi tanaman tersebut. Oleh sebab itu para petani kiranya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan

pengolahan tanah dengan baik dan tepat. Pengolahan tanah itu bisa dilakukan dengan cara tradisional atau sudah menggunakan mesin-mesin pengolah tanah. Hal ini bisa dilakukan oleh para petani sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Bila para petani sudah mampu melakukan pengolahan tanah secara baik dan tepat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu indikator pemberdayaan masyarakat petani sudah berhasil.

- Pemilihan Bibit Tanaman

Baik tidaknya atau unggul tidaknya bibit tanaman yang akan ditanam para petani akan mempengaruhi keberhasilan usaha taninya.

Petani yang sudah mempunyai pengetahuan dan keterampilan memilih bibit tanaman yang baik atau unggul merupakan salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat, khususnya dibidang bina manusia petani.

- Pemupukan

Pemupukan yang seimbang untuk setiap jenis tanaman yang ditanam para petani perlu diterapkan, karena hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut sampai berhasilnya produksi yang dihasilkan pada waktu panen.

Bila para petani sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan didalam menerapkan pengetahuan itu dalam usaha taninya, maka dikatakan bahwa salah satu indikator pemberdayaan masyarakat petani oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, khususnya para penyuluh pertanian lapangan (PPL) sudah tercapai.

- Pengairan

Khusus untuk tanaman padi dan jenis-jenis tanaman lainnya yang memerlukan pengairan atau air untuk penyiraman penyediaan pengairan yang memdai itu harus tersedia secara terus menerus. Hal ini akan mempengaruhi produksi usaha taninya.

Bila para petani telah memiliki pengetahuan tentang pentingnya pengairan untuk tanaman yang memerlukan pengairan, sehingga mampu menerapkan penyediaan pengairan tersebut, maka hal

tersebut merupakan salah satu indikator pemberdayaan masyarakat petani.

- Pengendalian Hama Penyakit Tanaman

Berbagai tanaman biasanya diserang oleh berbagai hama dan penyakit tanaman. Oleh sebab itu pengetahuan tentang hama dan penyakit tanaman perlu dimiliki oleh para petani, sehingga para petani tersebut mampu mengendalikan hama dan penyakit tanaman yang menjadi pilihan usahanya. Dalam kaitan ini para petani mampu mencegah terjadi penyakita pada tanaman yang ditanamnya serta mampu mengendalikan penyakit tersebut bila tanaman yang ditanamnya sudah terlanjur menyerang tanamannya. Dengan demikian produksi tanamannya tidak terlalu gagal dan para petani tidak mengalami kerugian yang tidak diharapkan. Bila para petani telah mampu melakukan pengendalian terhadap hama dan penyakit tanaman, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat petani.

- Penanganan Pasca Panen

Produksi pertanian yang berhasil perlu diikuti oleh penanganan pasca panen yang baik. Artinya hasil produksi tersebut tidak banyak terbuang karena kesalahan penanganan pasca panen. Bila para petani sudah mampu melakukan penanganan pasca panen dengan baik, maka hal tersebut adalah sebagai salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat petani yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat petani tersebut.

b. Bina Usaha

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat petani tidak hanya ditunjukkan dengan pengetahuan dan keterampilan para petani untuk mampu berproduksi hasil usaha taninya, melainkan juga harus ditunjukkan dengan bina usaha.

Keberhasilan bina usaha dapat ditunjukkan dengan :

- Tingginya produksi pertanian yang dicapai para petani,
- adanya koperasi produksi untuk menampung hasil produksi kelebihan dari konsumsi keluarga,
- jangkauan pemasaran yang terus meluas dan
- jejaring pemasaran yang memudahkan pemasaran hasil produksi.

Bila para petani telah mampu merealisasikan ke-empat hal di atas atau setidaknya ada perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai indikator keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat.

c. Bina Lingkungan

Keberhasilan bina lingkungan dalam usaha pertanian dapat ditunjukkan dengan baiknya lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik atau lingkungan sosial yang ada di wilayah atau daerah yang bersangkutan. Lingkungan fisik yang baik adalah lingkungan yang sehat untuk kehidupan manusia, artinya limbah yang dihasilkan oleh hasil pertanian ditangani dengan baik, sehingga tidak mencemari tanah, air dan udara. Bahkan limbah tersebut kalau memungkinkan dapat didaur ulang menjadi barang yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia atau makhluq hidup lainnya. Misalnya jerami sebagai limbah padi dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak melalui pembuatan silase. Demikian juga limbah sayuran dapat dimanfaatkan sebagai kompos yang diperuntukkan sebagai pupuk organik untuk tanaman.

Lingkungan sosial yang baik dapat ditunjukkan dengan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat petani yang kondusif, dimana harmonisasi diantara seluruh anggota masyarakat di daerah atau wilayah tersebut terjadi. Anggota masyarakat yang dituakan mengayomi yang muda dan yang muda menghormati yang dituakan. Demikian juga anggota masyarakat yang mampu secara finansial membantu yang kurang mampu serta yang kurang mampu secara finansial membantu yang mampu menggunakan tenaga yang dibutuhkan. Disamping itu budaya

gotong royong dikembangkan yang juga mencirikan, bahwa perbedaan yang ada pada masyarakat dijadikan kekuatan untuk terjadinya hubungan diantara masyarakat yang saling menguntungkan dan saling membantu, sehingga terjadi harmonisasi dalam kehidupan di masyarakat.

Bila lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang ada disekitar para petani menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, maka hal-hal tersebut dapat dikatakan sebagai indikator-indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat petani.

d. Bina Kelembagaan

Pemberdayaan masyarakat dalam bina kelembagaan dikatakan berhasil, salah satunya dapat dilihat dari terbentuk dan aktifnya lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kebutuhan para petani. Bila semua lembaga yang ada kaitannya dengan para petani terbentuk, maka hal tersebut akan mempermudah para petani mengembangkan usahanya. Misalnya kelompok tani untuk supaya terjadinya efisiensi dalam penyediaan sarana produski pertanian (saprodi) dapat terwujud. Kelompok tani terbentuk dan aktif dalam menyediakan semua kebutuhan para petani, baik penyediaan saprodi atau menyalurkan hasil produksi pertanian. Disamping itu koperasi konsumsi dan koperasi produksi yang sangat dibutuhkan petani untuk menyediakan saprodi dan menampung hasil produksi ada di tengah-tengah para petani. Hal ini akan memperlancar kegiatan usahatani para petani di daerah yang bersangkutan bahkan selain hasil produksinya mampu memenuhi kebutuhan hidup para petani juga dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat lain disekitarnya atau bahkan bisa menjangkau pemasaran ke luar daerah tersebut.

2) Peternak

a. Bina Manusia

Bina manusia peternak dikatakan berhasil dapat ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut : para peternak tersebut mempunyai

keterampilan dalam hal melakukan panca usaha peternakan dan penanganan pasca panen dengan baik, yaitu meliputi :

- Pemilihan Bibit Ternak

Bibit ternak yang baik atau unggul akan mempengaruhi berkembangnya ternak yang diusahakan para peternak. Oleh sebab itu para peternak harus memiliki pengetahuan dan keterampilan memilih bibit yang unggul bila usaha ternaknya ingin berhasil dan berkembang. Untuk setiap jenis ternak yang dipeliharanya, maka ciri-ciri bibit ternak yang unggul, baik induk ataupun pejantan mempunyai karanter yang khas. Misalnya untuk sapi pedaging akan berbeda dengan sapi perah. Demikian juga untuk kambing pada usaha breeding akan berbeda dengan kambing perah, dan lain-lain. Demikian juga untuk ternak unggas dan aneka ternak seperti kelinci.

Bila para peternak memiliki pengetahuan tentang cara memilih bibit unggul dan mampu menerapkan dalam usaha ternaknya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat para peternak.

- Perkandangan

Pada umumnya usaha peternakan di Indonesia, baik ternak besar seperti sapi perah, sapi potong dan kerbau serta ternak kecil seperti domba dan kambing tidak dipelihara seperti yang dilakukan di negara-negara yang masih luas padang penggembalaannya dengan cara digembalakan di padang rumput, melainkan dikandangkan dan diberi makanan dengan cara menyabit rumput oleh para peternak untuk diberikan di kandang kepada ternaknya. Oleh sebab itu pengetahuan tentang bagaimana kandang ternak yang baik, aman dan nyaman untuk ternaknya harus dimiliki oleh para peternak. Disamping itu efisiensi biaya harus diperhatikan, sehingga luas kandang dan bahan-bahan untuk pembuatan kandang tersebut harus diperhitungkan secara matang.

Bila para peternak memiliki pengetahuan perkandangn yang baik dan mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam usaha

ternaknya, maka dapat dikatakan hal tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan program pemerdayaan masyarakat para peternak.

- Pemberian Makanan Ternak

Pemberian makanan ternak kepada ternak yang dipelihara oleh para peternak harus memperhatikan kuantitas dan kualitas makanan yang dibutuhkan ternak tersebut. Oleh sebab itu pengetahuan tentang makanan ternak yang berkualitas dan berapa jumlah makanan yang harus diberikan kepada ternaknya setiap hari harus dimiliki oleh setiap peternak. Hal ini akan mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan ternaknya serta akan menentukan keberhasilan analisa usaha ternaknya, sehingga dapat menguntungkan para peternak.

Bila para peternak memiliki pengetahuan tentang makanan ternak yang baik dan mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam pemberian makanan ternak itu secara baik pemberian kepada ternaknya secara kuantitas dan kualitas, maka dapat dikatakan hal tersebut sebagai salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat para peternak.

- Tata Laksana

Setiap jenis ternak mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, sehingga jenis makanan dan waktu pemberian makanan serta frekwensi pemberian makanan kepada ternaknya dapat sesuai dengan karakteristik dari jenis ternak tersebut.

Bila para peternak memiliki pengetahuan dan dapat menerapkan hal tersebut dalam melakukan usaha ternaknya, maka dikatakan hal tersebut sebahai salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat para peternak.

- Pengendalian Penyakit Ternak

Beberapa penyakit ternak biasa terjadi pada ternak yang dipelihara peternak. OLeh sebab itu pengetahuan tentang penyakit-penyakit ternak untuk setiap jenis ternak hendaknya dimiliki oleh setiap peternak, sehingga pada pelaksanaan usaha

ternaknya para peternak mampu melakukan pencegahan atau bahkan mampu melakukan pertolongan pertama sebelum ditangani oleh mantri atau dokter hewan untuk pengobatan pada ternak yang sudah terjangkit penyakit.

Bila para peternak memiliki pengetahuan dan dapat menerapkan hal tersebut dalam melakukan usaha ternaknya, maka dikatakan hal tersebut sebahai salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat para peternak.

- Penanganan Pasca Panen

Keberhasilan usaha ternak tidak hanya ditentukan oleh kegiatan produksi, melainkan juga bagaimana cara menangani produksi setelah panen, misalnya untuk ternak sapi perah hasil produksi susunya cepat rusak atau basi kalau tidak ditangani secara tepat. Oleh sebab itu pengetahuan tentang karakteristik hasil produksi ternak itu harus dimiliki oleh para peternak. Hal ini akan membawa kepada kesuksesan usahanya. Artinya kerugian usaha bisa diminimalisir.

Bila para peternak memiliki pengetahuan tersebut dan dapat menerapkan hal tersebut dalam melakukan usaha ternaknya, maka dikatakan hal tersebut sebahai salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat para peternak.

b. Bina Usaha

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat peternak tidak hanya ditunjukkan dengan pengetahuan dan keterampilan para peternak untuk mampu berproduksi hasil usaha ternaknya, melainkan juga harus ditunjukkan dengan bina usaha.

Keberhasilan bina usaha dapat ditunjukkan dengan :

- Tingginya produksi peternakan yang dicapai para peternak,
- adanya koperasi produksi untuk menampung hasil produksi kelebihan dari konsumsi keluarga,
- jangkauan pemasaran yang terus meluas dan

- jejaring pemasaran yang memudahkan pemasaran hasil produksi.

Bila para peternak telah mampu merealisasikan ke empat hal di atas atau setidaknya ada perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai indikator keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat para peternak.

c. Bina Lingkungan

Keberhasilan bina lingkungan dalam usaha peternakan dapat ditunjukkan dengan baiknya lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik atau lingkungan social yang ada di wilayah atau daerah yang bersangkutan.

Lingkungan fisik yang baik adalah lingkungan yang sehat untuk kehidupan manusia, artinya limbah yang dihasilkan oleh hasil peternakan seperti kotoran ternak dan bau yang ditimbulkannya dapat ditangani dengan baik, sehingga tidak mencemari tanah, air dan udara. Bahkan limbah tersebut kalau memungkinkan dapat didaur ulang menjadi barang yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia atau makhluq hidup lainnya. Misalnya kotoran ternak tersebut diolah menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energy, baik untuk memasak atau penerangan. Disamping itu kotoran ternak dapat diolah menjadi pupuk organic yang dapat digunakan untuk memupuk tanaman.

Demikian juga lingkungan social yang baik dapat ditunjukkan dengan berkembangnya kehidupan social masyarakat peternak yang kondusif, dimana harmonisasi diantara seluruh peternak dan anggota masyarakat lainnya di daerah atau wilayah tersebut terjadi. Para ketua kelompok peternak atau anggota masyarakat yang dituakan mengayomi yang muda dan yang muda menghormati yang dituakan. Demikian juga peternak yang mampu secara finansial membantu yang kurang mampu serta yang kurang mampu secara finansial membantu yang mampu

menggunakan tenaga yang dibutuhkan. Disamping itu budaya gotong royong dikembangkan yang juga mencirikan, bahwa perbedaan yang ada pada masyarakat dijadikan kekuatan untuk terjadinya hubungan diantara masyarakat yang saling menguntungkan dan saling membantu, sehingga terjadi harmonisasi dalam kehidupan dimasyarakat.

Bila lingkungan fisik dan lingkungan social yang ada disekitar para peternak menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, maka hal-hal tersebut dapat dikatakan sebagai indikator-indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat para peternak.

Bila para peternak memiliki pengetahuan dan dapat menerapkan hal tersebut dalam membina lingkungannya, maka dikatakan hal tersebut sebahai salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat para peternak.

d. Bina Kelembagaan

Pemberdayaan masyarakat dalam bina kelembagaan dikatakan berhasil, salah satunya dapat dilihat dari terbentuk dan aktifnya lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kebutuhan para peternak. Bila semua lembaga yang ada kaitannya dengan para peternak terbentuk, maka hal tersebut akan mempermudah para peternak untuk mengembangkan usahanya. Misalnya kelompok peternak untuk supaya terjadinya efisiensi dalam penyediaan sarana produski peternakan (sapronak) dapat terwujud. Kelompok peternak terbentuk dan aktif dalam mengkoordinir semua kebutuhan para peternak, baik penyediaan sapronak atau menyalurkan hasil produksi peternakan. Disamping itu koperasi konsumsi dan koperasi produksi yang sangat dibutuhkan peternak untuk menyediakan sapronak dan menampung hasil produksi ada di tengah-tengah para peternak. Hal ini akan memperlancar kegiatan usahaternak para peternak di daerah yang bersangkutan bahkan selain hasil produksinya mampu memenuhi kebutuhan hidup para peternak juga dapat memenuhi kebutuhan hidup

masyarakat lain disekitarnya atau bahkan bisa menjangkau pemasaran ke luar daerah tersebut.

Bila para peternak memiliki pengetahuan dan dapat menerapkan hal tersebut dalam membina kelembagaan yang mendukung usaha ternaknya, maka dikatakan hal tersebut sebahai salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat para peternak.

3) Nelayan

a. Bina Manusia

Bina manusia nelayan dikatakan berhasil dapat ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut : para nelayan tersebut mempunyai keterampilan dalam hal melakukan panca usaha perikanan dan penanganan pasca panen dengan baik, yaitu meliputi :

- Jenis Ikan

Para nelayan harus mampu mengenali jenis ikan yang akan ditangkapnya di laut, sehingga perlakuan dalam melakukan penangkapanpun akan bisa dilakukan.

- Kapal/Perahu Tangkap Ikan

Dalam rangka pergi melaut untuk menangkap ikan para nelayan harus menggunakan kapal atau perahu. Oleh sebab itu para nelayan harus memiliki atau menyewa kapal/perahu. Dalam kaitan bila kapal/perahu ini milik sendiri, maka harus bisa atau mempunyai orang yang memiliki keterampilan dalam mengendalikan kapal/perahu. Demikian juga kalau kapal/perahu ini merupakan barang sewaan, maka harus bisa bekerja sama dengan si pemilik, sehingga para nelayan itu merasa nyaman dalam melautnya. Dalam kegiatan melaut ini para nelayan dapat pergi bersama-sama sesuai besarnya ukuran kapal yang digunakan, misalnya bisa 3-20 orang.

- Peralatan Tangkap Ikan

Dalam pekerjaan nelayan untuk melaut diperlukan alat tangkap ikan yang memadai, sehingga hasil tangkapan ikannya diharapkan dapat optimal.

- Keterampilan Melaut

Setiap nelayan yang pergi melaut harus memiliki kesehatan, keterampilan dan keberanian untuk melaut. Hal ini diperlukan, sehingga bila menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dapat mengatasinya dan dapat meminimalisir kecelakaan. Disamping itu harus membawa perbekalan yang cukup untuk selama berada di tengah laut.

- Keterampilan menggunakan alat dan umpan tangkap ikan

Dalam rangka pergi melaut para nelayan harus membawa perlengkapan tangkap ikan dan makanan ikan sebagai umpan mendapatkan ikan yang maksimal. Oleh sebab itu diperlukan peralatan yang memadai. Disamping itu diperlukan juga keterampilan menggunakan alat-alat itu dengan baik, sehingga ikan hasil tangkapannya dapat optimal.

- Penanganan Pasca Panen

Dalam mengangkut ikan hasil tangkapannya, para nelayan harus mampu mengemasnya dengan baik, sehingga ikan hasil tangkapannya untuk diangkut ke darat tidak mengalami kerusakan yang akan berpengaruh terhadap keuntungan yang akan diperolehnya.

Bila para nelayan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan mampu menerapkan hal tersebut dalam profesinya sebagai nelayan, maka dikatakan hal tersebut sebagai salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat nelayan.

b. Bina Usaha

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat para nelayan tidak hanya ditunjukkan dengan pengetahuan dan keterampilan para nelayan untuk mampu berproduksi hasil usaha tangkap ikannya, melainkan juga harus ditunjukkan dengan bina usaha.

Keberhasilan bina usaha dapat ditunjukkan dengan :

- Tingginya produksi hasil tangkap ikannya yang dicapai para nelayan,
- adanya koperasi produksi untuk menampung hasil produksi kelebihan dari konsumsi keluarga,
- jangkauan pemasaran yang terus meluas dan
- jejaring pemasaran yang memudahkan pemasaran hasil produksi.

Bila para nelayan telah mampu merealisasikan ke empat hal di atas atau setidaknya ada perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai indikator keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat.

c. Bina Lingkungan

Keberhasilan bina lingkungan dalam usaha para nelayan dapat ditunjukkan dengan baiknya lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik atau lingkungan social yang ada di wilayah atau daerah yang bersangkutan.

Lingkungan fisik yang baik adalah lingkungan yang sehat untuk kehidupan manusia. Demikian juga lingkungan social yang baik dapat ditunjukkan dengan berkembangnya kehidupan social masyarakat nelayan yang kondusif, dimana harmonisasi diantara seluruh anggota masyarakat di daerah atau wilayah tersebut terjadi.

Bila lingkungan fisik dan lingkungan social yang ada disekitar para nelayan menunjukkan perubahan kea rah yang lebih baik, maka hal-hal tersebut dapat dikatakan sebagai indikator-indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat nelayan.

d. Bina Kelembagaan

Pemberdayaan masyarakat dalam bina kelembagaan dikatakan berhasil, salah satunya dapat dilihat dari terbentuk dan aktifnya lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kebutuhan para nelayan. Bila semua lembaga yang ada kaitannya dengan para nelayan terbentuk, maka hal tersebut akan mempermudah para nelayan mengembangkan usahanya. Misalnya kelompok nelayan

untuk supaya terjadinya efisiensi dalam penyediaan sarana tangkap ikan dapat terwujud. Kelompok nelayan terbentuk dan aktif dalam memfasilitasi semua kebutuhan para nelayan, baik penyediaan sarana tangkap ikan atau menyalurkan hasil produksi perikanan laut. Disamping itu koperasi konsumsi dan koperasi produksi yang sangat dibutuhkan para nelayan untuk menyediakan sapra dan menampung hasil produksi ada di tengah-tengah para nelayan. Hal ini akan memperlancar kegiatan usaha tangkap ikan para nelayan di daerah yang bersangkutan bahkan selain hasil produksinya mampu memenuhi kebutuhan hidup para pnelayan dan keluarganya juga dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat lain disekitarnya atau bahkan bisa menjangkau pemasaran ke luar daerah tersebut.

Sektor Industri Dan Ekonomi Kreatif

a. Bina Manusia

Bina manusia para pengusaha dan pengrajin industri kecil dikatakan berhasil jika para pengusaha dan pengrajin tersebut mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam hal melakukan usaha industri dengan baik, yaitu meliputi :

- Penyediaan Bahan Baku

Keberlangsungan suatu usaha industri kecil, baik industri kerajinan tangan ataupun industri makanan sangat tergantung kepada ketersediaan bahan baku secara terus menerus dan mudah didapat oleh para pengusaha industri tersebut. Oleh sebab itu informasi sebanyak-banyaknya tentang ketersediaan bahan baku, baik kuantitas dan kualitasnya setiap periode waktu tertentu harus dimiliki oleh setiap pemilik usaha atau pegawai yang diberi tugas untuk mendapatkan informasi itu. Oleh sebab itu menjalin hubungan dan membuat jejaring usaha dengan orang-orang yang memiliki bahan baku serta yang mempunyai informasi tentang ketersediaan bahan baku harus terus dijaga dan dikembangkan.

Dengan demikian diharapkan usaha industri yang digelutinya ini dapat berjalan dengan baik dan berkembang.

- Modal

Modal usaha dan pendapatan yang terus berkembang dari para pemilik usaha serta pendapatan yang terus meningkat dari para pengrajin merupakan salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang bekerja dalam industri.

- Tenaga kerja

Tenaga kerja yang bekerja pada setiap usaha industri yang jumlahnya terus berkembang serta kualitas keterampilannya terus meningkat adalah salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat dibidang industri.

- Teknologi

Penggunaan teknologi yang tepat dalam melakukan usaha industri, baik teknologi sederhana atau teknologi canggih sesuai ketepatannya adalah merupakan salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dibidang industri.

- Produksi

Produksi hasil usaha industri yang dihasilkan oleh para pengrajin atau pengusaha dibidang industri yang terus meningkat jumlah dan kualitasnya adalah merupakan salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dibidang industri.

- Pemasaran

Di beberapa daerah sentral industri kecil, faktor pemasaran merupakan salah satu kendala yang dihadapi para pengusaha industri kecil. Hal ini perlu bantuan dari berbagai pihak untuk mampu memasarkan hasil produksi industri kecil supaya usaha industrinya dapat terus berkembang yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan para pengusaha industri dan para pengrajin serta masyarakat secara luas, karena mampu membuka lapangan kerja yang terus menigkat.

Bila hal ini bisa terjadi, maka hal tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dibidang industri kecil.

b. Bina Usaha

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat para pengusaha dan pengrajin industri kecil tidak hanya ditunjukkan dengan pengetahuan dan keterampilan para pengusaha dan pengrajin industri kecil untuk mampu berproduksi hasil usaha industrinya, melainkan juga harus ditunjukkan dengan bina usaha.

Keberhasilan bina usaha dapat ditunjukkan dengan :

- Tingginya produksi hasil industri kecil yang dicapai para pengusaha dan pengrajin
- adanya koperasi konsumsi dan produksi untuk menyediakan kebutuhan hidup para pengrajin dan menyediakan peralatan yang diperlukan oleh para pengusaha serta menampung hasil produksi
- jangkauan pemasaran yang terus meluas dan
- jejaring pemasaran yang memudahkan pemasaran hasil produksi.

Bila para pengusaha dan pengrajin industri kecil telah mampu merealisasikan ke-empat hal di atas atau setidaknya ada perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu indikator keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat.

c. Bina Lingkungan

Keberhasilan bina lingkungan dalam usaha para pengusaha dan pengrajin industri kecil dapat ditunjukkan dengan baiknya lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik atau lingkungan social yang ada di wilayah atau daerah yang bersangkutan.

Lingkungan fisik yang baik adalah lingkungan yang sehat untuk kehidupan manusia. Dalam kaitan ini misalnya limbah kegiatan usaha industri kecil dapat dikelola secara baik, sehingga tidak

mencemari alam, baik tanah, air dan udara. Demikian juga lingkungan social yang baik dapat ditunjukkan dengan berkembangnya kehidupan social masyarakat para pengusaha dan pengrajin industri kecil yang kondusif, dimana harmonisasi diantara seluruh anggota masyarakat di daerah atau wilayah tersebut terjadi.

Bila lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang ada disekitar para pengusaha dan pengrajin industri kecil menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik dari waktu ke waktu, maka hal-hal tersebut dapat dikatakan sebagai indikator-indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dibidang industri kecil.

d. Bina Kelembagaan

Pemberdayaan masyarakat dalam bina kelembagaan dikatakan berhasil, salah satunya dapat dilihat dari terbentuk dan aktifnya lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kebutuhan para pengusaha dan pengrajin industri kecil. Bila semua lembaga yang ada kaitannya dengan para pengusaha dan pengrajin industri kecil terbentuk, maka hal tersebut akan mempermudah para pengusaha dan pengrajin mengembangkan usahanya. Misalnya kelompok pengusaha dan pengrajin untuk supaya terjadinya efisiensi dalam penyediaan sapra industri kecil dapat terwujud. Kelompok pengusaha dan pengrajin industri kecil terbentuk dan aktif dalam memfasilitasi semua kebutuhan para pengusaha dan pengrajin, baik penyediaan sapra industri kecil serta kebutuhan konsumsi pengusaha dan pengrajin atau menyalurkan hasil produksi industri kecil. Disamping itu koperasi konsumsi dan koperasi produksi yang sangat dibutuhkan para pengusaha dan pengrajin industri kecil untuk menyediakan sapra dan kebutuhan hidup serta menampung hasil produksi ada di tengah-tengah para pengusaha dan pengrajin industri kecil. Hal ini akan memperlancar kegiatan usaha industri kecil para pengusaha dan pengrajin industri kecil di daerah yang bersangkutan bahkan dapat dipasarkan kepada para

konsumen disekitarnya atau bahkan bisa menjangkau pemasaran ke luar daerah tersebut.

Sektor Pariwisata

a. Bina Manusia

Bina manusia para pengusaha pendukung pariwisata atau para pengusaha jasa dibidang pariwisata dikatakan berhasil jika para pengusaha tersebut mampu mendukung pariwisata yang ada di wilayahnya untuk terus mendukung peningkatan para wisatawan, baik wisatawan domestic maupun wisatawan manca negara untuk datang berkunjung ke obyek wisata yang ada di wilayahnya. Hal tersebut terkait dengan sapta pesona yang dikembangkan di wilayah tersebut serta memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- Daya Tarik wisata

Obyek wisata yang ada di wilayah yang bersangkutan harus terus dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta yang bermitra dengan pemerintah, sehingga menjadi destinasi yang mempunyai daya Tarik khas obyek wisata yang bersangkutan kepada para wiatawan yang akan dan sudah berkunjung ke obyek wisata tersebut. Selain itu masyarakat di wilayah ini juga berperan aktif mendukung berkembangnya obyek wisata yang dikelola oleh pihak pemerintah atau pihak ketiga yang bermitra dengan pemerintah.

- Budaya, seni dan adat istiadat

Selain karakter, situasi dan kondisi obyek wisata, maka budaya setempat, seni dan adat istiadat masyarakat setempat perlu dikembangkan untuk mendukung berkembangnya kepariwisataan di wilayah tersebut. Hal ini akan menambah daya tarik wisata kepada para wisatawan untuk mau berkunjung ke obyek wisata yang ada di wilayah tersebut. Artinya masyarakat yang ada di wilayah beradanya tempat wisata ini selalu berperan aktif

mengembangkan budaya dan seni yang dimiliki masyarakat setempat yang dapat dijual kepada para wisatawan.

- Sarana dan prasarana di sekitar obyek wisata dan menuju obyek wisata

Para wisatawan terdorong untuk datang ke obyek wisata yang ada di suatu daerah atau wilayah salah satunya ditentukan oleh sarana dan prasarana yang tersedia disekitar obyek wisata tersebut relatif lengkap. Misalnya ketersediaan hotel dan penginapan lainnya, restoran dan rumah-rumah makan yang menyediakan kuliner khas wilayah tersebut, pusat-pusat penjualan cindramata berupa kerajinan-kerajinan tangan dan makanan khas yang dapat dibawa para wisatawan sebagai oleh-oleh ke kampung halamannya setelah melakukan kunjungan wisata ke wilayah tersebut. Di samping itu juga tersedia Jaringan dan alat-alat komunikasi serta teknologi informasi, misalnya internet, supaya para wisatawan mudah berhubungan dan berkomunikasi dengan wilayah lainnya. Prasarana jalan dan alat transportasi yang memadai dengan harga terjangkau akan mendorong banyaknya wisatawan yang ingin berkunjung ke obyek wisata di wilayah tersebut.

- Permintaan pasar

Kemampuan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk terus mengembangkan kepariwisataan di suatu wilayah adalah terus berusaha memenuhi permintaan pasar, dalam hal ini para wisatawan yang ingin dan telah berkunjung ke obyek wisata yang ada di wilayah tersebut.

b. Bina Usaha

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata tidak hanya ditunjukkan dengan pembangunan dan pengembangan obyek wisata oleh pemerintah atau pihak swasta/ketiga yang bermitra dengan pemerintah melainkan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku yang menyatakan, bahwa Salah satu prinsip kepariwisataan yang terkandung dalam Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah memberdayakan masyarakat setempat dimana masyarakat berhak berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan dan berkewajiban menjaga dan melestarikan daya tarik wisata, serta membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Bila masyarakat berperan aktif dalam proses pembangunan kepariwisataan, menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; serta membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata, maka dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dibidang kepariwisataan berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke obyek wisata yang ada di wilayah tersebut serta adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari berkembangnya kepariwisataan di wilayah tersebut.

c. Bina Lingkungan

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dibidang kepariwisataan tidaklah cukup dengan meningkatnya kunjungan para wisatawan dan kesejahteraan masyarakat dari segi *income* atau daya beli, melainkan juga meningkatnya kesejahteraan masyarakat dari situasi dan kondisi lingkungan yang ada wilayah beradanya obyek wisata itu, baik lingkungan fisik maupun non-fisik atau lingkungan social masyarakat. Lingkungan fisik yang baik adalah kondisi lingkungan fisik yang sehat untuk berlangsungnya kehidupan manusia di wilayah tersebut yang ditunjukkan dengan ekosistem alam yang seimbang menyangkut daratan atau tanah, lautan atau perairan dan air serta udara yang bersih dan tidak tercemar oleh zat-zat yang membahayakan kesehatan manusia dan mahkluk hidup lainnya.

d. Bina Kelembagaan

Keberhasilan pemberdayaan dibidang pariwisata melalui faktor bina kelembagaan dikatakan berhasil kalau seluruh lembaga yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan yang ada di wilayah beradanya obyek-obyek wisata eksis dan aktif melakukan berbagai kegiatan yang mendukung perkembangan kepariwisataan yang ada di wilayah tersebut. Misalnya organisasi persatuan hotel dan restoran, organisasi travel wisata, organisasi persatuan pemandu wisata, organisasi lingkung seni dan budaya, organisasi pengusaha dan pengrajin serta pedagang cindra mata, dan lain-lain.

B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG SOSIAL BUDAYA

Sektor Pendidikan

a. Bina Manusia

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, maka banyak lembaga-lembaga pendidikan, baik pendidikan formal seperti SD, SMP, SMK/SMU dan Perguruan Tinggi (PT) maupun pendidikan non-formal seperti lembaga-lembaga kursus berbagai jenis keterampilan yang dikelola oleh pihak swasta bermunculan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan fungsi pembangunan dibidang social budaya, khususnya disektor pendidikan. Tugas pemerintah adalah melakukan pembinaan terhadap seluruh lembaga-lembaga pendidikan tersebut, khususnya bina manusia para pengelola lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Dengan demikian mereka dapat mengelola lembaga-lembaga pendidikannya secara professional.

b. Bina Usaha

Lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta itu harus mampu mandiri dalam mengelola usahanya dan mampu berkembang menjadi lembaga pendidikan yang kredibel dan menjadi kebanggan masyarakat di wilayah tersebut.

Pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan dikatakan berhasil kalau pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan itu memperhatikan factor-faktor berikut :

- Sistem Pendidikan

Suatu lembaga pendidikan akan berkembang dengan baik, salah satunya ditentukan oleh sistem pendidikan yang jelas yang telah mendapatakan perijinan sesuai peraturan yang berlaku. Sistem yang jelas itu ditunjukkan dengan system rekrutmen calon peserta didik, rekruitmen tenaga kependidikan yang baik, system pembelajaran yang diberlakukan, dan lain-lain. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan calon dan para peserta didik.

- Tenaga Kependidikan

Salah satu faktor yang mempengaruhi berkembangnya suatu lembaga pendidikan adalah kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan yang memadai.

- Peserta Didik

Peserta didik yang diharapkan mengikuti pendidikan disetiap lembaga pendidikan adalah yang mempunyai minat dan memiliki potensi dibidang sesuai dengan jurusan yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Hal ini akan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran dan kesuksesan pendidikan yang diikuti oleh peserta didik tersebut. Untuk mendapatkan peserta didik yang sesuai perlu diterapkan system perekrutan yang baik terhadap calon peserta didik tersebut.

- Prasarana dan sarana pendidikan

Untuk mendapatkan hasil lulusan yang baik sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dari lembaga pendidikan tersebut, maka prasarana dan sarana pendidikan untuk mendukung pencapaiannya harus memadai atau paling tidak memenuhi persyaratan minimal yang secara bertahap dapat dipenuhi untuk memenuhi persyaratan yang ideal.

- Kurikulum

Kurikulum yang baik dan sesuai pada setiap jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh setiap lembaga pendidikan juga merupakan salah satu indikator keberhasilan pembinaan atau pemberdayaan pihak pengelola lembaga pendidikan tersebut.

- Perpustakaan

Keberhasilan peserta didik dalam mengikuti pendidikan di suatu lembaga pendidikan tergantung kepada ketersediaan perpustakaan yang memadai, karena pengembangan daya analisis peserta didik dapat dilakukan dengan belajar mandiri di perpustakaan. Pada saat *ini E-library* sudah dikembangkan diberbagai lembaga pendidikan, khususnya di tingkat SMP sampai Perguruan Tinggi.

- Laboratorium

Selain faktor-faktor di atas yang telah dijelaskan, maka factor keberadaan laboratorium untuk menunjang praktek dari teori-teori yang telah diberikan di kelas adalah merupakan salah satu indikator keberhasilan peserta didik dalam mengikuti pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Oleh sebab itu ketersediaan laboratorium yang memadai atau yang memenuhi persyaratan minimal mutlak diperlukan.

- Pendukung Rekreasi Kampus

Dalam menyeimbangkan kerja otak dan otot dari peserta didik dalam mendukung keberhasilan peserta didik mengikuti pendidikannya perlu diseiakan prasarana dan sarana rekreasi kampus. Misalnya fasilitas olah raga dan kesenian.

- Pengguna Lulusan

Perkembangan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan juga oleh menguasai informasi pasar, khususnya para pengguna lulusan dari lembaga pendidikan yang dikelola. Bila jenis pendidikan dan kualitas lulusan mampu memenuhi pasar kerja, maka akan menjadi satu lembaga pendidikan yang sangat diminati oleh para calon peserta dan para peserta didik. Oleh sebab itulah perkembangan

informasi pasar harus terus dikuti dan diupdate supaya lembaga pendidikan tersebut mampu mengaupdate secara terus menerus eksis di tengah-tengah persaingan yang sangat ketat diantara lembaga-lembaga pendidikan yang terus bermunculan.

c. Bina Lingkungan

Lembaga pendidikan yang ada di suatu wilayah akan menjadi kebanggaan masyarakat disekitarnya kalau lembaga pendidikan itu mampu beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya, artinya dapat berbaur dengan masyarakat dalam mengikuti kegiatan kemasyarakatan yang juga akan mempengaruhi dikenalnya lembaga pendidikan tersebut oleh masyarakat. Disamping itu kegiatan sosial dari lembaga pendidikan yang menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi itu bisa direalisasikan.

d. Bina Kelembagaan

Lembaga pendidikan yang dikelola akan terus eksis atau diakui keberadaannya kalau aktif mengikuti komunitas lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Misalnya untuk perguruan tinggi aktif mengikuti Forum Rektor, untuk lembaga pendidikan dasar dan menengah para gurunya aktif sebagai anggota PGRI, dan lain-lain.

Buku

ORIGINALITY REPORT

22%	22%	0%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.bappenas.go.id Internet Source	4%
2	www.ypha.or.id Internet Source	2%
3	unstats.un.org Internet Source	1%
4	media.neliti.com Internet Source	1%
5	corrywahyusaraswati.blogspot.com Internet Source	1%
6	ilmupengetahuanumum.com Internet Source	1%
7	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	1%
8	www.jogloabang.com Internet Source	1%
9	sikapdaya.kemsos.go.id Internet Source	1%
10	nopanuryanto.blogspot.com Internet Source	1%

11	selasrimulyani.wordpress.com Internet Source	1 %
12	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	1 %
13	www.scribd.com Internet Source	1 %
14	bagasaskara.wordpress.com Internet Source	1 %
15	jurnal.ubl.ac.id Internet Source	1 %
16	es.scribd.com Internet Source	1 %
17	terbaik321.blogspot.com Internet Source	1 %
18	ekonomi.bisnis.com Internet Source	1 %
19	subarnasips.blogspot.com Internet Source	1 %
20	www.bumn.go.id Internet Source	1 %
21	journals.itb.ac.id Internet Source	1 %
22	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1 %

23	pt.scribd.com Internet Source	1%
24	idoc.pub Internet Source	1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		